

LAPORAN KINERJA TW.I TAHUN 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TIMUR**

**LAPORAN
KINERJA
TW.I TAHUN
2022**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TIMUR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan ridho-Nya Laporan Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan I Tahun 2022 ini dapat selesai. Laporan Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan I Tahun 2022 merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan dan terkompilasi dari lingkup Sekretariat, Bidang, Kasubag/ Seksi.

Laporan Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan I Tahun 2022 ini berisi informasi kinerja pelayanan dan non pelayanan yang telah dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Diharapkan Laporan Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan I Tahun 2022 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat.

Kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga Laporan Triwulan I Tahun 2022 dapat memberikan manfaat yang sebagaimana mestinya.

Malili, 07 April 2022

KEPALA DPM-PTSP,



ANDI HABIL UNRU, SE
Pangreh Pembina TK I
NIP. 1964-04-231 198703 1 208

DAFTAR ISI

Perihal	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	
2.1 Tujuan	5
2.2 Ruang Lingkup	8
BAB III PERJANJIAN KINERJA	
BAB IV REALISASI KINERJA	
3.1 Eselon III	13
BAB V REALISASI KEUANGAN	
BAB VI PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui kegiatan evaluasi ini maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui.

Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian sosial untuk secara sistematis menginvestigasi efektifitas program/menilai kontribusi program terhadap perubahan (goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi). Konsep Dasar Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu atau setelah suatu kegiatan telah berlalu. Mencakup antara lain :

- a. Penilaian atas dampak kolektif — baik positif maupun negatif — dari semua (atau sebagian besar) kegiatan yang telah dilakukan, pada lokasi dan/atau kelompok sasaran yang berbeda-beda.
- b. Deskripsi keluaran dan hasil/manfaat sebagaimana dilihat dari sudut pandang penerima manfaat.

Jenis Evaluasi Tergantung keperluan dilakukan pada titik-titik berbeda dalam siklus program/proyek. Ada evaluasi proses yang berfokus pada mutu penyampaian pelayanan, ada evaluasi biaya-manfaat dan ada evaluasi dampak. Evaluasi formatif dilakukan pada waktu program/kegiatan berjalan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada saat program/kegiatan sudah berakhir, dengan tujuan untuk mengukur dampak serta menghimpun pelajaran/pengalaman yang berguna. Terdapat dua jenis evaluasi yang perlu kita pertimbangkan :

1. Evaluasi atas Proses.

Evaluasi atas proses, jenis evaluasi ini berfokus pada apa yang telah dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang menjadi penerima manfaat, serta apa respons mereka terhadap kegiatan program. Jenis evaluasi ini didasarkan pada laporan-laporan

monitoring dan penelaahan. atas dokumen-dokumen program, wawancara serta kunjungan lapangan. Jenis evaluasi ini relatif lebih mudah dilakukan dan sangat berguna bila laporan atau umpan balik dari lapangan menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan, pengeluaran biaya yang melampaui anggaran dan ada keluhan dari penerima manfaat atau persoalan dalam pengelolaan program.

Oleh karena itu Evaluasi Internal pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu sangat diperlukan guna memonitor dan mengevaluasi kegiatan yang ada sehingga diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan maupun kebijakan di tahun-tahun yang akan datang.

2. Evaluasi Dampak

Evaluasi dampak, jenis evaluasi ini berusaha mengungkapkan siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya; dengan kata lain, sejauh mana hasil/manfaat (dan dampak) yang diharapkan telah tercapai. Jenis evaluasi ini bisa saja cukup mahal bila kelompok sasaran besar sekali atau bila kita harus membuat perbandingan dengan kelompok-kelompok masyarakat di luar program. Evaluasi harus dirancang sesuai dengan sumber daya yang kita miliki sehingga kita mengetahui sejauh mana program telah menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan status kesehatan atau pendidikan, atau manfaat lain bagi wilayah atau kelompok masyarakat sasaran. Kedua jenis evaluasi itu, perlu dibuat penilaian kembali berdasarkan asumsi dasar dan rancangan program (suatu hal yang relatif tidak sering dilakukan). Faktanya adalah bahwa banyak program/kegiatan (dan kebijakan) gagal mencapai hasil yang diinginkan karena asumsi-asumsi dasar dan rancangan program itu sendiri tidak benar.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

2.1 Tujuan

- a. Tersajinya gambaran kegiatan yang telah dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2022 yang bersumber dari APBD. dalam bentuk data dan informasi pada periode tertentu; setiap triwulan.
- b. Diperolehnya gambaran situasi kegiatan yang telah dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan oleh masing- masing satuan kerja
- c. Tersedianya data dan informasi untuk bahan menentukan kebijakan.

2.2. Ruang Lingkup

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan dalam bentuk rapat. Materi yang dibahas capaian realisasi keuangan dan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2022 yang tertuang dalam perjanjian kinerja.

BAB III

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan mengalami pergeseran/perubahan target kinerja dan anggaran maka Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan melaksanakan 7 Program dan 22 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan yang ditertuang pada perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV sebagai berikut :

Tabel. 1. PERJANJIAN KINERJA ESELON III

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja
SEKRETARIAT				
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran (persen)	3.376.376.433	100 %
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu (dokumen)	69.294.735	17
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (persen)	2.646.150.513	100 %
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan (persen)	16.781.981	100 %
4.	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah (rupiah)	10.623.710	2.500.000.000
5.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)	82.615.956	100 %

6.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (persen)	307.938.550	100 %
7.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)	10.168.750	2
8.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (persen)	152.889.438	100 %
9.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (unit)	79.912.000	57
KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL				
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN	450.076.460	33
1.	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMA/PMDN yang terfasilitasi (Persen)	278.541.420	100 %
2.	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/Kota	Persentase jenis potensi yang disusun dalam peta potensi Kabupaten (persen)	171.535.040	100 %
III.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA dan PMDN (Rupiah)	188.444.480	3,3 Triliun
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan	188.444.480	5
KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
IV.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai SOP (persen)	307.191.107	72 %
1.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu (Persen)	307.191.107	100 %
V.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola (Persen)	29.999.850	100 %

2.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid	29.999.850	1
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN				
VI.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait Penanaman Modal (Persen)	417.091.801	75 %
1.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM (Persen)	417.091.801	95 %

BAB IV

REALISASI KINERJA

Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan I Tahun 2022 dilaksanakan secara berjenjang yang dilakukan Kepala Dinas (Eselon II) ke Sekretaris dan Kepala bidang (Eselon III) kemudian Eselon III mengevaluasi setiap Kasubag dan Kasie dilingkup bidang masing-masing.

Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan I Tahun 2022 Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut :

4.1 EVALUASI YANG DILAKUKAN KEPALA DINAS (ESELON II) KE SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG (ESELON III)

A. SEKRETARIS

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan untuk sekretaris dinas ada 1 Program yang dilakukan pada triwulan ke I dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase rata- rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran (persen). Target yang ditetapkan pada triwulan I sebesar 25 % terealisasi 25 % dengan capaian kinerja secara keseluruhan dari TW I, TW II ,TW III dan TW IV sebesar 100 % dengan rincian capaian :

No	Kegiatan	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Sangat Baik
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	100 %	Sangat Baik
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	Sangat Baik
4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 0	buruk
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Sangat Baik
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Sangat Baik

7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Sangat Baik
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Sangat Baik

Capaian kinerja program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92 %, dari target 100 %. Hal tersebut disebabkan karena adanya kegiatan yang realisasinya rendah, yaitu Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.

B. KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

Hasil evaluasi yang dilakukan untuk Kepala Bidang Penanaman Modal ada 2 Program yang dilakukan pada triwulan ke I dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator kinerja pada program ini adalah Jumlah Investor PMA dan PMDN. Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu sebanyak 12 Investor dan terealisasi sebanyak 9 Investor dengan capaian kinerja 75 %.

2. Program Promosi Penanaman Modal.

Indikator kinerja pada program ini adalah Jumlah realisasi PMA dan PMDN . Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu Rp 825.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 772.092.734.631,- dengan capaian kinerja 93,58 %.

C. KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Hasil evaluasi yang dilakukan untuk Kepala Bidang Pelayanan terpadu Satu Pintu ada 2 Program yang dilakukan pada triwulan ke I dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Ketepatan Waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP. Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu sebanyak 15 % dan terealisasi sebanyak 15 % dengan capaian kinerja 100 %.

2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Indikator kinerja pada program ini adalah Jumlah Database penanaman Modal yang valid . Target yang ditetapkan pada triwulan I tidak ada. Target kinerja dihitung pada akhir Tahun (Tw.4) karena berupa Dokumen.

D. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN

Hasil evaluasi yang dilakukan untuk Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan ada 1 Program yang dilakukan pada triwulan ke I dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Pelaku Usaha yang Taat terhadap Peraturan yang terkait Penanaman Modal. Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu sebanyak 15 % dan terealisasi sebanyak 12 % dengan capaian kinerja 80 %.

BAB V

REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan lingkup Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Pada Triwulan I disajikan pada Tabel berikut :

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN 1 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Maret 2021 (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.376.376.433,00	905.202.790,00	416.306.634,00	488.896.156,00
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.294.735,00	16.780.000,00	5.195.000,00	11.585.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.748.010,00	11.880.000,00	4.395.000,00	7.485.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.414.860,00	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.162.965,00	2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.968.900,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.646.150.513,00	725.151.923,00	284.619.793,00	440.532.130,00
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.549.118.503,00	704.901.923,00	273.819.793,00	431.082.130,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	97.032.010,00	20.250.000,00	10.800.000,00	9.450.000,00
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	16.781.981,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00

	Daerah				
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.781.981,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.623.710,00	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.623.710,00	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.615.956,00	12.400.000,00	9.790.000,00	2.610.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.985.956,00	1.400.000,00	0	1.400.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	69.630.000,00	11.000.000,00	9.790.000,00	1.210.000,00
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.938.550,00	93.208.400,00	82.670.900,00	10.537.500,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.832.250,00	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.784.600,00	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.710.700,00	2.256.000,00	1.512.000,00	744.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.675.000,00	3.400.000,00	2.250.000,00	1.150.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.120.000,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.816.000,00	83.022.400,00	76.408.900,00	6.613.500,00
08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.168.750,00	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.168.750,00	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00

	Bangunan Lainnya				
09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.889.438,00	37.502.467,00	26.810.941,00	10.691.526,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.879.570,00	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.009.868,00	14.502.467,00	12.810.941,00	1.691.526,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.912.800,00	15.000.000,00	7.220.000,00	7.780.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.650.000,00	12.000.000,00	5.600.000,00	6.400.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.150.000,00	3.000.000,00	1.620.000,00	1.380.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.112.800,00	0,00	0,00	0,00
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	450.076.460,00	190.407.371,00	10.650.000,00	179.757.371,00
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	278.541.420,00	179.907.371,00	10.650.000,00	169.257.371,00
1.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	231.407.130,00	167.507.371,00	0,00	167.507.371,00
2.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	47.134.290,00	12.400.000,00	10.650.000,00	1.750.000,00
	Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/Kota	171.535.040,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	171.535.040,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00

C.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	188.444.480,00	82.959.480,00	0,00	82.959.480,00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	188.444.480,00	82.959.480,00	0,00	82.959.480,00
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	22.638.490,00	6.233.490,00	0,00	6.233.490,00
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	165.805.990,00	76.725.990,00	0,00	76.725.990,00
D.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	307.191.107,00	74.553.719,00	38.744.400,00	35.809.319,00
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	307.191.107,00	74.553.719,00	38.744.400,00	35.809.319,00
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	286.870.777,00	59.683.389,00	38.744.400,00	20.938.989,00
2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.320.330,00	14.870.330,00	0,00	14.870.330,00
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	417.091.801,00	56.266.898,00	18.197.000,00	38.069.898,00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	417.091.801,00	56.266.898,00	18.197.000,00	38.069.898,00
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	102.921.550,00	6.275.400,00	1.870.000,00	4.405.400,00
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi	215.381.761,00	12.962.001,00	1.250.000,00	11.712.001,00

	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	98.788.490,00	37.029.497,00	15.077.000,00	21.952.497,00
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	29.999.850,00	11.785.175,00	0,00	11.785.175,00
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.999.850,00	11.785.175,00	0,00	11.785.175,00
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	29.999.850,00	11.785.175,00	0,00	11.785.175,00
TOTAL BELANJA		4.769.180.131,00	1.321.175.433,00	483.898.034,00	837.277.399,00
Capaian realisasi Keuangan				36,62 %	

Tabel 3.8
Laporan Kinerja Pencapaian Sasaran Kinerja Instansi
Pencapaian Sasaran Kinerja Instansi Triwulan I Tahun 2022

Unsur/ Bidang Unsur/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
1	2	3		4		5		6		7		8		9=12/7x100%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase rata - rata pelayanan administrasi pertantoran terpenuhi	100	3.376.376.433	512.314,66	416.306.634										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	17	69.294.735	2	5.195.000							2	5195000	11,76%	7,50%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3	33.748.010	1	4.395.000							1	4.395.000	33,33%	13,02%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2	3.414.860	-	-							-	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2	4.162.965	-	800.000							-	800.000	0,00%	19,22%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang	10	27.968.900	1	-							1	-	10,00%	0,00%

			10.623.710											Sangat Rendah	
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	
Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawalan perangkat daerah	100	82.615.956	34,78	9.790.000						34,7826087	9790000		34,78%	11,85%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	0	-	0	0						-	-		0,00%	0,00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah laporan data administrasi kepegawalan yang di mutakhirkan	12,00	12.985.956	3	-						3	-		25,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	11,00	69.630.000	5	9.790.000						5	9.790.000		45,45%	14,06%
		0,00	82.615.956	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										42,24%	11,85%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	307.938.550	55,65	82.670.900						56	82.670.900		55,65%	26,85%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15	5.832.250	3	-						3	-		20,00%	0,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang diadakan	1	2.784.600	-	-						-	-		0,00%	0,00%
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga Yang diadakan	2	3.000.000	-	-						-	-		0,00%	0,00%

[illegible]

2139

Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pembelian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda PM yang terbit	2	231.407.130		0,00													0		0,00%	0,00%
Evaluasi pelaksanaan fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif PM yang dihasilkan	2	47.134.290		10.650.000,00													-	10.650.000	0,00%	22,60%
Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/kota	Persentase jenis potensi yang diusulkan dalam peta potensi kabupaten		171.535.040		-													-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/kota	Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang usaha di Kabupaten/kota	2	171.535.040		-													0	-	0,00%	0,00%
			450.076.480																	0,00%	2,37%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA dan PMDN	3,3E+12	188.444.480	772.092.734.631	-													772.092.734.631	-	23,40%	0,00%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan	5	188.444.480		-													-	-	0,00%	0,00%
Penyusunan Strategi promosi penanaman modal	Jumlah Media Strategi Promosi Penanaman Modal yang dibuat	3	22.638.490		-													-	-	0,00%	0,00%
Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah/kabupaten/kota	Jumlah kegiatan Promosi penanaman modal yang diikuti/dilaksanakan	2	165.805.990		-													-	-	0,00%	0,00%
			188.444.480																	0,00%	0,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan	72,00	307.191.107	15	38.744.400													15	38.744.400	20,83%	12,61%

[illegible]

BAB VI

PENUTUP

Dalam rangka mensukseskan pembangunan di bidang Penanaman Modal Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2022, maka Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan berbagai upaya secara intensif untuk melakukan pengawasan melalui evaluasi terhadap kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan evaluasi ini mutlak diperlukan untuk mengawal pengelolaan anggaran yang profesional sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan capaian realisasi kinerja dan realisasi capaian keuangan maka diusulkan/direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat banyak Sub. kegiatan yang realisasi anggarannya tidak mencapai 90 % hal ini disebabkan oleh :
 - Adanya penyesuaian aplikasi SIPD ke SIMDang (Fmis) sehingga realisasi keuangan terlambat
 - SK TPP belum ditetapkan sehingga pembayaran TPP ASN masih menunggu proses pencairan.
 - Kinerja Sub kegiatan sudah dilaksanakan tetapi karena SPD Tw.1 belum terbit sehingga SPJ belum di GU kan.
2. Selain hal diatas, Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal dengan target kinerja berupa Perda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko masih dalam proses penyelesaian karena team pendamping dan penyusun masih melakukan tinjauan ke Yogyakarta.

Diharapkan dengan disusunnya Evaluasi internal triwulan I ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur ini berpengaruh terhadap ketepatan keputusan yang akan diambil serta perencanaan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Luwu Timur akan semakin lebih baik di tahun – tahun yang akan datang.

LAPORAN INTERNAL TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIAT

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui kegiatan evaluasi ini maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui.

Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian social untuk secara sistematis menginvestigasi efektifitas program/menilai kontribusi program terhadap perubahan (goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi). Konsep Dasar Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu atau setelah suatu kegiatan telah berlalu. Mencakup antara lain:

- a. Penilaian atas dampak kolektif - baik positif maupun negatif – dari semua (atau sebagian besar) kegiatan yang telah dilakukan, pada lokasi dan/atau kelompok sasaran yang berbeda-beda.
- b. Deskripsi keluaran dan hasil/manfaat sebagaimana dilihat dari sudut pandang penerima manfaat.

Jenis Evaluasi Tergantung keperluan dilakukan pada titik-titik berbeda dalam siklus program/proyek. Ada evaluasi proses yang berfokus pada mutu penyampaian pelayanan, ada evaluasi biaya-manfaat dan ada evaluasi dampak. Evaluasi formatif dilakukan pada waktu program/kegiatan berjalan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada saat program/kegiatan sudah berakhir, dengan tujuan untuk mengukur dampak serta menghimpun pelajaran/pengalaman yang berguna. Terdapat dua jenis evaluasi yang perlu kita pertimbangkan :

(1) Evaluasi atas Proses.

Evaluasi atas proses, jenis evaluasi ini berfokus pada apa yang telah dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang menjadi penerima manfaat, serta apa respons mereka

terhadap kegiatan program. Jenis evaluasi ini didasarkan pada laporan-laporan monitoring dan penelaahan. Atas dokumen-dokumen program, wawancara serta kunjungan lapangan. Jenis evaluasi ini relative lebih mudah dilakukan dan sangat berguna bila laporan atau umpan balik dari lapangan menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan, pengeluaranbiaya yang melampaui anggaran dan ada keluhan dari penerima manfaat atau persoalan dalam pengelolaan program.

Oleh karena itu Evaluasi Internal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat diperlukan guna memonitor dan mengevaluasi kegiatan yang ada sehingga diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan maupun kebijakan di tahun- tahun yang akan datang.

(2). Evaluasi Dampak.

Evaluasi dampak, jenis evaluasi ini berusaha mengungkapkan siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya; dengan kata lain, sejauh mana hasil/manfaat (dan dampak) yang diharapkan telah tercapai. Jenis evaluasi ini bisa saja cukup mahal bila kelompok sasaran besar sekali atau bila kita harus membuat perbandingan dengan kelompok-kelompok masyarakat di luar program. Evaluasi harus dirancang sesuai dengan sumberdaya yang kita miliki sehingga kita mengetahui sejauh mana program telah menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan status kesehatan atau pendidikan, atau manfaat lain bagi wilayah atau kelompok masyarakat sasaran. Kedua jenis evaluasi itu, perlu dibuat penilaian kembali berdasarkan asumsi dasar dan rancangan program (suatu hal yang relative tidak sering dilakukan). Faktanya adalah bahwa banyak program/kegiatan (dan kebijakan) gagal mencapai hasil yang diinginkan karena asumsi-asumsi dasar dan rancangan program itu sendiri tidak benar.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

II.1. Tujuan

- a. Tersajinya gambaran kegiatan yang telah dilakukan di Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBD. Dalam bentuk data dan informasi pada periode tertentu setiap triwulan.
- b. Diperolehnya gambaran situasi kegiatan yang telah dilakukan di Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan oleh masing- masing satuankerja
- c. Tersedianya data dan informasi untuk bahan menentukan kebijakan.

II.2. Ruang Lingkup

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan dalam bentuk rapat. Materi yang dibahas capaian realisasi keuangan dan kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam perjanjian kinerja.

BAB III

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Bagian Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami pergeseran/perubahan target kinerja dan anggaran maka Sekretariat melaksanakan 1 Program dan 9 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang ditertuang pada perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV sebagai berikut :

Tabel. 1. PERJANJIAN KINERJA ESELON III

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET ANGGARAN	TARGET KINERJA
1		2	3	4
PROGRAM PENUNJANG				
I	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran (persen)	905.202.790	25 %
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu (dokumen)	16.780.000	2
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (persen)	725.151.923	25 %
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan	2.550.000	25 %

		(persen)		
4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah (rupiah)	2.610.000	0
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (Persen)	12.400.00	25 %
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (persen)	93.208.400	25 %
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)	0	0
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (persen)	37.502.467	25 %
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (unit)	15.000.000	23

Tabel. 2. PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	TARGET KINERJA
1		2	3	4
Kasubag Umum dan Keuangan				
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan (orang)	704.901.923	21 Orang
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	20.250.000	3 Dokumen

	SKPD			
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2.550.000	1 Dokumen
4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	2.610.000	1 Dokumen
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	0	3 Jenis
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang diadakan	0	0
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga Yang diadakan	0	0
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan (jenis)	2.256.000	2 Jenis
9	Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3.400.000	4 Jenis
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1.530.000	15 Exemplar
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	3.000.000	30 Orang
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (unit)	0	0
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0	0

14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	5.000.000	100 Surat
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	14.502.467	15 Rekening
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	18.000.000	4 Orang
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	12.000.000	9 Unit
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	3.000.000	5 Unit
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi (unit)	0	0

Kelompok Perencanaan dan Kepengawasan

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen)	11.880.000	1 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	0,00	0 Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2.000.000	0 Dokumen
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	2.900.000	1 Dokumen
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	11.000.000	5 Orang

		(orang)		
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	1.400.000	3 Dokumen
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu)	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang)	83.022.400	60 orang

BAB IV

REALISASI KINERJA

Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan I Tahun 2022 dilaksanakan secara berjenjang yang dilakukan Kepala Dinas (Eselon II) ke Sekretaris (Eselon III) kemudian Eselon III mengevaluasi setiap Kasubag dibagian Sekretariat lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan I Tahun 2022 bagian Sekretariat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

IV.1 EVALUASI YANG DILAKUKAN SEKRETARIS DINAS (ESELON III) KE KASUBAG (ESELON IV)

Hasil Evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan pada triwulan ke I dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan ada 19 Sub kegiatan sebagai berikut :

1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan (orang), Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 21 Orang realisasi 20 Orang dengan capaian kinerja 95 %, karena 1 orang pegawai dimutasi ke Kesbangpol.

1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen dengan capaian kinerja 100 %.

1.3. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 1 dokumen realisasi 1 dokumen dengan capaian kinerja 100 %.

1.4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 1 Dokumen, terealisasi 1 Dokumen, dengan capaian kinerja 100%.

1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis), Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 3 Jenis, terealisasi 3 Jenis, yaitu belanja penggantian Bahlam lampu 19 W, Kabel Colokan 35 M dengan capaian kinerja 100 %.

1.6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan (jenis), Target kegiatan direncanakan pada Triwulan II.

1.7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan rumah tangga yang diadakan (jenis), Target kegiatan direncanakan pada Triwulan II.

1.8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan (jenis) Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 2 Jenis, terealisasi 2 Jenis, dengan capaian kinerja 100 %.

1.9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis), Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 4 Jenis, terealisasi 4 Jenis antara lain cetak spanduk, jilid, fotocopy dan cetak stempel, dengan capaian kinerja 100 %.

1.10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar) Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 15 exemplar, terealisasi 15 exemplar, Jenis bacaan yang diadakan yaitu Koran Palopo Pos, Tribun Timur, dan Upeks, Kompas, Radar dengan capaian kinerja 100 %.

1.11. Fasilitas Kunjungan Tamu.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang) Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 30 Orang, terealisasi 30 Orang, dengan capaian kinerja 100%.

1.12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (unit), Target kegiatan direncanakan pada Triwulan II.

1.13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (unit), Target kegiatan direncanakan pada Triwulan II.

1.14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat), Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 100 Surat , terealisasi 260 Surat dengan capaian kinerja 260 %.

1.15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening), Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 15 rekening, terealisasi 15 rekening, Rekening terdiri dari 3 rekening PDAM, 3 rekening Listrik untuk Kantor, 6 rekening pulsa Prabayar, 3 rekening TV Kabel.

1.16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang), Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 4 Orang, terealisasi 4 Orang dengan capaian kinerja 100 %.

1.17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit), Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 9 Unit, terealisasi 3 Unit. Dengan capaian kinerja 33 %.

1.18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit), Target yang ditetapkan pada triwulan IV yaitu 5 Unit, terealisasi 5 Unit dengan capaian kinerja 100 %.

1.19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit), Target yang ditetapkan kinerja direncanakan pada triwulan II.

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

Kegiatan yang dilakukan oleh Sub Bagian Perencanaan ada 7 Sub kegiatan sebagai berikut :

2.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan I sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau sebesar 100%.

2.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan I Tidak ada.

2.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan I tidak ada.

2.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%.

2.5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang) Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 5 Orang, terealisasi 5 Orang, dengan capaian kinerja 100 %.

2.6. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen) Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 3 Dokumen, terealisasi 3 Dokumen, dengan capaian kinerja 100 %

2.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali) Target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 60 Orang, terealisasi 200 Kali, dengan capaian kinerja 333 %.

BAB V**REALISASI KEUANGAN**

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan bagian Sekretariat lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Triwulan I Tahun 2022 di sajikan pada Tabel berikut:

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	905.202.790	416.306.634	488.896.156
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.780.000	5.195.000	11.585.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	725.151.923	284.619.793	440.532.130
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2.550.000	0	2.550.000
4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.610.000	0	2.610.000
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.400.000	9.790.000	2.610.000
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.208.400	82.670.900	10.537.500
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.502.467	26.810.941	10.691.526
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000	7.220.000	7.780.000
Jumlah		905.202.790	416.306.634	488.896.156
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN			45,99	

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Sub Kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Sekretariat Pada Triwulan I disajikan pada Tabel berikut :

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN 1 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Maret 2021 (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.376.376.433,00	905.202.790,00	416.306.634,00	488.896.156,00
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.294.735,00	16.780.000,00	5.195.000,00	11.585.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.748.010,00	11.880.000,00	4.395.000,00	7.485.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.414.860,00	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.162.965,00	2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.968.900,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.646.150.513,00	725.151.923,00	284.619.793,00	440.532.130,00
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.549.118.503,00	704.901.923,00	273.819.793,00	431.082.130,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	97.032.010,00	20.250.000,00	10.800.000,00	9.450.000,00
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.781.981,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.781.981,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.623.710,00	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.623.710,00	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.615.956,00	12.400.000,00	9.790.000,00	2.610.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.985.956,00	1.400.000,00	0	1.400.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	69.630.000,00	11.000.000,00	9.790.000,00	1.210.000,00

06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.938.550,00	93.208.400,00	82.670.900,00	10.537.500,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.832.250,00	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.784.600,00	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.710.700,00	2.256.000,00	1.512.000,00	744.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.675.000,00	3.400.000,00	2.250.000,00	1.150.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.832.250,00	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.120.000,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.816.000,00	83.022.400,00	76.408.900,00	6.613.500,00
07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.168.750,00	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.168.750,00	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.889.438,00	37.502.467,00	26.810.941,00	10.691.526,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.879.570,00	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.009.868,00	14.502.467,00	12.810.941,00	1.691.526,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00
09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.912.800,00	15.000.000,00	7.220.000,00	7.780.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.650.000,00	12.000.000,00	5.600.000,00	6.400.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.150.000,00	3.000.000,00	1.620.000,00	1.380.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.112.800,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN INTERNAL TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2022

BIDANG PENANAMAN MODAL

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB I PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan di bidang penanaman modal yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau adalah merupakan suatu keharusan untuk dipenuhi. Hal tersebut sejalan dengan amanat konstitusi baik undang-undang maupun peraturan turunannya, bahwa segenap jajaran penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif harus meningkatkan pelayanan penyelenggara negara serta memegang teguh komitmen untuk menegakkan *good and clean government*.

Wujud komitmen penyelenggaraan pemerintah yang memegang prinsip *good and clean governance* adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan investasi yang mengedepankan prinsip “3 Pasti” yaitu pasti syarat, pasti biaya dan pasti prosedurnya. Dengan memegang teguh komitmen tersebut maka target peningkatan kualitas pelayanan pemerintah akan meningkat. Sehingga hal tersebut juga akan berdampak pada upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam pelayanan perizinan investasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa ada 3 (tiga) hal utama yang mendasari dibentuknya kelembagaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah yaitu :

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berinvestasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. Pelaksanaan pelayanan perizinan berinvestasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yaitu memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau

BIDANG PENANAMAN MODAL DPMPSTP KAB. LUWU TIMUR

serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat; dan

3. Pelaksanaan pelayanan perizinan berinvestasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai *good and clean governance* yang lebih baik

Penjabaran pelaksanaan program di Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, dijabarkan oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) orang pejabat fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, kedalam 5 (lima) kegiatan dengan berdasarkan pada :

1. Dokumen Rencana Strategis (Revisi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
2. Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021;
4. SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Nomor 01/I Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Nomor 01/I Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, maka diperjanjikan 2 program sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Program promosi penanaman modal dengan anggaran sebesar Rp. 188.444.480,00
2. Program pengembangan iklim penanaman modal dengan anggaran sebesar Rp. 450.076.460,00

Pencapaian target dan sasaran program yang telah ditetapkan akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan investasi dan realisasi investasi di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022. Target kinerja Program disajikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan (PK-P) dan Rencana Aksi Perubahan (RA-P) Atas Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

BAB III

REALISASI KINERJA

Berdasarkan Evaluasi Atas Rencana Aksi sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran Perubahan Tahun 2022 (tabel evaluasi atas rencana aksi terlampir) dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Program promosi penanaman modal

Target kinerja program yang ditetapkan adalah pelaksanaan even pameran investasi sebanyak 3 even dengan rincian 2 kali even pelaksanaan pameran pembangunan dan 1 kali pelaksanaan kegiatan strategi promosi. Adapun prosentase realisasi kinerja yang dicapai yaitu sebesar 100 % dari target kinerja yang ditetapkan dengan rincian :

$$= \frac{\text{Jumlah even yang dilaksanakan}}{\text{Total target even pameran}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{1} \times 100\%$$

$$= 0 \%$$

2. Program pengembangan iklim penanaman modal

Target indikator capaian program adalah pencapaian nilai investasi sebanyak Rp 825.000.000.000,-,-. Adapun pencapaian target kinerja untuk triwulan I (satu) adalah penambahan nilai investasi sebanyak Rp 768.857.094.932,- (PMA Rp 608.511.390.527,- dan PMDN Rp 160.345.704.405,-) dengan rincian yaitu :

$$= \frac{\text{Jumlah nilai investasi triwulan berjalan}}{\text{Target penambahan nilai invesatsiper triwulan}} \times 100\%$$

$$= \frac{768.857.094.932,-}{825.000.000.000,-} \times 100\%$$

$$= 93,19 \%$$

Tidak tercapainya target program penyelenggaraan promosi penanaman modal disebabkan oleh perubahan jadwal pelaksanaan pameran Dekranasda yang direncanakan pada bulan Maret menjadi bulan Juni 2022. Biaya pembuatan stand pameran Dekranasda dibebankan sepenuhnya kepada PT. Vale Indonesia, Tbk Pencapaian program pengembangan iklim penanaman modal sebesar 93,19 % disebabkan oleh telah maksimalnya penerapan pelayanan perizinan secara elektronik (*on line single submission*) sehingga sangat memudahkan para calon investor untuk melakukan pengurusan perizinan secara on line.

Adapun capaian kinerja rata – rata program yaitu

No	Kegiatan	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	penyelenggaraan promosi penanaman modal	0	Buruk
2.	penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	93,19	Sangat Baik
	Jumlah	93,19	
	Realisasi Program	= 93,19/2	Sangat Rendah
		46,60 %	

BIDANG PENANAMAN MODAL DPMPSTP KAB. LUWU TIMUR

BAB IV REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan program pada Bidang Penanaman Modal disajikan pada Tabel berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	SELISIH	%
1.	Promosi penanaman modal	188.444.480,-	80.120.000,-	32.000.000,-	48.120.000,-	39,94
2.	Pengembangan iklim penanaman modal	450.076.460,-	112.519.000,-	82.450.000,-	30.069.000,-	73,28
Jumlah		638.520.940,-	192.639.000,-	114.450.000,-	78.189.000,-	
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN				59,41 %		

BIDANG PENANAMAN MODAL DPMPSTP KAB. LUWU TIMUR

BAB V

PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut :

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

46,60 %

RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN

59,41 %

Berdasarkan capaian realisasi kinerja dan realisasi capaian keuangan maka diusulkan/direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyusun target kinerja program dan kegiatan agar mengacu pada data capaian kinerja tahun berjalan.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus lebih cermat dalam meletakkan anggaran kas;
3. Masing-masing pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) agar membuat pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan.

Malili, 1 April 2022
KABID PENANAMAN MODAL



AYUB KOMBONG, ST., M.Si
NIP. 19750825 200502 1 006

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I

A. LATAR BELAKANG

1. Bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum menyusun dokumen produk unggulan daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. Dokumen produk unggulan daerah akan menjadi arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan potensi usaha yang layak untuk dilakukan kegiatan promosi dan temu bisnis;

B. TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota tujuannya antara lain :

1. Melakukan identifikasi, klasifikasi dan inventarisasi terhadap kondisi dan potensi ekonomi infrastruktur, demografi dan para pelaku usaha lingkup wilayah Kabupaten Luwu Timur;
2. Menjadi basis data dan informasi tentang kondisi dan potensi ekonomi, infrastruktur, demografi, dan para pelaku usaha berdasarkan sektor/kegiatan usaha masing-masing;



C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan anggaran kas dan target kinerja yang telah ditetapkan, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan seminar hasil akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2022, namun saat ini masih mengalami keterlambatan progress sehingga saat ini masih dalam tahap menyusun kerangka acuan kerja (KAK).



E. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota yang ditetapkan pada triwulan I telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan;
2. Adapun capaian prosentase realisasi keuangan sampai dengan triwulan I (satu) yaitu :

$$= \frac{\text{Realisasi Keuangan}}{\text{Target Realisasi Keuangan}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} & \text{Rp } 8.500.000,- \\ &= \frac{\text{Rp } 8.500.000,-}{\text{Rp } 10.500.000,-} \times 100 \% \\ &= \mathbf{80,95 \%} \end{aligned}$$

F. KENDALA DAN HAMBATAN

Adapun kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran sesuai anggaran kas triwulan I (satu) yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan untuk triwulan I (satu) telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran maka akan pelaksanaan kegiatan pada triwulan II (dua) khususnya progres untuk pencairan kegiatan jasa konsultasi akan lebih dimaksimalkan;



2. Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan akan melibatkan semua bidang lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota, sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan / pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2023.

Malili, 1 April 2022

Kabid Penanaman Modal / PPTK



AYUB KOMBONG, S.T.,M.Si
NIP. 19750825 200502 1 006



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I

A. LATAR BELAKANG

1. Kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sebagai upaya untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan kondusif bagi para investor;
2. Pemerintah Daerah sebagai regulator pelaksanaan investasi sangat penting untuk menyusun regulasi yang dapat menarik investasi;
3. Peraturan daerah ini akan menjadi acuan dalam memberikan kepastian hukum kepada para investor dalam melaksanakan investasi di Kabupaten Luwu Timur.

B. TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal tujuannya antara lain :

1. Untuk menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
2. Untuk menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penanaman Modal sebagai implementasi dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.



C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal pada triwulan I tahun anggaran 2022, dilaksanakan dalam bentuk penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko



E. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan yaitu pada triwulan I (satu) telah tersusun naskah akademik rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penanaman Modal dan pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, sehingga hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir triwulan I (satu) adalah 100 % (seratus persen).
2. Adapun capaian prosentase realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV (empat) yaitu :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Keuangan}}{\text{Target Realisasi Keuangan}} \times 100 \% \\ &= \frac{\text{Rp } 73.000.000,-}{\text{Rp } 166.600.000,-} \times 100 \% \\ &= \mathbf{43,82 \%} \end{aligned}$$

F. KENDALA DAN HAMBATAN

Adapun kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran sesuai anggaran kas triwulan I (satu) yaitu :



**KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMEBRIAN
FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL T.A. 2022**

1. Adanya perubahan jadwal prolegda dari DPRD Kabupaten Luwu Timur, sehingga pembahasan prolegda tahap I yaitu Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko mengalami pergeseran. Hal ini berdampak pada daya serap anggaran perjalanan dinas yang telah dialokasikan pada triwulan I.

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan / pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2022.

Malili, 1 April 2022

Kabid Penanaman Modal/PPTK



AYUB KOMBONG, S.T.,M.Si
NIP. 19750825 200502 1 006



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I

A. LATAR BELAKANG

1. Kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan investasi dilapangan;
2. Pemerintah Daerah sebagai regulator pelaksanaan investasi sangat penting untuk melakukan pemetaan terhadap hambatan – hambatan terhadap pelaksanaan investasi ;
3. Pemerintah Daerah harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi investor.

B. TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal tujuannya antara lain :

1. Untuk mengetahui implelementasi pelaksanaan kebijakan pemberian insentif investasi dilapangan;
2. Melakukan pemetaan terkait permasalahan/kendala yang dihadapim dan harapan dalam rangka pengembangan usahnya;
3. Sebagai bahan masukan dalam melakukan evaluasi dan perumusan kebijakan kemudahan dan insentif investasi di Kabupaten Luwu Timur;



C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan anggaran kas dan target kinerja yang telah ditetapkan, bahwa untuk pelaksanaan kunjungan / evaluasi akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2022.

E. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :



KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL T.A. 2022

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/inentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan pada triwulan I telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan;
2. Adapun capaian prosentase realisasi keuangan sampai dengan triwulan I (satu) yaitu :

$$= \frac{\text{Realisasi Keuangan}}{\text{Target Realisasi Keuangan}} \times 100 \%$$

Rp 11.500.000,-

$$= \frac{\text{Rp 15.400.000,-}}{\text{Rp 15.400.000,-}} \times 100 \%$$

$$= 74,68 \%$$

F. KENDALA DAN HAMBATAN

Adapun kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran sesuai anggaran kas triwulan I (satu) yaitu :

1. Secara umu pelaksanaan kegiatan untuk triwulan I (satu) telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran maka akan pelaksanaan kegiatan pada triwulan II (dua) khususnya pelaksanaan kunjungan lapangan dan rapat evaluasi akan dimaksimalkan pelaksanaannya;
2. Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan akan melibatkan semua bidang lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.

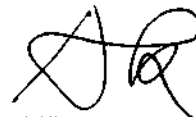


F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/inentif dan kemudahan penanaman modal, sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan / pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2021.

Malili, 1 April 2022

Kabid Penanaman Modal / PPTK



AYUB KOMBONG, S.T.,M.Si

NIP. 19750825 200502 1 006



LAPORAN TRIWULAN PERTAMA KEGIATAN PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memaksimalkan promosi dan meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Luwu Timur, maka dibutuhkan inovasi untuk memberikan informasi kepada calon investor terkait potensi yang dimiliki sebuah Kabupaten. Maka dalam hal ini kegiatan penyediaan dan penyebaran informasi merupakan solusi untuk memberikan gambaran potensi yang dimiliki oleh Kabupaten.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal adalah untuk mempromosikan potensi yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur tahun 2022

Tujuan yang diharapkan dalam kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal adalah untuk memberikan gambaran kepada calon investor terkait potensi dan peluang investasi Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal adalah terpublikasinya potensi dan peluang investasi yang dimiliki Kabupaten.

II. TARGET DAN TUJUAN

2.1 Target Anggaran

Pelaksanaan kegiatan kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2022 dengan Anggaran sebesar Rp 22.638.490.

2.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pada kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal sebesar Rp 4.000.000,- atau sekitar 17.65 %.

2.3 Target kinerja

Target kinerja dari kegiatan penyediaan dan penyebar luasan informasi adalah Terpublikasinya potensi investasi daerah di tiga Media.

2.4 Realisasi Kinerja

Pencapaian realisasi kinerja kegiatan kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal pada Triwulan pertama (1) adalah belum terlaksana dikarenakan kegiatan tersebut direncanakan pada triwulan dua, tiga dan empat.

III. CAPAIAN

3.1 Capaian

Capaian Anggaran kegiatan kegiatan penyediaan dan penyebar luasan informasi adalah 17.65 % dan capaian Kinerja triwulan pertama adalah 0 % .

Malili, 07 April 2022

PPTK



Ayuh Kombong

Nip.19830528 200502 1 006

LAPORAN TRIWULAN I KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memaksimalkan promosi dan meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Luwu Timur, maka dibutuhkan penyajian data yang akurat dan terbaru. Sehingga dibutuhkan untuk melakukan kegiatan promosi investasi ke calon investor agar potensi yang dimiliki suatu kabupaten dapat dilihat dan diketahui.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah untuk mempromosikan potensi yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur tahun 2022.

Tujuan yang diharapkan dalam Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah untuk memberikan gambaran kepada calon investor terkait potensi dan peluang investasi Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah terlaksananya keikutsertaan dalam kegiatan pameran investasi tahun anggaran 2022.

II. TARGET DAN TUJUAN

2.1 Target Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPSTSP Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2022 dengan Anggaran sebesar **Rp.165.805.990,-**

Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pada kegiatan Promosi Penanaman Modal sebesar **Rp 20.000.000,-** atau sekitar **12.01 %** dan sisanya **Rp.165.805.990,-**

2.2 Target kinerja

Target kinerja dari Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah keikutsertaan pada satu event pameran.

2.3 Realisasi Kinerja

Pencapaian realisasi kinerja kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah pada Triwulan pertama (1) adalah belum terlaksana dikarenakan kegiatan pameran yang akan diikuti akan diselenggarakan pada triwulan ke dua dan empat.

III. CAPAIAN

3.1 Capaian

Capaian Anggaran kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah 12.01 % dan capaian Kinerja pada triwulan tiga adalah 0 % dikarenakan Kegiatan direncanakan pada Triwulan Dua dan Ketiga.

Malili, 20 Mei 2022

PPTK



Ayub Kombong

Nip.19830528 200502 1 006

LAPORAN TRIWULAN I
BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu dan satu tempat. Dimana fungsi utamanya adalah melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal dengan sasaran terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional, berintegritas dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 penyelenggaraan PTSP bertujuan :

- Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
- Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima.
- Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah pelayanan perizinan, mempersingkat birokrasi dan mewujudkan komitmen DPMPSTSP Kabupaten Luwu Timur dengan memberikan pelayanan perizinan yang prima yaitu pemberian pelayanan yang sederhana, cepat, mudah,

murah dan transparan melalui pelayanan online, pelayanan langsung ke masyarakat maupun pelayanan offline dalam kantor.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Keputusan kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Nomor 01/I/Tahun 2022 tanggal 01 Januari 2022 tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, maka diperjanjikan 2 Program, 2 Kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 286.870.777,00.
 2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 20.320.330,00.

2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :
 1. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebesar Rp. 29.999.850,00.

BAB III

REALISASI KINERJA

Berdasarkan Evaluasi atas Rencana Aksi pada Triwulan I Tahun Anggaran Tahun 2022 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Target yang ditetapkan 72%, terealisasi 94,57% dengan capaian kinerja 79,95%

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	89,14	Sangat Baik

2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100	Buruk
Jumlah		189,14	
Realisasi Program		= 189,14/2 = 94,57%	Sangat Baik

Realisasi Program ini dihitung dengan formulasi :

- $\frac{\text{Jumlah total capaian Kegiatan} \times 100}{\text{Jumlah Sub kegiatan yang mendukung Kegiatan}}$

Capaian realisasi Program Pelayanan Penanaman Modal 86,75% dari target 72 %

Jumlah Pendaftaran izin = 1.252

Jumlah penyelesaian izin tepat waktu = 1.001

Rata-rata jumlah penyelesaian izin tepat waktu = 79,95%, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa izin yang belum terbit rekomendasi dan masih ada beberapa izin yang terlambat dicetak dikarenakan aplikasi maintenance.

Untuk capaian kinerja Kegiatan dihitung dengan formulasi :

$\frac{\text{Jumlah izin yang terbit} \times 100}{\text{Jumlah permohonan izin.}}$

Capaian kinerja program Pelayanan Penanaman Modal 79,95 % dari target 72%, hal tersebut disebabkan adanya izin yang belum selesai dikarenakan belum ada rekomendasi dari tim teknis.

- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah kabupaten/Kota dan target yang ditetapkan 100%, terealisasi 100 % dengan capaian kinerja 100%

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	1	Buruk
Jumlah		1	
Realisasi Program		= 100	Buruk

Realisasi Kegiatan ini dihitung dengan formulasi :

- $\frac{\text{Jumlah total capaian Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub kegiatan yang mendukung Kegiatan}} \times 100$

Capaian realisasi Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Penanaman Modal 100% dari target 100%

Untuk capaian kinerja Kegiatan dihitung dengan formulasi :

$\frac{\text{Jumlah dokumen yang tersedia}}{\text{Jumlah dokumen yang ditargetkan}} \times 100$

Capaian kinerja Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Penanaman Modal 100 % dari target 100%.

BAB IV

REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal dengan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota disajikan pada tabel berikut :

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	307.191.107	38.744.000	268.447.107
2.	Penyediaan Publikasi Perizinan	29.999.850	0	29.999.850
Jumlah		337.190.957	0	298.446.957
Capaian Realisasi Keuangan			0 %	

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan kegiatan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota disajikan pada tabel berikut :

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	Pengembangan sistem, data dan informasi perizinan	29.999.850	0	29.999.850
Jumlah		29.999.850	0	29.999.850
Capaian Realisasi Keuangan			0 %	

BAB V

PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut :

PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
Pelayanan Penanaman Modal	94,57%	0%
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	0%

Capaian realisasi kinerja belum mencapai target melebihi dari target karena adanya permohonan izin yang meningkat, sementara capaian realisasi keuangan masih Nihil karena belum adanya spj yang terbayarkan.

Malili, 11 April 2022

Kepada Bidang PTSP

Andi Rajuni, SE
NIP. 19820630 201001 2

**LAPORAN INTERNAL TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BIDANG PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PENGAWASAN
PENANAMAN MODAL**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, rencana tersebut biasanya dituangkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Program yang dilaksanakan dan telah di jabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan ini telah dilaksanakan namun masih banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut baik kendala teknis maupun kendala regulasi belum memadai. Untuk mendapatkan nilai yang maksimal perlu penekanan pelaksana sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip *good governance*, yang sejalan dengan Tugas Pokok Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan, pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, yaitu mmengendalikan, mengawasi, membina, mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengawasan Penanaman Modal.

Dengan tersusunnya laporan realisasi kegiatan pada Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dibidang penanaman modal.

Untuk Tahun 2022, Dinas PM dan PTSP mendapatkan DAK Non Fisik Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi / BKPM RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal T.A 2022 sebesar 417. 092. 000

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan perjanjian kinerja Bidang Pengendalian, pengawasan dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, maka diperjanjikan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten 3 Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu

1. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan dengan anggaran **Rp. 102.921.550 dengan target 8 Kegiatan Usaha**
2. Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran **Rp. 215.381.761 dengan target 217 pelaku usaha**
3. Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal dengan Anggaran **Rp. 98.788.490 Target 14 Kegiatan Usaha**

BAB III

REALISASI KINERJA

Berdasarkan Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan I Tahun Anggaran Perubahan Tahun 2022 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan dengan anggaran **Rp. 102.921.550 dengan target 8 Kegiatan Usaha**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi kegiatan usaha PMDM dan UKM yang di pantau}}{\text{Target yang di pantau}} \times 100\% \\
 &= \frac{2 \text{ Kegiatan Usaha}}{2 \text{ Kegiatan Usaha}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

2. Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran **Rp. 215.381.761 dengan target 217 pelaku usaha**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi Pelaku Usaha Yang mengikuti sosialisasi/BIMTEK}}{\text{Target Pelaku Usaha untuk ikut sosialisasi/BIMTEK}} \times 100\% \\
 &= \frac{60 \text{ Pelaku Usaha}}{60 \text{ Pelaku Usaha}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

3. Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal dengan Anggaran **Rp. 98.788.490 Target 14 Kegiatan Usaha**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi kegiatan usaha PMDM dan UKM yang di Awasi}}{\text{Target yang di Awasi}} \times 100\% \\
 &4 \text{ Kegiatan Usaha}
 \end{aligned}$$

BAB IV

REALISASI KEUANGAN

Berdasarkan Evaluasi atas Rencana Aksi Pada Triwulan I Tahun Anggaran
Perubahan Tahun 2022:

N0	Program	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
1	Progran pengendalian pelaksanaan penanaman modal pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota	417.091.801	106. 274. 400	310. 817. 401
J U M L A H		417.091.801	106. 274. 400	310. 817. 401
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN		25. 48%		

BAB V

PENUTUP

Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan pada program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
100 %	25. 48%

Malili, 11 April 2022

Kepala Bidang



SAENAB SAMARING, S.KOM
Nip. 197501172006042016

PENUTUP

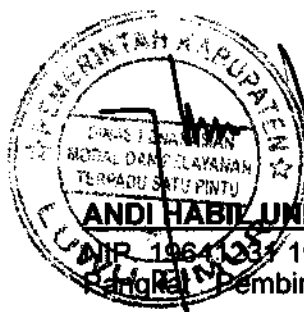
Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur triwulan I Tahun 2022.

Rata-rata persentase pencapaian pengukuran indikator kinerja sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur adalah 62,45 %. DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur mendapatkan alokasi anggaran pada triwulan I tahun 2022 sebesar Rp. 1.321.175.433,-, terealisasi sebesar Rp. 483.898.034,- atau 36,63%. Hasil evaluasi capaian kinerja ini penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan selanjutnya.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Triwulan I Tahun 2022 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

Malili, 7 April 2022
KEPALA DINAS,



ANDI HABIL UNRU, SE
NIP. 19641231 198703 1 208
Rangkal Pembina Tk.I



LAPORAN KINERJA TW.II TAHUN 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TIMUR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan ridho- Nya Laporan Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan II Tahun 2022 ini dapat selesai. Laporan Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan II Tahun 2022 merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan dan terkompilasi dari lingkup Sekretariat, Bidang, Kasubag/ Seksi.

Laporan Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan II Tahun 2022 ini berisi informasi kinerja pelayanan dan non pelayanan yang telah dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Diharapkan Laporan Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan II Tahun 2022 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat.

Kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga Laporan Triwulan II Tahun 2022 dapat memberikan manfaat yang sebagaimana mestinya.

Malili, 12 Juli 2022



ANDI HABIL UNRU, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 198703 1 208

DAFTAR ISI

Perihal	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	
2.1 Tujuan	5
2.2 Ruang Lingkup	8
BAB III PERJANJIAN KINERJA	
BAB IV REALISASI KINERJA	
3.1 Eselon III	13
BAB V REALISASI KEUANGAN	
BAB VI PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui kegiatan evaluasi ini maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui.

Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian sosial untuk secara sistematis menginvestigasi efektifitas program/menilai kontribusi program terhadap perubahan (goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi). Konsep Dasar Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu atau setelah suatu kegiatan telah berlalu.

Mencakup antara lain :

- a. Penilaian atas dampak kolektif — baik positif maupun negatif — dari semua (atau sebagian besar) kegiatan yang telah dilakukan, pada lokasi dan/atau kelompok sasaran yang berbeda-beda.
- b. Deskripsi keluaran dan hasil/manfaat sebagaimana dilihat dari sudut pandang penerima manfaat.

Jenis Evaluasi Tergantung keperluan dilakukan pada titik-titik berbeda dalam siklus program/proyek. Ada evaluasi proses yang berfokus pada mutu penyampaian pelayanan, ada evaluasi biaya-manfaat dan ada evaluasi dampak. Evaluasi formatif dilakukan pada waktu program/kegiatan berjalan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada saat program/kegiatan sudah berakhir, dengan tujuan untuk mengukur dampak serta menghimpun pelajaran/pengalaman yang berguna. Terdapat dua jenis evaluasi yang perlu kita pertimbangkan :

1. Evaluasi atas Proses.

Evaluasi atas proses, jenis evaluasi ini berfokus pada apa yang telah dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang menjadi penerima manfaat, serta apa respons

mereka terhadap kegiatan program. Jenis evaluasi ini didasarkan pada laporan-laporan monitoring dan penelaahan. atas dokumen-dokumen program, wawancara serta kunjungan lapangan. Jenis evaluasi ini relatif lebih mudah dilakukan dan sangat berguna bila laporan atau umpan balik dari lapangan menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan, pengeluaran biaya yang melampaui anggaran dan ada keluhan dari penerima manfaat atau persoalan dalam pengelolaan program.

Oleh karena itu Evaluasi Internal pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu sangat diperlukan guna memonitor dan mengevaluasi kegiatan yang ada sehingga diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan maupun kebijakan di tahun-tahun yang akan datang.

2. Evaluasi Dampak

Evaluasi dampak, jenis evaluasi ini berusaha mengungkapkan siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya; dengan kata lain, sejauh mana hasil/manfaat (dan dampak) yang diharapkan telah tercapai. Jenis evaluasi ini bisa saja cukup mahal bila kelompok sasaran besar sekali atau bila kita harus membuat perbandingan dengan kelompok-kelompok masyarakat di luar program. Evaluasi harus dirancang sesuai dengan sumber daya yang kita miliki sehingga kita mengetahui sejauh mana program telah menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan status kesehatan atau pendidikan, atau manfaat lain bagi wilayah atau kelompok masyarakat sasaran. Kedua jenis evaluasi itu, perlu dibuat penilaian kembali berdasarkan asumsi dasar dan rancangan program (suatu hal yang relatif tidak sering dilakukan). Faktanya adalah bahwa banyak program/kegiatan (dan kebijakan) gagal mencapai hasil yang diinginkan karena asumsi-asumsi dasar dan rancangan program itu sendiri tidak benar.

BAB III

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki target kinerja dan anggaran maka Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 6 Program dan 15 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang dituangkan pada perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV sebagai berikut :

Tabel. 1. PERJANJIAN KINERJA ESELON III

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja
SEKRETARIAT				
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran (persen)	3.376.376.433	100 %
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu (dokumen)	69.294.735	17
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (persen)	2.646.150.513	100 %
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan (persen)	16.781.981	100 %
4.	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah	10.623.710	2.500.000.000

Daerah	(rupiah)			
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)	82.615.956	100 %	
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (persen)	307.938.550	100 %	
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)	10.168.750	2	
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (persen)	152.889.438	100 %	
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (unit)	79.912.000	57	

KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN	450.076.460	33	
1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMA/PMDN yang terfasilitasi (Persen)	278.541.420	100 %	
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/Kota	Persentase jenis potensi yang disusun dalam peta potensi Kabupaten (persen)	171.535.040	100 %	
III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA dan PMDN (Rupiah)	188.444.480	3,3 Triliun	
1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan	188.444.480	5	

Daerah Kabupaten/Kota

KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IV.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai SOP (persen)	307.191.107	72 %
1.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu (Persen)	307.191.107	100 %
V.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola (Persen)	29.999.850	100 %
2.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid	29.999.850	1

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN

VI.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait Penanaman Modal (Persen)	417.091.801	75 %
1.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM (Persen)	417.091.801	95 %

BAB IV

REALISASI KINERJA

Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan II Tahun 2022 dilaksanakan secara berjenjang yang dilakukan Kepala Dinas (Eselon II) ke Sekretaris dan Kepala bidang (Eselon III) kemudian Eselon III mengevaluasi setiap Kasubag dan Kasie dilingkup bidang masing-masing.

Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan II Tahun 2022 Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut :

4.1 EVALUASI YANG DILAKUKAN KEPALA DINAS (ESELON II) KE SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG (ESELON III)

A. SEKRETARIS

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan untuk sekretaris dinas ada 1 Program yang dilakukan pada triwulan ke II dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase rata- rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran (persen). Target yang ditetapkan pada triwulan I sebesar 25 % terealisasi 20 % dengan capaian kinerja secara keseluruhan dari TW I, TW II ,TW III dan TW IV sebesar 100 % dengan rincian capaian :

No	Kegiatan	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Sangat Baik
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	96 %	Sangat Baik
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	Sangat Baik
4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	35.807.762	buruk

5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Sangat Baik
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	88 %	Baik
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 %	Buruk
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Sangat Baik

Capaian kinerja program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80 %, dari target 100 %. Hal tersebut disebabkan karena adanya kegiatan yang realisasinya rendah, yaitu Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

B. KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

Hasil evaluasi yang dilakukan untuk Kepala Bidang Penanaman Modal ada 2 Program yang dilakukan pada triwulan ke II dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator kinerja pada program ini adalah Jumlah Investor PMA dan PMDN. Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu sebanyak 7 Investor dan terealisasi sebanyak 9 Investor dengan capaian kinerja 75 %.

2. Program Promosi Penanaman Modal.

Indikator kinerja pada program ini adalah Jumlah realisasi PMA dan PMDN . Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu Rp 825.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 772.092.734.631,- dengan capaian kinerja 93,58 %.

C. KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Hasil evaluasi yang dilakukan untuk Kepala Bidang Pelayanan terpadu Satu Pintu ada 2 Program yang dilakukan pada triwulan ke II dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Ketepatan Waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP. Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu sebanyak 72 % dan terealisasi sebanyak 63,07 % dengan capaian kinerja 87,60 %.

2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Indikator kinerja pada program ini adalah Jumlah Jumlah Database penanaman Modal yang valid . Target yang ditetapkan pada triwulan II tidak ada. Target kinerja dihitung pada akhir Tahun (Tw.4) karena berupa Dokumen.

D. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN

Hasil evaluasi yang dilakukan untuk Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan ada 1 Program yang dilakukan pada triwulan ke II dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Pelaku Usaha yang Taat terhadap Peraturan yang terkait Penanaman Modal. Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu sebanyak 20 % dan terealisasi sebanyak 20 % dengan capaian kinerja 100 %.

BAB V**REALISASI KEUANGAN**

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan lingkup Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Pada Triwulan II disajikan pada Tabel berikut :

REALISASI KEUANGAN SAMPAI TW.2**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2022**

No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN 2 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 Juni 2021	SELISIH
				(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.376.376.433,00	2.470.335.516,00	1.428.323.870,00	1.042.011.646,00
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.294.735,00	41.014.860,00	26.795.000,00	14.219.860,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.748.010,00	23.460.000,00	18.210.000,00	5.250.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.414.860,00	2.374.860,00	0,00	2.374.860,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.162.965,00	2.700.000,00	800.000,00	1.900.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.968.900,00	12.480.000,00	7.785.000,00	4.695.000,00
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.646.150.513,00	2.081.294.772,00	1.142.151.635,00	939.143.137,00
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.549.118.503,00	2.039.294.772,00	1.109.261.635,00	930.033.137,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	97.032.010,00	42.000.000,00	32.890.000,00	9.110.000,00
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.781.981,00	5.860.000,00	3.750.000,00	2.110.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.781.981,00	5.860.000,00	3.750.000,00	2.110.000,00
04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.623.710,00	5.510.000,00	3.850.000,00	1.660.000,00

	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.623.710,00	5.510.000,00	3.850.000,00	1.660.000,00
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.615.956,00	45.420.000,00	26.845.000,00	18.575.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.985.956,00	9.420.000,00	3.440.000,00	5.980.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	69.630.000,00	36.000.000,00	23.405.000,00	12.595.000,00
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.938.550,00	170.249.400,00	135.620.100,00	34.629.300,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.832.250,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.784.600,00	2.784.600,00	0,00	2.784.600,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.710.700,00	3.856.000,00	1.826.000,00	2.030.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.675.000,00	6.800.000,00	3.450.000,00	3.350.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.120.000,00	3.060.000,00	2.900.000,00	160.000,00
07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.816.000,00	142.748.800,00	124.944.100,00	17.804.700,00
08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.168.750,00	10.168.750,00	0,00	10.168.750,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.168.750,00	3.168.750,00	0,00	3.168.750,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.889.438,00	76.704.934,00	62.319.135,00	14.385.799,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.879.570,00	11.700.000,00	7.600.000,00	4.100.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.009.868,00	29.004.934,00	24.719.135,00	4.285.799,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00	36.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.912.800,00	34.112.800,00	26.993.000,00	7.119.800,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.650.000,00	12.000.000,00	11.615.000,00	385.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.150.000,00	9.000.000,00	2.270.000,00	6.730.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.112.800,00	13.112.800,00	13.108.000,00	4.800,00

B.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	450.076.460,00	438.456.460,00	155.498.251,00	282.958.209,00
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	278.541.420,00	266.921.420,00	147.548.251,00	119.373.169,00
1.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	231.407.130,00	231.407.130,00	122.941.400,00	108.465.730,00
2.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	47.134.290,00	35.514.290,00	24.606.851,00	10.907.439,00
	Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/Kota	171.535.040,00	171.535.040,00	7.950.000,00	163.585.040,00
1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	171.535.040,00	171.535.040,00	7.950.000,00	163.585.040,00
C.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	188.444.480,00	97.351.980,00	25.262.000,00	72.089.980,00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	188.444.480,00	97.351.980,00	25.262.000,00	72.089.980,00
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	22.638.490,00	12.765.990,00	6.620.000,00	6.145.990,00
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	165.805.990,00	84.585.990,00	18.642.000,00	65.943.990,00
D.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	307.191.107,00	206.891.152,00	155.850.080,00	51.241.072,00
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	307.191.107,00	206.891.152,00	155.850.080,00	51.241.072,00
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	286.870.777,00	188.345.822,00	148.802.000,00	39.543.822,00
2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.320.330,00	18.545.330,00	6.848.080,00	11.697.250,00
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	417.091.801,00	256.557.388,00	158.223.400,00	98.333.988,00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	417.091.801,00	256.557.388,00	158.223.400,00	98.333.988,00
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	102.921.550,00	77.716.200,00	17.830.000,00	59.886.200,00
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	215.381.761,00	108.732.001,00	83.628.000,00	25.104.001,00

3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	98.788.490,00	70.109.187,00	56.765.400,00	13.343.787,00
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	29.999.850,00	21.329.180,00	2.950.337,00	18.378.843,00
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.999.850,00	21.329.180,00	2.950.337,00	18.378.843,00
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	29.999.850,00	21.329.180,00	2.950.337,00	18.378.843,00
TOTAL BELANJA		4.769.180.131,00	3.490.921.676,00	1.925.907.938,00	1.565.013.738,00

ptsp

Tabel 3.8
Laporan Kinerja Pencapaian Sasaran Kinerja Instansi
Pencapaian Sasaran Kinerja Instansi Triwulan II Tahun 2022

Kode	Usan/ Bidang Jusani/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targel Kinerja dan anggaran Rerja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Rerja PD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Rerja PD yang dievaluasi Tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV					
					7	8	9	10	11	12	13=12x100%					
2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai Standar	100	3.378.376.433	512.314,7 7	416.306.634										
2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	17	68.294.735	3	5.195.000	4	21.600.000					7	28.795.000	41,18%	38,67%
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3	33.748.610	1	4.385.000	1	13.815.000					2	18.210.000	66,67%	53,98%
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2	3.414.860	-	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2	4.162.965	-	600.000		-					1	800.000	50,00%	19,22%
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10	27.968.900	1	-	2	7.785.000					3	7.785.000	30,00%	27,63%
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,04%	38,67%

ptsp

				89.294.735	Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah
2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100	2.646.150.513	21,50	264.619.793	22,00	857.531.842					89	1.142.151.635	69,23%	43,16%
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	21	2.549.118.503	20	273.819.793	20	835.441.842					20	1.109.261.635	95,24%	43,52%
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18	97.032.610	3	10.800.000	4	22.090.000					7	32.890.000	38,89%	33,90%
				2.646.150.513	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										93,17%	43,16%
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	100	16.781.961	25	-	25	3.750.000					50	3.750.000	50,0%	22,35%
06	Pencatatan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pencatatan dan pengelolaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4	16.781.961	1	0,00	1	3.750.000					2	3.750.000	50,00%	22,36%
				16.781.961	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,00%	22,36%
					Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
2,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah	2.500.000.000	10.623.710	4.610.660	-	31.197.102	3.850.000					35.897.762	3.850.000	1,43%	36,24%
07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu	4	10.623.710	1	-	1	3.850.000					1	3.850.000	25,00%	36,24%
				10.623.710	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										25,00%	36,24%
					Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah

[illegible]

[illegible]

ptsp

02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bukaan jasa komunikasi, SDIA dan listrik yang terbayarkan	60	58.009.888	15	12.810.941	15	11.908.194	30	24.719.135	50,30%	42,61%
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum	4	72.000.000	4	12.000.000	4	18.000.000	4	30.000.000	100,30%	41,67%
				152.889.438	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						73,55%	40,76%
					Predikat Kinerja						Sedang	Sangat Rendah
2,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	57	79.912.806	8,00	7.220.000	17,00	19.773.000	25	26.993.000	43,86%	33,78%
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9	45.850.000	3	5.600.000	8	6.015.000	9	11.615.000	100,00%	26,44%
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47	21.150.000	5	1.520.000	10	350.000	15	2.270.000	31,91%	10,73%
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1,00	13.112.800	-	-	1	13.108.000	1	13.108.000	100,00%	99,96%
				79.912.806	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						81,93%	33,78%
					Predikat Kinerja						Tinggi	Sangat Rendah
1.02.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	33	450.076.460	9	10.650.000			25	155.488.251	75,76%	34,55%
2,01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMA/PMDN yang terfasilitasi	100	278.541.420		10.650.000		136.898.251	25	147.548.251	25,00%	52,97%
01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda PM yang terbit	2	231.407.130	-	0,00	-	122.941.400	0	122.941.400	0,00%	53,13%

ptsp

02	Evaluasi pelaksanaan fasilitasi / insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif PM yang dihasilkan	2	47.134.290	1	10.650.000,00	1	13.956.851	2	24.606.851	100,00%	52,21%		
	Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/kota	Persentase jenis potensi yang disusun dalam peta potensi Kabupaten		171.535.040				7.950.000		7.950.000	0,00%	4,63%		
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi dan peluang usaha di Kabupaten/Kota	2	171.535.040				7.950.000	0	7.950.000	0,00%	4,63%		
				490.076.460							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	10,47%	34,55%	
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.02.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA dan PMDN	3,3E+12	188.444.480	772.092.734.631					772.092.734.631	25.262.000	23,40%	13,41%	
2.01	Pengembangan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan	5	188.444.480							25.262.000	0,00%	13,41%	
01	Penyusunan Strategi promosi penanaman modal	Jumlah Media Strategi Promosi Penanaman Modal yang dibuat	3	22.638.490			1	6.620.000		6.620.000	0,00%	29,24%		
02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah/kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal yang diikuti/dilaksanakan	2	165.805.990	1,00		1	18.642.000		1,00	18.642.000	50,00%	11,24%	
				188.444.480								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	43,99%	13,41%
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai SOP	72,00	307.191.107	15	36.744.400	20			35	155.650.080	46,61%	50,67%	
2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu	100,00	307.191.107	25	36.744.400	25	116.905.680		50	155.650.080	50,00%	50,67%	

[illegible]

ptsp

	Penanaman Modal															
03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi	14	98.788.490	1	15.077.000	3	41.688.400			4	56.765.400	28,57%	57,46%		
				417.091.801									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		32,59%	37,93%
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola	100	29.999.850							50	2.950.337	50,00%	9,83%		
2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data dan informasi Perizinan dan nonperizinan	100	29.999.850			50	2.950.337			50	2.950.337	50,00%	9,83%		
01	Pengolahan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data yang disediakan	2	29.999.850			1	2.950.337			1	2.950.337	50,00%	9,83%		
				29.999.860									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	9,83%
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah
			4.769.180.131,00				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						70,95%	40,37%		
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						Sedang	Sangat Rendah		

BAB VI

PENUTUP

Dalam rangka mensukseskan pembangunan di bidang Penanaman Modal Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2022, maka Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan berbagai upaya secara intensif untuk melakukan pengawasan melalui evaluasi terhadap kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan evaluasi ini mutlak diperlukan untuk mengawal pengelolaan anggaran yang profesional sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan capaian realisasi kinerja dan realisasi capaian keuangan maka diusulkan/direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat banyak Sub. kegiatan yang realisasi anggarannya diatas 90 % hal ini disebabkan oleh :
 - Sudah berjalannya pemantauan dan monitoring realisasi keuangan dan pencapaian target kinerja.
 - Sudah terbitnya SK TPP dan SK upah jasa sudah diberlakukan selama 1 tahun sehingga pembayaran tunjangan dan gaji upah jasa bias berjalan sesuai dengan waktu penetapan rencana kas.
 - Sudah berjalannya koordinasi pada masing-masing PPTK kegiatan.
2. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari 2 program yaitu pengembangan iklim penanaman modal dan Program Penyelenggaraan promosi penanaman modal. Pada Tw.II program pengembangan iklim penanaman modal terealisasi penambahan nilai investasi sebanyak Rp 753.221.100.408,- yang terdiri dari nilai investasi PMA sebesar Rp 90.854.504.523,- dan PMDN sebesar Rp 662.366.595.885,- atau tercapai realisasi kinerja sebesar 104,8%. Pada Tw.II program Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dilaksanakan 1 kali pameran pada tanggal 4 – 7 Juni 2022 dihotel Four point

Shaeraton Makasar. Pencapaian Target kinerja program penanaman modal disebabkan oleh telah maksimalnya penerapan pelayanan secara elektronik (on line Single Submission) sehingga dapat memudahkan para calon investor untuk melakukan pengurusan perizinan secara online dan pelaku usaha telah aktif dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

3. Bidang pelayanan terpadu Satu Pintu, terdiri dari 2 program yaitu Pelayanan Penanaman Modal dan Program pengelolaan data dan system informasi penanaman Modal. Pada Tw.II program pelayanan penanaman modal persentase jumlah izin yang diselesaikan tepat waktu hanya sebesar 67,03% dari target 72%, atau sebesar 87,60%, hal ini disebabkan karena adanya rekomendasi yang belum diterbitkan oleh SKPD teknis sehingga izin tidak dapat diterbitkan oleh DPMPTSP. Pada program Pengelolaan data dan system informasi penanaman modal, capaian kinerjanya belum bisa dihitung karena berupa Dokumen pada akhir tahun.
4. Bidang Pengendalian pengawasan dan Pengaduan Penanaman Modal, terdiri dari 1 program yaitu program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Target kinerja pada TW.II Persentase Pelaku Usaha yang Taat terhadap Peraturan yang terkait Penanaman Modal dengan target sebesar 20% tercapai 20% atau sebesar 100%. Adapun sumber anggaran dari Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik yang terdiri dari kegiatan pembinaan kepada pelaku Usaha berupa Bimtek, Pengawasan kepada pelaku usaha dan Pemantauan kepada izin-izin UKM dan Pelaku Usaha.

Diharapkan dengan disusunnya Evaluasi internal triwulan II ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur ini berpengaruh terhadap ketepatan keputusan yang akan diambil serta perencanaan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Luwu Timur akan semakin lebih baik di tahun – tahun yang akan datang.

P E N U T U P

Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan II Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur triwulan II Tahun 2022.

Rata-rata persentase pencapaian pengukuran indikator kinerja sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur adalah 70,95 %. DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur mendapatkan alokasi anggaran pada triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 3.490.921.676,00,-, terealisasi sebesar Rp. 1.925.907.938,00,- atau 40,38%. Hasil evaluasi capaian kinerja ini penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan selanjutnya.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun 2022 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

Malili, 12 Juli 2022



ANDHABIL UNBU, SE

NIP. 19641231 198703 1 208

Pangkat : Pembina Tk.I

LAPORAN TRIWULAN II

SEKRETARIAT



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui kegiatan evaluasi ini maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui.

Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian social untuk secara sistematis menginvestigasi efektifitas program/menilai kontribusi program terhadap perubahan (goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi). Konsep Dasar Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu atau setelah suatu kegiatan telah berlalu. Mencakup antara lain:

- a. Penilaian atas dampak kolektif - baik positif maupun negatif – dari semua (atau sebagian besar) kegiatan yang telah dilakukan, pada lokasi dan/atau kelompok sasaran yang berbeda-beda.
- b. Deskripsi keluaran dan hasil/manfaat sebagaimana dilihat dari sudut pandang penerima manfaat.

Jenis Evaluasi Tergantung keperluan dilakukan pada titik-titik berbeda dalam siklus program/proyek. Ada evaluasi proses yang berfokus pada mutu penyampaian pelayanan, ada evaluasi biaya-manfaat dan ada evaluasi dampak. Evaluasi formatif dilakukan pada waktu program/kegiatan berjalan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada saat program/kegiatan sudah berakhir, dengan tujuan untuk mengukur dampak serta menghimpun pelajaran/pengalaman yang berguna. Terdapat dua jenis evaluasi yang perlu kita pertimbangkan :

(1) Evaluasi atas Proses.

Evaluasi atas proses, jenis evaluasi ini berfokus pada apa yang telah dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang menjadi penerima manfaat, serta apa respons mereka

terhadap kegiatan program. Jenis evaluasi ini didasarkan pada laporan-laporan monitoring dan penelaahan. Atas dokumen-dokumen program, wawancara serta kunjungan lapangan. Jenis evaluasi ini relative lebih mudah dilakukan dan sangat berguna bila laporan atau umpan balik dari lapangan menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan, pengeluaran biaya yang melampaui anggaran dan ada keluhan dari penerima manfaat atau persoalan dalam pengelolaan program.

Oleh karena itu Evaluasi Internal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat diperlukan guna memonitor dan mengevaluasi kegiatan yang ada sehingga diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan maupun kebijakan di tahun-tahun yang akan datang.

(2). Evaluasi Dampak.

Evaluasi dampak, jenis evaluasi ini berusaha mengungkapkan siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya; dengan kata lain, sejauh mana hasil/manfaat (dan dampak) yang diharapkan telah tercapai. Jenis evaluasi ini bisa saja cukup mahal bila kelompok sasaran besar sekali atau bila kita harus membuat perbandingan dengan kelompok-kelompok masyarakat di luar program. Evaluasi harus dirancang sesuai dengan sumberdaya yang kita miliki sehingga kita mengetahui sejauh mana program telah menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan status kesehatan atau pendidikan, atau manfaat lain bagi wilayah atau kelompok masyarakat sasaran. Kedua jenis evaluasi itu, perlu dibuat penilaian kembali berdasarkan asumsi dasar dan rancangan program (suatu hal yang relative tidak sering dilakukan). Faktanya adalah bahwa banyak program/kegiatan (dan kebijakan) gagal mencapai hasil yang diinginkan karena asumsi-asumsi dasar dan rancangan program itu sendiri tidak benar.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

II.1. Tujuan

- a. Tersajinya gambaran kegiatan yang telah dilakukan di Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBD. Dalam bentuk data dan informasi pada periode tertentu setiap triwulan.
- b. Diperolehnya gambaran situasi kegiatan yang telah dilakukan di Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan oleh masing- masing satuan kerja
- c. Tersedianya data dan informasi untuk bahan menentukan kebijakan.

II.2. Ruang Lingkup

- Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan dalam bentuk rapat. Materi yang dibahas capaian realisasi keuangan dan kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam perjanjian kinerja.

BAB III

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Bagian Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami pergeseran/perubahan target kinerja dan anggaran maka Sekretariat melaksanakan 1 Program dan 9 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang dituangkan pada perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV sebagai berikut :

Tabel. 1. PERJANJIAN KINERJA ESELON III

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET ANGGARAN	TARGET KINERJA
1		2	3	4
PROGRAM PENUNJANG				
1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran (persen)	2.470.335.516	25 %
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu (dok)	41.014.860	2
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (persen)	2.081.294.772	25 %
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan (%)	5.860.000	25 %

4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah (rupiah)	5.510.000	375 Juta
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (Persen)	45.420.000	25 %
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (persen)	170.249.400	25 %
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)	10.168.750	2 Paket
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (persen)	76.704.934	25 %
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (unit)	34.112.800	23

Tabel. 2. PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	TARGET KINERJA
1		2	3	4
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan (orang)	704.901.923	21 Orang
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	20.250.000	3 Dokumen

3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2.550.000	1 Dokumen
4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	2.610.000	1 Dokumen
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	0	3 Jenis
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang diadakan	0	0
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga Yang diadakan	0	0
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan (jenis)	2.256.000	2 Jenis
9	Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3.400.000	4 Jenis
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1.530.000	15 Exemplar
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	3.000.000	30 Orang
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (unit)	0	0
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0	0
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	5.000.000	100 Surat

15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	14.502.467	15 Rekening
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	18.000.000	4 Orang
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	12.000.000	9 Unit
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	3.000.000	5 Unit
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi (unit)	0	0
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen)	11.880.000	1 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	0,00	1 Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2.000.000	0 Dokumen
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	2.900.000	1 Dokumen
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	11.000.000	3 Orang

6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	1.400.000	4 Dokumen
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu)	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang)	83.022.400	30 orang

BAB IV

REALISASI KINERJA

Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan II Tahun 2022 dilaksanakan secara berjenjang yang dilakukan Kepala Dinas (Eselon II) ke Sekretaris (Eselon III) kemudian Eselon III mengevaluasi setiap Kasubag dibagian Sekretariat lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan II Tahun 2022 bagian Sekretariat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

IV.1 EVALUASI YANG DILAKUKAN SEKRETARIS DINAS (ESELON III) KE KASUBAG (ESELON IV)

Hasil Evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan pada triwulan ke II dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan ada 19 Sub kegiatan sebagai berikut :

1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan (orang), Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 21 Orang realisasi 20 Orang dengan capaian kinerja 95 %, karena 1 orang pegawai dimutasi ke Kesbangpol.

1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 1 Dokumen realisasi 1

1.3. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 1 dokumen realisasi 1 dokumen dengan capaian kinerja 100 %.

1.4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 1 Dokumen, terealisasi 1 Dokumen ,dengan capaian kinerja 100%.

1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis), Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 3 Jenis, terealisasi 3 Jenis, yaitu belanja penggantian Bahlam lampu 19 W, Kabel Colokan 35 M dengan capaian kinerja 100 %.

1.6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan (jenis), Target kegiatan pada Triwulan II sebanyak 2 paket tetapi pengadaannya digeser ke TW.3.

1.7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan rumah tangga yang diadakan (jenis), Target kegiatan direncanakan pada Triwulan II tetapi pengadaannya digeser ke TW.3.

1.8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan (jenis) Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 3 Jenis, terealisasi 3 Jenis, dengan capaian kinerja 100 %.

1.9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis), Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 4 Jenis, terealisasi 4 Jenis antara lain cetak spanduk, jilid, fotocopy dan cetak stempel, dengan capaian kinerja 100 %.

1.10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar) Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 15 exemplar, terealisasi 15 exemplar, Jenis bacaan yang diadakan yaitu Koran Palopo Pos, Tribun Timur, dan Upeks, Kompas, Radar dengan capaian kinerja 100 %.

1.11. Fasilitas Kunjungan Tamu.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang) Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 30 Orang, terealisasi 15 Orang, dengan capaian kinerja 50%.

1.12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (unit), Target kegiatan direncanakan pada Triwulan II.

1.13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (unit), Target kegiatan direncanakan pada Triwulan II.

1.14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat), Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 200 Surat , terealisasi 190 Surat dengan

1.15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening), Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 15 rekening, terealisasi 15 rekening, Rekening terdiri dari 3 rekening PDAM, 3 rekening Listrik untuk Kantor, 6 rekening pulsa prabayar, 3 rekening TV Kabel.

1.16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang), Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 4 Orang , terealisasi 4 Orang dengan capaian kinerja 100 %.

1.17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit), Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 9 Unit , terealisasi 6 Unit, Dengan capaian kinerja 66,67 %.

1.18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit), Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 10 Unit , terealisasi 10 Unit dengan capaian kinerja 100 %.

1.19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit), Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 1 Gedung kantor, terealisasi 1 gedung, dengan capaian kinerja 100 %.

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

Kegiatan yang dilakukan oleh Sub Bagian Perencanaan ada 7 Sub kegiatan sebagai berikut :

2.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan I sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau sebesar 100%.

2.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan II sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau sebesar 100%.

2.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan II tidak ada.

2.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 2 dokumen, terealisasi 2 dokumen dengan capaian kinerja 100%.

2.5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang) Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 2 Orang, terealisasi 3 Orang, dengan capaian kinerja 150 %.

2.6. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah laporan data

2.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi dan koonsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali) Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 90 Kali, terealisasi 58 Kali, dengan capaian kinerja 64,44 %.

BAB V

REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan bagian Sekretariat lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Triwulan II Tahun 2022 di sajikan pada Tabel berikut:

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.470.335.516	1.428.323.870	1.042.011.646
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.014.860	26.795.000	14.219.860
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.081.294.772	1.142.151.635	939.143.137
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	5.860.000	3.750.000	2.110.000
4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.510.000	3.850.000	1.660.000
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.420.000	26.845.000	18.575.000
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.249.400	135.620.100	34.629.300
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.168.750	0	10.168.750
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.704.934	62.319.135	14.385.799
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.112.800	26.993.000	7.119.800
Jumlah		2.470.335.516	1.428.323.870	1.042.011.646

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Sub Kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Sekretariat Pada Triwulan II disajikan pada Tabel berikut :

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN 2 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 Juni 2021	SELISIH
1	2	3	4	5	6 (4-5)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.376.376.433,00	2.470.335.516,00	1.428.323.870,00	1.042.011.646,00
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.294.735,00	41.014.860,00	26.795.000,00	14.219.860,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.748.010,00	23.460.000,00	18.210.000,00	5.250.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.414.860,00	2.374.860,00	0,00	2.374.860,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4.162.965,00	2.700.000,00	800.000,00	1.900.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.968.900,00	12.480.000,00	7.785.000,00	4.695.000,00
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.646.150.513,00	2.081.294.772,00	1.142.151.635,00	939.143.137,00
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.549.118.503,00	2.039.294.772,00	1.109.261.635,00	930.033.137,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	97.032.010,00	42.000.000,00	32.890.000,00	9.110.000,00
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.781.981,00	5.860.000,00	3.750.000,00	2.110.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.781.981,00	5.860.000,00	3.750.000,00	2.110.000,00
04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.623.710,00	5.510.000,00	3.850.000,00	1.660.000,00
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.623.710,00	5.510.000,00	3.850.000,00	1.660.000,00

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.832.250,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.784.600,00	2.784.600,00	0,00	2.784.600,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.710.700,00	3.856.000,00	1.826.000,00	2.030.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.675.000,00	6.800.000,00	3.450.000,00	3.350.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.120.000,00	3.060.000,00	2.900.000,00	160.000,00
07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.816.000,00	142.748.800,00	124.944.100,00	17.804.700,00
08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.168.750,00	10.168.750,00	0,00	10.168.750,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.168.750,00	3.168.750,00	0,00	3.168.750,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.889.438,00	76.704.934,00	62.319.135,00	14.385.799,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.879.570,00	11.700.000,00	7.600.000,00	4.100.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.009.868,00	29.004.934,00	24.719.135,00	4.285.799,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00	36.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.912.800,00	34.112.800,00	26.993.000,00	7.119.800,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.650.000,00	12.000.000,00	11.615.000,00	385.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.150.000,00	9.000.000,00	2.270.000,00	6.730.000,00

1.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	231.407.130,00	231.407.130,00	122.941.400,00	108.465.730,00
2.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	47.134.290,00	35.514.290,00	24.606.851,00	10.907.439,00
	Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/Kota	171.535.040,00	171.535.040,00	7.950.000,00	163.585.040,00
1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	171.535.040,00	171.535.040,00	7.950.000,00	163.585.040,00
C.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	188.444.480,00	97.351.980,00	25.262.000,00	72.089.980,00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	188.444.480,00	97.351.980,00	25.262.000,00	72.089.980,00
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	22.638.490,00	12.765.990,00	6.620.000,00	6.145.990,00
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	165.805.990,00	84.585.990,00	18.642.000,00	65.943.990,00
D.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	307.191.107,00	206.891.152,00	155.650.080,00	51.241.072,00
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	307.191.107,00	206.891.152,00	155.650.080,00	51.241.072,00
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	286.870.777,00	188.345.822,00	148.802.000,00	39.543.822,00
2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.320.330,00	18.545.330,00	6.848.080,00	11.697.250,00
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	417.091.801,00	256.557.388,00	158.223.400,00	98.333.988,00
	Pengendalian Pelaksanaan	417.091.801,00	256.557.388,00	158.223.400,00	98.333.988,00

3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	98.788.490,00	70.109.187,00	56.765.400,00	13.343.787,00
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	29.999.850,00	21.329.180,00	2.950.337,00	18.378.843,00
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.999.850,00	21.329.180,00	2.950.337,00	18.378.843,00
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	29.999.850,00	21.329.180,00	2.950.337,00	18.378.843,00
TOTAL BELANJA		4.769.180.131,00	3.490.921.676,00	1.925.907.938,00	1.565.013.738,00

Tabel 3.6

Capaian Program dan Kegiatan Yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran 3 (tiga) Pada Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN							PENANGGUNG JAWAB	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET		REALISASI	CAPAIAN		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%	TW I	25	21,35	85,36	Sekretaris	
				TW II	25	20,00	80,00		
				TW III	25				
				TW IV	25				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	17	TW I	2	2	100,00		
				TW II	5	5	100,00		
				TW III	7				
				TW IV	3				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100%	TW I	25	24,00	96,00		
				TW II	25	24,00	96,00		
				TW III	25				
				TW IV	25				
	Administrasi Barang	Persentase barang	100%	TW I	25	25	100		

1730

NO	PROGRAM / KEGIATAN							PENANGGUNG JAWAB	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET		REALISASI	CAPAIAN		
	Milik Daerah pada Perangkat Daerah	milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan		TW II	25	25	100		
				TW III	25				
				TW IV	25				
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah	2,5 Milyar	TW I	0 Juta	4.610.710	0		
				TW II	575 Juta	31.197.102	5,39		
				TW III	690 Juta				
				TW IV	690 Juta				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	TW I	25	25,00	100		
				TW II	25	25,00	100		
				TW III	25				
				TW IV	25				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	TW I	25	25,00	100		
				TW II	25	22,00	88,00		
				TW III	25				

NO	PROGRAM / KEGIATAN							PENANGGUNG JAWAB	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET		REALISASI	CAPAIAN		
				TW IV	25				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100%	TW I	0	0	0		
				TW II	100	0	0		
				TW III	0				
				TW IV	0				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	TW I	25	38,00	152,00		
				TW II	25	24,00	96,00		
				TW III	25				
				TW IV	25				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	56 unit	TW I	23	8	34,78		
				TW II	25	20	80,00		
				TW III	25				
				TW IV	16				

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan untuk memenuhi tercapainya sasaran 3 meliputi:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung

oleh 9 (sembilan) kegiatan dan 25 Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - a. Subkegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah indikator jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana kerja pokok, dokumen rencana kerja perubahan, serta dokumen perencanaan lainnya. Pada triwulan II dengan target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100 %
 - b. Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, indikator jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu, penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pokok dan RKA perubahan. Pada triwulan II dengan target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100 %
 - c. Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD, indikator jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu, penyusunan Rencana Kerja Anggaran (DPA) pokok. Pada triwulan II tidak terdapat target kinerja.
 - d. Evaluasi Kinerja PD, indikator jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu. Pada triwulan II dengan target 2 dokumen, terealisasi 2 dokumen, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100 %.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian gaji dan tambahan penghasilan yang direncanakan pada 21 pegawai tetapi hanya terealisasi sebanyak 20 pegawai Sehingga pada triwulan II terealisasi sebesar 95,24%
 - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Pada triwulan II dengan target 4 dokumen, terealisasi 4 dokumen. Capaian yang diperoleh sebesar 100 %.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - a. Subkegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan administrasi aset barang . Pada triwulan II dengan target 4 dokumen, terealisasi 4 dokumen. Capaian yang diperoleh sebesar 100 %.

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;

ptsp

- a. Subkegiatan Pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah adalah merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan pengelolaan retribusi daerah. Pada triwulan I dengan target 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen. Capaian yang diperoleh sebesar 100%.

5. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah;

- a. Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian merupakan kegiatan terkait pengelolaan administrasi kepegawaian seperti, presensi, administrasi kenaikan pangkat, cuti dan dokumen lainnya yang terkait kepegawaian. Pada triwulan II dengan target 1 laporan, terealisasi 1 laporan. Capaian yang diperoleh sebesar 100 %.
- b. Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, merupakan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Aparatur dengan mengikuti diklat-diklat, sosialisasi bimbingan teknis dan lainnya. Pada triwulan II dengan target 2 oarang, terealisasi 3 orang. Capaian yang diperoleh sebesar 150 %.

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor merupakan kegiatan untuk pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Pada triwulan II dengan target 3, terealisasi 3, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100 %.
- b. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor merupakan kegiatan penunjang kelancaran pelayanan administrasi dengan tersedianya bahan logistic kantor yang disediakan. Pada triwulan II dengan target 2 jenis, terealisasi 2 jenis, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100 %.
- c. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan merupakan kegiatan pembelanjaan fotocopy dan jilid data, laporan, dokumen dan lain-lain yang dibutuhkan pada Disperkimtan Kabupaten Luwu Timur. Pada triwulan II dengan target 4 jenis, terealisasi 4 jenis, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100 %.
- d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, merupakan kegiatan untuk pembayaran tagihan rekening Koran dan bahan bacaan lainnya yang dibutuhkan untuk peningkatan pengetahuan aparatur. Pada triwulan II dengan target 15 eksemplar, terealisasi 15 eksemplar, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100 %.

Kabupaten Luwu Timur. Pada triwulan II dengan target 30 kotak, terealisasi 15 kotak, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 50%.

- f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD merupakan kegiatan perjalanan dinas luar dan dalam propinsi dan dalam daerah, yang diikuti dalam rangka rapat koordinasi maupun konsultasi dengan instansi yang terkait dengan Dinas Penanaman modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur. Pada triwulan II dengan target 90 kali, hanya terealisasi 58 kali, capaian yang diperoleh sebesar 64,44 %.
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya, tidak ada target kinerja.
 - b. Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, merupakan pengadaan Gordin dan AC 2 unit, tetapi pada tw.I tidak ada target kinerja.
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat merupakan kegiatan pengelolaan tertib administrasi, dengan pengklasifikasian surat masuk dan surat keluar sesuai Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pola Klasifikasi Arsip Daerah. Pada triwulan I dengan target 400 surat, realisasi 500 surat, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 125%.
 - b. Subkegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan kegiatan untuk pembayaran biaya rekening air, rekening listrik kantor, Tv Kabel, 2 rekening pulsa Prabayar. Pada triwulan I dengan target 15 rekening, terealisasi 15 rekening, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100%.
 - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor merupakan kegiatan pembayaran upah jasa 2 (dua) orang cleaning service, Security dan upah jasa administrasi. Pada triwulan II dengan target 4 orang, terealisasi 4 orang, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100%.
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan merupakan kegiatan untuk pembiayaan perbaikan kendaraan dinas dan belanja pajak kendaraan dinas yang tercatat sebagai asset DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur. Pada triwulan I ada target sebesar 2 unit terealisasi 3, sehingga capaian sebesar 150%.

sebagai asset DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur. Pada triwulan I ada target sebesar 11 unit terealisasi 11, sehingga capaian sebesar 100%..

- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya merupakan kegiatan untuk pemeliharaan gedung kantor yang memerlukan perbaikan. Pada triwulan tidak terdapat target kinerja.

3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran untuk Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur, pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.925.907.938,- atau sebesar 40,37%, rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

atsn

No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN 2 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 Juni 2022		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	4	5	6	7(6/5*100)	8 (5-6)	9 (8/5*100)	10 (4-6)	11 (10/4*100)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.376.376.433,00	2.470.335.516,00	1.426.323.870,00	57,82	1.042.011.646,00		1.948.052.563,00	57,70
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.294.735,00	41.014.860,00	26.795.000,00	65,33	14.219.860,00	34,67	42.499.735,00	61,33
	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.748.010,00	23.460.000,00	18.210.000,00	77,62	5.250.000,00	22,38	15.538.010,00	46,04
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.414.860,00	2.374.860,00	0,00	0,00	2.374.860,00	100,00	3.414.860,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.162.985,00	2.700.000,00	800.000,00	29,63	1.900.000,00	70,37	3.362.985,00	80,78
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.968.900,00	12.480.000,00	7.785.000,00	62,38	4.695.000,00	37,62	20.183.900,00	72,17
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.546.150.513,00	2.081.294.772,00	1.142.151.635,90	54,88	939.143.137,00	45,12	1.503.998.878,00	58,94
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.549.118.503,00	2.039.294.772,00	1.108.261.635,00	54,39	930.033.137,00	45,61	1.439.856.868,00	56,48
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	97.032.010,00	42.000.000,00	32.890.000,00	78,31	9.110.000,00	21,69	64.142.010,00	66,10
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.781.981,00	5.860.000,00	3.750.000,00	63,99	2.110.000,00	36,01	13.031.981,00	77,65
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.781.981,00	5.860.000,00	3.750.000,00	63,99	2.110.000,00	36,01	13.031.981,00	77,65
04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.623.710,00	5.510.000,00	3.850.000,00	69,87	1.660.000,00	30,13	6.773.710,00	63,76
	Pelaporan Pengeluaran Retribusi Daerah	10.623.710,00	5.510.000,00	3.850.000,00	69,87	1.660.000,00	30,13	6.773.710,00	63,76
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.615.956,00	45.420.000,00	26.845.000,00	59,10	18.575.000,00	40,90	55.770.956,00	67,51
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.985.956,00	9.420.000,00	3.440.000,00	-	5.980.000,00	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	69.630.000,00	36.000.000,00	23.405.000,00	0,00	12.585.000,00	34,99	46.225.000,00	66,39
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.938.550,00	170.249.400,00	135.620.100,00	79,66	34.629.300,00	20,34	172.318.450,00	55,96
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.632.250,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632.250,00	100,00

	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.784.600,00	2.784.600,00	0,00	0,00	2.784.600,00	0,00	2.784.600,00	100,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.710.700,00	3.856.000,00	1.828.000,00	47,35	2.030.000,00	52,65	5.884.700,00	76,32
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.675.000,00	6.900.000,00	3.450.000,00	50,74	3.350.000,00	49,26	10.225.000,00	74,77
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.120.000,00	3.060.000,00	2.900.000,00	94,77	160.000,00	5,23	3.220.000,00	52,61
07	Facilitas Kunjungan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	41,67	3.500.000,00	58,33	3.500.000,00	58,33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.816.000,00	142.748.800,00	124.944.100,00	87,53	17.864.700,00	12,47	137.871.900,00	52,46
08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.168.750,00	10.168.750,00	0,00	0,00	10.168.750,00	0,00	10.168.750,00	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.168.750,00	3.168.750,00	0,00	0,00	3.168.750,00	0,00	3.168.750,00	100,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.889.438,00	76.794.934,00	62.319.135,00	81,25	14.385.799,00	18,75	90.576.303,00	59,24
	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	22.879.570,00	11.700.000,00	7.600.000,00	64,96	4.100.000,00	35,04	15.279.570,00	66,75
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.006.868,00	29.304.934,00	24.719.135,00	85,22	4.285.799,00	14,78	33.290.733,00	57,39
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00	36.000.000,00	30.000.000,00	83,33	6.000.000,00	16,67	42.000.000,00	58,33
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.912.800,00	34.112.800,00	26.993.000,00	79,13	7.119.800,00	20,87	52.919.800,00	66,22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.650.000,00	12.000.000,00	11.615.000,00	96,79	385.000,00	3,21	34.335.000,00	74,58
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.150.000,00	9.000.000,00	2.270.000,00	25,22	6.730.000,00	74,78	18.880.000,00	89,27
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.112.800,00	13.112.800,00	13.108.000,00	99,96	4.800,00	0,04	4.800,00	0,04
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	450.076.460,00	436.456.460,00	155.498.251,00	35,46	282.958.209,00	64,54	294.578.209,00	65,45
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	278.541.420,00	266.921.420,00	147.548.251,00	55,28	119.373.169,00	44,72	130.983.169,00	47,03
1.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	231.407.130,00	231.407.130,00	122.941.400,00	53,13	108.465.730,00	46,87	108.465.730,00	46,87
2.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	47.134.290,00	35.514.290,00	24.606.851,00	69,29	10.907.439,00	30,71	22.527.439,00	47,79

Rp

	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	171.535.040,00	171.535.040,00	7.950.000,00	163.585.040,00	95,37	163.585.040,00	95,37
1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	171.535.040,00	171.535.040,00	7.950.000,00	163.585.040,00	95,37	163.585.040,00	95,37
C.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	188.444.480,00	97.351.980,00	25.262.000,00	72.089.980,00	74,05	163.182.480,00	86,59
1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	188.444.480,00	97.351.980,00	25.262.000,00	72.089.980,00	74,05	163.182.480,00	86,59
2.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	22.638.490,00	12.765.990,00	6.620.000,00	6.145.990,00	48,14	16.018.490,00	70,76
3.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	165.805.990,00	84.585.990,00	18.642.000,00	65.943.990,00	77,96	147.163.990,00	88,76
D.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	307.191.107,00	206.891.152,00	155.650.080,00	51.241.072,00	24,77	151.541.027,00	49,33
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	307.191.107,00	206.891.152,00	155.650.080,00	51.241.072,00	24,77	151.541.027,00	49,33
2.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	286.870.777,00	188.345.822,00	148.802.000,00	39.543.822,00	21,00	138.068.777,00	48,13
3.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengabdian Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.320.330,00	18.545.330,00	6.848.080,00	11.697.250,00	63,07	13.472.250,00	66,30
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	417.091.801,00	256.557.388,00	158.223.400,00	98.333.988,00	38,33	258.868.401,00	62,07
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	417.091.801,00	256.557.388,00	158.223.400,00	98.333.988,00	38,33	258.868.401,00	62,07
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	102.921.550,00	77.716.200,00	17.830.000,00	59.886.200,00	77,06	85.091.550,00	82,68
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	215.381.761,00	108.732.001,00	83.628.000,00	25.104.001,00	23,09	131.753.761,00	61,17
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	98.788.490,00	70.109.187,00	56.765.400,00	13.343.787,00	19,03	42.023.090,00	42,54
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	29.999.850,00	21.329.180,00	2.950.337,00	18.378.843,00	86,17	27.049.513,00	90,17
1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.999.850,00	21.329.180,00	2.950.337,00	18.378.843,00	86,17	27.049.513,00	90,17
2.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	29.999.850,00	21.329.180,00	2.950.337,00	18.378.843,00	86,17	27.049.513,00	90,17
	TOTAL BELANJA	4.769.180.131,00	3.490.921.676,00	1.925.907.938,00	1.565.013.738,00	44,83	2.843.272.193,00	59,62

RAPAT EVALUASI KINERJA TW.II Tahun 2022
Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selasa, 05 Juli 2022 Pukul 10.00 WITA





BAB IV PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80,00 %	56,88%

Capaian realisasi kinerja masih dibawah target karena adanya pengadaan/belanja modal masih mundur dilaksanakan dan bergeser ke triwulan 3. Capaian realisasi keuangan yang masih kurang karena adanya kesepakatan pada saat penginputan rencana anggaran kas pada gaji menggunakan system tw1: 40%, tw.2: 30%, tw.3: 15% dan tw.4: 15%.

Malili, 12 Juli 2022
SEKRETARIS DINAS ,



HARIYADI HAMID, S.STP
NIP. 19850710 200602 1 002
Pangkat : Pembina

LAPORAN TRIWULAN II
BIDANG PENANAMAN MODAL



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan di bidang penanaman modal yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau adalah merupakan suatu keharusan untuk dipenuhi. Hal tersebut sejalan dengan amanat konstitusi baik undang-undang maupun peraturan turunannya, bahwa segenap jajaran penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif harus meningkatkan pelayanan penyelenggara negara serta memegang teguh komitmen untuk menegakkan *good and clean government*.

Wujud komitmen penyelenggaraan pemerintah yang memegang prinsip *good and clean governance* adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan investasi yang mengedepankan prinsip “3 Pasti” yaitu pasti syarat, pasti biaya dan pasti prosedurnya. Dengan memegang teguh komitmen tersebut maka target peningkatan kualitas pelayanan pemerintah akan meningkat. Sehingga hal tersebut juga akan berdampak pada upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam pekayaan perizinan investasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa ada 3 (tiga) hal utama yang mendasari dibentuknya kelembagaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah yaitu :

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berinvestasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. Pelaksanaan pelayanan perizinan berinvestasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yaitu memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau

BIDANG PENANAMAN MODAL DPMPSTP KAB. LUWU TIMUR

serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat; dan

3. Pelaksanaan pelayanan perizinan berinvestasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai *good and clean governance* yang lebih baik

Penjabaran pelaksanaan program di Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, dijabarkan oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) orang pejabat fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, kedalam 5 (lima) kegiatan dengan berdasarkan pada :

1. Dokumen Rencana Strategis (Revisi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
2. Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021;
4. SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Nomor 01/I Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

BIDANG PENANAMAN MODAL DPMPSTP KAB. LUWU TIMUR

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Nomor 01/I Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, maka diperjanjikan 2 program sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Program promosi penanaman modal dengan anggaran sebesar Rp. 188.444.480,00
2. Program pengembangan iklim penanaman modal dengan anggaran sebesar Rp. 450.076.460,00

Pencapaian target dan sasaran program yang telah ditetapkan akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan investasi dan realisasi investasi di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022. Target kinerja Program disajikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan (PK-P) dan Rencana Aksi Perubahan (RA-P) Atas Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

BAB III

REALISASI KINERJA

Berdasarkan Evaluasi Atas Rencana Aksi sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran Perubahan Tahun 2022 (tabel evaluasi atas rencana aksi terlampir) dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Program promosi penanaman modal

Target kinerja program yang ditetapkan adalah pelaksanaan even pameran investasi sebanyak 2 even dengan rincian 1 kali even pelaksanaan pameran pembangunan dan 1 kali pelaksanaan kegiatan strategi promosi. Adapun prosentase realisasi kinerja yang dicapai yaitu sebesar 100 % dari target kinerja yang ditetapkan dengan rincian :

$$= \frac{\text{Jumlah even yang dilaksanakan}}{\text{Total target even pameran}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

2. Program pengembangan iklim penanaman modal

Target indikator capaian program adalah pencapaian nilai investasi sebanyak Rp 864.601.507.523,-,-. Adapun pencapaian target kinerja untuk triwulan II (dua) adalah penambahan nilai investasi sebanyak Rp 768.857.094.932,- (PMA Rp 773.747.003.00,- dan PMDN Rp 90.854.504.523,-) dengan rincian yaitu :

$$= \frac{\text{Jumlah nilai investasi triwulan berjalan}}{\text{Target penambahan nilai invesatsiper triwulan}} \times 100\%$$

$$= \frac{864.601.507.523,-}{825.000.000.000,-} \times 100\%$$

$$= 104,8 \%$$

Secara umum evaluasi pencapaian target kinerja untuk triwulan II (dua) di Bidang Penanaman Modal baik itu program penyelenggaraan promosi penanaman modal dan program pengembangan iklim penanaman modal adalah tercapai 100 %. Pelaksanaan pameran Dekranasda pada tanggal 4 – 7 Juni 2022 di Hotel Four Point Shaeraton melibatkan beberapa OPD terkait dan para pelaku IKM dengan membawa produk hasil kerajinan masing-masing. Pencapaian target kinerja program pengembangan iklim penanaman modal sebesar 104,8 % disebabkan oleh telah maksimalnya penerapan pelayanan perizinan secara elektronik (*on line single submission*) sehingga sangat memudahkan para calon investor untuk melakukan pengurusan perizinan secara on line dan pelaku usaha telah aktif dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

Adapun capaian kinerja rata – rata program yaitu

No	Kegiatan	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	penyelenggaraan promosi penanaman modal	100	Sangat Baik
2.	penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	104,8	Sangat Baik
Jumlah		204,8	
Realisasi Program		= 204,8/2	Sangat Baik
		102,4 %	

BIDANG PENANAMAN MODAL DPMPTSP KAB. LUWU TIMUR

BAB IV REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan program pada Bidang Penanaman Modal disajikan pada Tabel berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	SELISIH	%
1.	Promosi penanaman modal	188.444.480,-	80.120.000,-	47.094.500,-	33.025.500,-	41,22
2.	Pengembangan iklim penanaman modal	450.076.460,-	326.448.251,-	176.448.251,-	150.000.000,-	45,95
Jumlah		638.520.940,-	406.568.251,-	223.542.751,-	183.025.500,-	
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN				54,98 %		

BIDANG PENANAMAN MODAL DPMPTSP KAB. LUWU TIMUR

BAB V PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut :

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
102,4 %	54,98 %

Berdasarkan capaian realisasi kinerja dan realisasi capaian keuangan maka diusulkan/direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pameran Dekranasda 2022 untuk biaya stand an desain di tanggung oleh PT. Vale, sehingga anggaran yang telah dialokasikan pada triwulan berjalan tidak terpakai
2. Penyusun target kinerja program dan kegiatan agar mengacu pada data capaian kinerja tahun berjalan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus lebih cermat dalam meletakkan anggaran kas;
4. Masing-masing pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) agar membuat pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan.

Malili, 1 Juli 2022
KABID PENANAMAN MODAL



AYUB KOMBONG, ST., M.Si
NIP. 19750825 200502 1 006

BIDANG PENANAMAN MODAL DPMPTSP KAB. LUWU TIMUR

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II

A. LATAR BELAKANG

1. Kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan investasi dilapangan;
2. Pemerintah Daerah sebagai regulator pelaksanaan investasi sangat penting untuk melakukan pemetaan terhadap hambatan – hambatan terhadap pelaksanaan investasi ;
3. Pemerintah Daerah harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi investor.

B. TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal tujuannya antara lain :

1. Untuk mengetahui implelementasi pelaksanaan kebijakan pemberian insentif investasi dilapangan;
2. Melakukan pemetaan terkait permasalahan/kendala yang dihadapim dan harapan dalam rangka pengembangan usahnya;
3. Sebagai bahan masukan dalam melakukan evaluasi dan perumusan kebijakan kemudahan dan insentif investasi di Kabupaten Luwu Timur;



C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan anggaran kas dan target kinerja yang telah ditetapkan, bahwa untuk pelaksanaan kunjungan / evaluasi akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2022.

E. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :



1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/inentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan sampai dengan triwulan II telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan;

2. Adapun capaian prosentase realisasi keuangan sampai dengan triwulan I (satu) yaitu :

$$= \frac{\text{Realisasi Keuangan}}{\text{Target Realisasi Keuangan}} \times 100 \%$$

Rp 35.416.851,-

$$= \frac{\text{Rp 47.134.290,-}}{\text{Rp 47.134.290,-}} \times 100 \%$$

$$= 75,14 \%$$

F. KENDALA DAN HAMBATAN

Adapun kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran sesuai anggaran kas triwulan I (satu) yaitu :

1. Secara umu pelaksanaan kegiatan untuk triwulan I (satu) telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran maka akan pelaksanaan kegiatan pada triwulan II (dua) khususnya pelaksanaan kunjungan lapangan dan rapat evaluasi akan dimaksimalkan pelaksanaannya;
2. Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan akan melibatkan semua bidang lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.



F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan / pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2021.

Malili, 1 April 2022

Kabid Penanaman Modal / PPTK



AYUB KOMBONG, S.T.,M.Si

NIP. 19750825 200502 1 006



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II

A. LATAR BELAKANG

1. Kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sebagai upaya untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan kondusif bagi para investor;
2. Pemerintah Daerah sebagai regulator pelaksanaan investasi sangat penting untuk menyusun regulasi yang dapat menarik investasi;
3. Peraturan daerah ini akan menjadi acuan dalam memberikan kepastian hukum kepada para investor dalam melaksanakan investasi di Kabupaten Luwu Timur.

B. TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal tujuannya antara lain :

1. Untuk menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
2. Untuk menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penanaman Modal sebagai implementasi dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.



C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal sampai dengan triwulan 2 tahun anggaran 2022, telah dilaksanakan pembahasan draf rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko dan juga telah dilakukan kunjungan kerja baik dalam maupun



luar provinsi. Saat ini tahapan prosesnya adalah menunggu jadwal pembahasan dan harmonisasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

E. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan yaitu pada triwulan II (dua) telah tersusun naskah akademik rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penanaman Modal dan pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, sehingga hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir triwulan II (dua) adalah 100 % (seratus persen).

2. Adapun capaian prosentase realisasi keuangan sampai dengan triwulan II (dua) yaitu :

$$= \frac{\text{Realisasi Keuangan}}{\text{Target Realisasi Keuangan}} \times 100 \%$$

Rp 133.081.400,-

$$= \frac{\text{Rp 133.081.400,-}}{\text{Rp 166.600.000,-}} \times 100 \%$$

$$= 79,88 \%$$



F. KENDALA DAN HAMBATAN

Adapun kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran sesuai anggaran kas triwulan II (dua) yaitu :

1. Adanya perubahan jadwal prolegda dari DPRD Kabupaten Luwu Timur, sehingga pembahasan prolegda tahap I yaitu Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko mengalami pergeseran. Hal ini berdampak pada daya serap anggaran perjalanan dinas yang telah dialokasikan pada triwulan II.
2. Perubahan jadwal pembahasan prolegda tahap I, juga berdampak pada pembahasan prolegda tahap II yaitu rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penanaman Modal.

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan / pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2022.

Malili, 1 Juli 2022

Kabid Penanaman Modal/PPTK



AYUB KOMBONG, S.T., M.Si
NIP. 19750825 200502 1 006



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II

A. LATAR BELAKANG

1. Bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum menyusun dokumen produk unggulan daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. Dokumen produk unggulan daerah akan menjadi arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan potensi usaha yang layak untuk dilakukan kegiatan promosi dan temu bisnis;

B. TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota tujuannya antara lain :

1. Melakukan identifikasi, klasifikasi dan inventarisasi terhadap kondisi dan potensi ekonomi infrastruktur, demografi dan para pelaku usaha lingkup wilayah Kabupaten Luwu Timur;
2. Menjadi basis data dan informasi tentang kondisi dan potensi ekonomi, infrastruktur, demografi, dan para pelaku usaha berdasarkan sektor/kegiatan usaha masing-masing;



E. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota yang ditetapkan pada triwulan I telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan;
2. Adapun capaian prosentase realisasi keuangan sampai dengan triwulan I (satu) yaitu :

$$= \frac{\text{Realisasi Keuangan}}{\text{Target Realisasi Keuangan}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} & \text{Rp } 7.950.000,- \\ &= \frac{\text{Rp } 10.500.000,-}{\text{Rp } 10.500.000,-} \times 100 \% \\ &= 75,71 \% \end{aligned}$$

F. KENDALA DAN HAMBATAN

Adapun kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran sesuai anggaran kas triwulan II (dua) yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan untuk triwulan II (dua) telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran maka akan pelaksanaan kegiatan pada triwulan II (dua) khususnya progres untuk pencairan kegiatan jasa konsultasi akan lebih dimaksimalkan;



2. Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan akan melibatkan semua bidang lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota, sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan / pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2023.

Malili, 1 Juli 2022

Kabid Penanaman Modal / PPTK



AYUB KOMBONG, S.T.,M.Si
NIP. 19750825 200502 1 006



LAPORAN TRIWULAN KEDUA KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memaksimalkan promosi dan meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Luwu Timur, maka dibutuhkan penyajian data yang akurat dan terbaru. Sehingga dibutuhkan untuk melakukan kegiatan promosi investasi ke calon investor agar potensi yang dimiliki suatu kabupaten dapat dilihat dan diketahui.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah untuk mempromosikan potensi yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur tahun 2022.

Tujuan yang diharapkan dalam Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah untuk memberikan gambaran kepada calon investor terkait potensi dan peluang investasi Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah terlaksananya kegiatan serta dalam kegiatan pameran investasi tahun anggaran 2022.

II. TARGET DAN TUJUAN

2.1 Target Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPSTSP Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2022 **dengan Anggaran sebesar Rp.165.805.990,-**

Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pada kegiatan Promosi Penanaman Modal sebesar **Rp 34.012.000,-** atau sekitar **20,51 %** dan sisanya **Rp.118.711.490,-**

2.2 Target kinerja

Target kinerja dari Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah keikutsertaan pada satu event pameran.

2.3 Realisasi Kinerja

Pencapaian realisasi kinerja kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah pada Triwulan kedua (2) adalah telah terlaksananya keikutsertaan kegiatan pameran yang diselenggarakan di Makassar.

III. CAPAIAN

3.1 Capaian

Capaian Anggaran kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah 20,51 % dan capaian Kinerja pada triwulan tiga adalah 100 %.

Malili, 26 Juli 2022

PPTK



Ayub Kombong

Nip.19750825 200502 1 006

LAPORAN TRIWULAN DUA KEGIATAN PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memaksimalkan promosi dan meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Luwu Timur, maka dibutuhkan inovasi untuk memberikan informasi kepada calon investor terkait potensi yang dimiliki sebuah Kabupaten. Maka dalam hal ini kegiatan penyediaan dan penyebaran informasi merupakan solusi untuk memberikan gambaran potensi yang dimiliki oleh Kabupaten.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal adalah untuk mempromosikan potensi yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur tahun 2022

Tujuan yang diharapkan dalam kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal adalah untuk memberikan gambaran kepada calon investor terkait potensi dan peluang investasi Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal adalah terpublikasinya potensi dan peluang investasi yang dimiliki Kabupaten.

II. TARGET DAN TUJUAN

2.1 Target Anggaran

Pelaksanaan kegiatan kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPSTSP Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2022 dengan Anggaran sebesar Rp 22.638.490.

2.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pada kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal sebesar Rp 13.082.500,- atau sekitar 57,79 %. Dan sisa anggaran sebesar Rp 9.555.990,-

2.3 Target kinerja

Target kinerja dari kegiatan penyediaan dan penyebar luasan informasi adalah Terpublikasinya potensi investasi daerah di satu Media.

2.4 Realisasi Kinerja

Pencapaian realisasi kinerja kegiatan kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal pada Triwulan kedua (2) adalah belum terlaksana dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan di triwulan tiga.

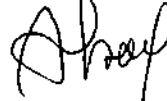
III. CAPAIAN

3.1 Capaian

Capaian Anggaran kegiatan kegiatan penyediaan dan penyebar luasan informasi adalah 57,79 %. dan capaian Kinerja triwulan pertama adalah 0 % .

Malili, 26 Juli 2022

PPTK,



Ayub Kombong

Nip.19750825 200502 1 006

LAPORAN TRIWULAN II

SEKRETARIAT



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu dan satu tempat. Dimana fungsi utamanya adalah melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal dengan sasaran terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional, berintegritas dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 penyelenggaraan PTSP bertujuan :

- Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
- Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima.
- Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah pelayanan perizinan, mempersingkat birokrasi dan mewujudkan komitmen DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur dengan memberikan pelayanan perizinan yang prima yaitu pemberian pelayanan yang sederhana, cepat, mudah,

•
•
•
•
murah dan transparan melalui pelayanan online, pelayanan langsung ke masyarakat maupun pelayanan offline dalam kantor.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Keputusan kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Nomor 01/I/Tahun 2022 tanggal 01 Januari 2022 tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, maka diperjanjikan 2 Program, 2 Kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 286.870.777,00.
 2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 20.320.330,00.

2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

1. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebesar Rp. 29.999.850,00.

BAB III

REALISASI KINERJA

Berdasarkan Evaluasi atas Rencana Aksi pada Triwulan I Tahun Anggaran Tahun 2022 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

➤ Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Target yang ditetapkan untuk triwulan II sebesar 72%, terealisasi 63,07% dengan capaian kinerja 87,6%

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	91,20	Sangat Baik

2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100	Sangat Baik
Jumlah		191,20	
Realisasi Program		= 191,20/2 =95,6 %	Sangat Baik

Realisasi Program ini dihitung dengan formulasi :

- $\frac{\text{Jumlah total capaian Kegiatan} \times 100}{\text{Jumlah Sub kegiatan yang mendukung Kegiatan}}$

Capaian realisasi Program Pelayanan Penanaman Modal 107,07%

dengan Realisasi Kinerja 109% dari target 72 % dengan nilai Indeks

Kepuasan Masyarakat Sebesar 88,16%

Jumlah Pendaftaran izin = 799

Jumlah izin terbit = 912

Jumlah penyelesaian izin tepat waktu = 504

Rata-rata penyelesaian Izin tepat waktu dihitung dari :

$\frac{\text{Jumlah izin tepat waktu} \times 100}{\text{Jumlah pendaftaran izin}}$

$$= \frac{504}{799} \times 100 = 63,07 \%$$

Rata-rata Capaian Kinerja =

$\frac{\text{Rata-rata penyelesaian izin tepat waktu} \times 100}{\text{Target kinerja triwulan II}}$

$$= \frac{63,07}{72} \times 100 = 87,6 \%$$

Rata-rata jumlah penyelesaian izin tepat waktu = 63.07%, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa izin yang belum terbit rekomendasi dan masih ada beberapa izin yang terlambat dicetak dikarenakan aplikasi maintenance.

Untuk jumlah izin terbit lebih banyak daripada jumlah pendaftaran yang ada di triwulan ke II dikarenakan ada beberapa izin dari triwulan I yang baru terbit di triwulan II dikarenakan keterlambatan penerbitan rekomendasi dari Tim teknis

Untuk capaian kinerja Kegiatan dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah izin yang terbit} \times 100}{\text{Jumlah permohonan izin.}}$$

Capaian kinerja program Pelayanan Penanaman Modal 63,07 % dari target 72%, realisasi kinerja hanya terealisasi sebesar 87,60 hal tersebut disebabkan adanya izin yang belum selesai dikarenakan belum ada rekomendasi dari tim teknis.

- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah kabupaten/Kota dan target yang ditetapkan 100%, terealisasi 100 % dengan capaian kinerja 100%

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	0	Target pada tw IV
Jumlah		0	
Realisasi Program		= 0	Sangat Baik

Realisasi Kegiatan ini dihitung dengan formulasi :

- $\frac{\text{Jumlah total capaian Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub kegiatan yang mendukung Kegiatan}} \times 100$

Capaian realisasi Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Penanaman Modal 100% dari target 100%

Untuk capaian kinerja program dihitung dari jumlah data base penanaman modal yang valid, untuk target kinerjanya berada di triwulan ke IV, sehingga untuk triwulan ke II realisasi kinerja masih nol.

Capaian kinerja Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Penanaman Modal 100 % dari target 100%.

BAB IV

REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal dengan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota disajikan pada tabel berikut :

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	307.191.107	148.802.000	158.389.107
2.	Penyediaan Publikasi Perizinan	29.999.850	6.848.080	23.157.770
Jumlah		337.190.957	155.650.080	181.540.887
Capaian Realisasi Keuangan			46,16 %	

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan kegiatan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota disajikan pada tabel berikut :

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	Pengembangan sistem, data dan informasi perizinan	29.999.850	2.950.337	27.049.513
Jumlah		29.999.850	2.950.337	27.49.513
Capaian Realisasi Keuangan			9,83 %	

BAB V

PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut :

PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
Pelayanan Penanaman Modal	87,60 %	46,16%
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0 %	9,83%

Capaian realisasi kinerja telah mencapai target di tetapi realisasi anggaran tidak mencapai target karena adanya anggaran jasa kantor (Upah Jasa) yang tidak terealisasi 1 orang pada Program Pelayanan Penanaman Modal, sementara untuk Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, target kinerja berada di triwulan ke IV sementara realisasi keuangan masih rendah dikarenakan ada belanja cetak yang pembayarannya baru dilakukan pda triwulan ke III.

Malili, 12 Juli 2022

Kepada Bidang PTSP



Andi Rajuni, SE

NIP. 19820630 201001 2

LAPORAN TRIWULAN II

**BIDANG PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN
PENGADUAN**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, rencana tersebut biasanya dituangkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Program yang dilaksanakan dan telah dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan ini telah dilaksanakan namun masih banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut baik kendala teknis maupun kendala regulasi belum memadai. Untuk mendapatkan nilai yang maksimal perlu penekanan pelaksana sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip *good governance*, yang sejalan dengan Tugas Pokok Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan, pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, yaitu mengendalikan, mengawasi, membina, mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengawasan Penanaman Modal.

Dengan tersusunnya laporan realisasi kegiatan pada Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dibidang penanaman modal.

Untuk Tahun 2022, Dinas PM dan PTSP Mendapatkan DAK Non Fisik Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/ BKPM RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal T.A 2022 Sebesar 417. 092. 000

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan perjanjian kinerja Bidang Pengendalian, pengawasan dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, maka diperjanjikan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten 3 Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu

1. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan dengan anggaran **Rp. 102.921.550 dengan target 8 Kegiatan Usaha**
2. Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran **Rp. 215.381.761 dengan target 217 pelaku usaha**
3. Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal dengan Anggaran **Rp. 98.788.490 Target 14 Kegiatan Usaha**

BAB III

REALISASI KINERJA

Berdasarkan Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan II Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan dengan anggaran **Rp. 102.921.550 dengan target 8 Kegiatan Usaha**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi kegiatan usaha PMDM dan UKM yang di pantau}}{\text{Target yang di pantau}} \times 100\% \\
 &= \frac{2 \text{ Kegiatan Usaha}}{2 \text{ Kegiatan Usaha}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

2. Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran **Rp. 215.381.761 dengan target 217 pelaku usaha**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi Pelaku Usaha Yang mengikuti sosialisasi/BIMTEK}}{\text{Target Pelaku Usaha untuk ikut sosialisasi/BIMTEK}} \times 100\% \\
 &= \frac{60 \text{ Pelaku Usaha}}{60 \text{ Pelaku Usaha}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

3. Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal dengan Anggaran **Rp. 98.788.490 Target 14 Kegiatan Usaha**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi kegiatan usaha PMDM dan UKM yang di Awasi}}{\text{Target yang di Awasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{3 \text{ Kegiatan Usaha}}{3 \text{ Kegiatan Usaha}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

BAB IV

REALISASI KEUANGAN

Berdasarkan Evaluasi atas Rencana Aksi Pada Triwulan I Tahun Anggaran
Perubahan Tahun 2022:

NO	Program	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
1	Progran pengendalian pelaksanaan penanaman modal pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota	417.091.801	161.667.400	255.424.401
J U M L A H		417.091.801	161.667.400	255.424.401
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN		77.52 %		

Capaian realisasi keuangan 77,52 % untuk DAK non Fisik Pengendalian penanaman modal Tahun Anggaran 2022 , dijelaskan sebagai berikut :

1. Masih ada beberapa kegiatan fisik sudah terlaksana namun proses keuangan masih GU

BAB V

PENUTUP

Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan pada program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
100 %	77.52 %

Malili, 25 JULI 2022

Kepala Bidang



SAENAB SAMARING, S.KOM
Nip. 197501172006042016

**KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL
(DANA DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2022)**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMBINAAN PENANAMAN
MODAL (BIMBINGAN TEKHNIS / SOSIALISASI)**

A. LATAR BELAKANG

1. DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2022
2. Pencapaian target Realisasi Penanaman Modal melalui kegiatan bimbingan Tekhnis kepada pelaku usaha PMDN dan UKM.

B. TUJUAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi pembinaan tujuannya antara lain :

1. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha PMA, PMDN dan UKM
3. Kegiatan Bimbingan teknis terkait dengan kegiatan pelaksanaan penanaman modal, meliputi :
 - a. Bimbingan teknis / sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko
 - b. Bimbingan teknis / sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko. Yang meliputi : Laporan LKPM

C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Nomor 8 tahun 2021 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun anggaran 2022;

**KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL
(DANA DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2022)**

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan anggaran kas dan target kinerja yang telah ditetapkan, bahwa untuk pelaksanaan Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Penanaman Modal pada triwulan I sd. Triwulan IV tahun 2022. Sebanyak 8 kali

E. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan Koordinasi dan singkronisasi pembinaan Penanaman Modal DAK Non Fisik yang ditetapkan pada triwulan II telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan;

$$= \frac{\text{Realisasi Kegiatan Bimtek/Sosialisasi}}{\text{Target Kegiatan Bimtek}} \times 100 \%$$

2. Adapun capaian prosentase realisasi keuangan sampai dengan triwulan II (dua) yaitu :

$$= \frac{\text{Realisasi Keuangan}}{\text{Target Keuangan}} \times 100 \%$$

Rp 42.207.000

$$= \frac{\text{Rp 54.260.000}}{\text{Rp 54.260.000}} \times 100 \%$$

$$= 77,45 \%$$

**KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL
(DANA DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2022)**

F. KENDALA DAN HAMBATAN

Terkait dengan kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran Alhamdulillah dapat diminimalisir dengan menyesuaikan petunjuk teknis yang ada.

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha, sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan / pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2022.

Malili, 25 Juli 2022

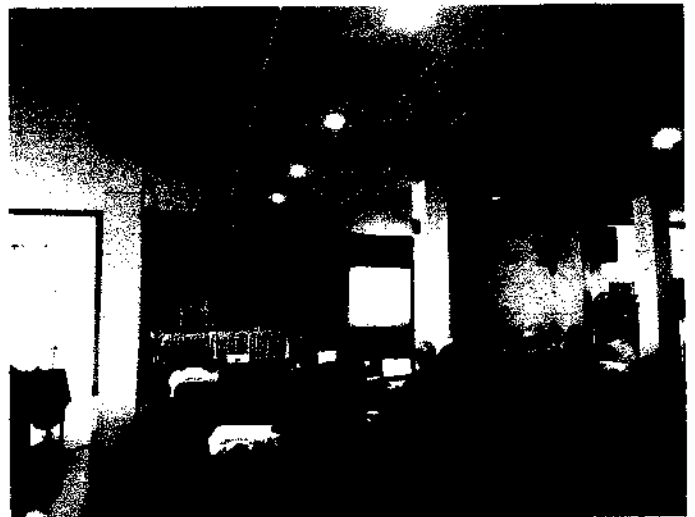
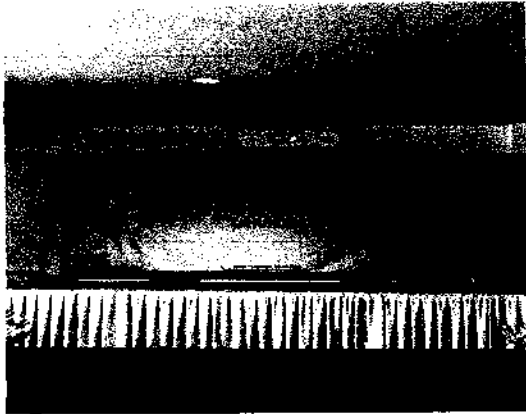
Kabid Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan



SAINAB SAMARING, S.Kom
NIP. 197501172006042016

**KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL
(DANA DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2022)**

Lampiran Foto Kegiatan



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMANTAUAN
PENANAMAN MODAL**

A. LATAR BELAKANG

1. DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2022
2. Pencapaian target Realisasi Penanaman Modal melalui kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya

B. TUJUAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan penanaman modal (Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya tujuannya antara lain :

1. identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usaha yang dituangkan dalam profil pelaku usaha
2. penyelesaian permasalahan dan hambatan dilakukan melalui pertemuan secara tatap muka antara pelaku usaha, pemerintah dan Narasumber;
3. evaluasi penyelesaian hambatan dan permasalahan

C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Nomor 8 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun anggaran 2022;

**KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL
(DANA DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2022)**

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan anggaran kas dan target kinerja yang telah ditetapkan, bahwa untuk pelaksanaan Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Penanaman Modal pada triwulan I sd. Triwulan IV tahun 2022.

E. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan Koordinasi dan singkronisasi Pemantauan Penanaman Modal DAK Non Fisik yang ditetapkan pada triwulan II telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan;
2. Adapun capaian prosentase realisasi keuangan sampai dengan triwulan II (dua) yaitu :

$$= \frac{\text{Realisasi Keuangan}}{\text{Target Realisasi Keuangan}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} & \text{Rp } 12.250.000 \\ &= \frac{\text{Rp } 26.255.400}{\text{Rp } 12.250.000} \times 100 \% \\ &= \mathbf{2.14 \%} \end{aligned}$$

**KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL
(DANA DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2022)**

F. KENDALA DAN HAMBATAN

Adapun kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran sesuai anggaran kas triwulan II(dua) yaitu :

Realisasi kegiatan fisik telah terlaksana namun realisasi keuangan belum GU

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan penanaman modal, sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan / pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2022.

Malili, 25 Juli 2022

Kabid Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan



SAINAB SAMARING, S.Kom
NIP. 197501172006042016

**KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL
(DANA DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2022)**

Lampiran foto kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PENGAWASAN
PENANAMAN MODAL**

A. LATAR BELAKANG

DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, nomor 8 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik Fasilitasi penanaman modal Tahun Anggaran 2022

B. TUJUAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi pengawasan penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota meliputi antara lain :

1. analisa dan Verifikasi Data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha melalui Rapat
 2. inspeksi lapangan
 3. evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha
- Pelaksanaan pengawasan Penanaman Modal dilakukan sesuai dengan Peraturan BKPM mengenai pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko

C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Nomor 8 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun anggaran 2022;

**KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
(DANA DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2022)**

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan anggaran kas dan target kinerja yang telah ditetapkan, bahwa untuk pelaksanaan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Penanaman Modal pada triwulan II adalah . 3 kegiatan usaha

E. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi pengawasan penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota yang ditetapkan pada triwulan II telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan;

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi kegiatan usaha PMDM dan UKM yang di Awasi}}{\text{Target yang di Awasi}} \times 100\% \\ &= \frac{3 \text{ Kegiatan Usaha}}{3 \text{ Kegiatan Usaha}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

**KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
(DANA DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2022)**

2. Adapun capaian prosentase realisasi keuangan sampai dengan triwulan II (dua) yaitu :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Keuangan}}{\text{Target Realisasi Keuangan}} \times 100 \% \\ &= \frac{\text{Rp } 28.351.700}{\text{Rp. } 33.079.690} \times 100 \% \\ &= 85,71 \% \end{aligned}$$

F. KENDALA DAN HAMBATAN

Adapun kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran sesuai anggaran kas triwulan II (dua) yaitu :

Secara umum pelaksanaan kegiatan untuk triwulan II (dua) telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan wajib disesuaikan dengan petunjuk teknis.

**KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
(DANA DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2022)**

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi pengawasan penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota, sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022

Malili, 25 Juli 2022

Kabid Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan

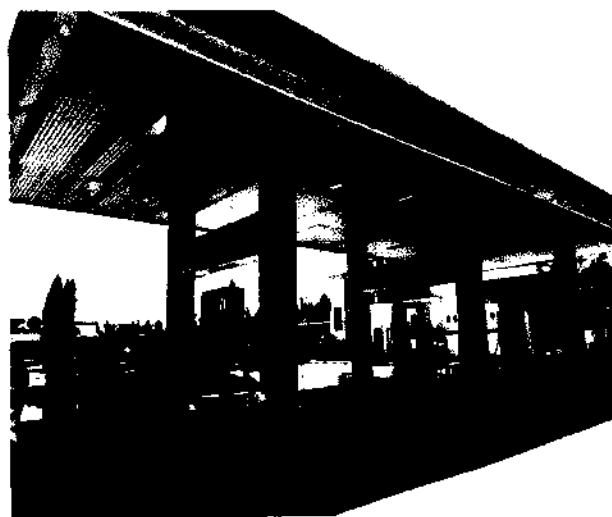


SAINAB SAMARING, S.Kom
NIP. 197501172006042016

**KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
(DANA DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2022)**

Lampiran Foto Pengawasan kegiatan usaha

- 1. Kegiatan Usaha SPBU KBLI**
- 2. Kegiatan Usaha Perumahan KBLI**
- 3. Kegiatan Usaha UKM**



PT.CUPUMANIK



PT.RISTON BUMI MAHARDIKA



PT.ALIMAS REYHAN MANDIRI



PT.DAFFA SAPUTRA JAYA



PT.NUSANTARA INDO PROPERTI





LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TIMUR**

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan ridho- Nya Laporan Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan III Tahun 2022 ini dapat selesai. Laporan Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan III Tahun 2022 merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan dan terkompilasi dari lingkup Sekretariat, Bidang, Kasubag/ Seksi.

Laporan Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan III Tahun 2022 ini berisi informasi kinerja pelayanan dan non pelayanan yang telah dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Diharapkan Laporan Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan III Tahun 2022 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat.

Kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga Laporan Triwulan III Tahun 2022 dapat memberikan manfaat yang sebagaimana mestinya.

Malili, 10 Oktober 2022

KEPALA DPM-PTSP,



ANDI HABIL UNRU, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 198703 1 208

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

DAFTAR ISI

Perihal	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	
2.1 Tujuan	5
2.2 Ruang Lingkup	8
BAB III PERJANJIAN KINERJA	
BAB IV REALISASI KINERJA	
3.1 Eselon III	13
BAB V REALISASI KEUANGAN	
BAB VI PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui kegiatan evaluasi ini maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui.

Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian sosial untuk secara sistematis menginvestigasi efektifitas program/menilai kontribusi program terhadap perubahan (goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi). Konsep Dasar Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu atau setelah suatu kegiatan telah berlalu. Mencakup antara lain :

- a. Penilaian atas dampak kolektif — baik positif maupun negatif — dari semua (atau sebagian besar) kegiatan yang telah dilakukan, pada lokasi dan/atau kelompok sasaran yang berbeda-beda.
- b. Deskripsi keluaran dan hasil/manfaat sebagaimana dilihat dari sudut pandang penerima manfaat.

Jenis Evaluasi Tergantung keperluan dilakukan pada titik-titik berbeda dalam siklus program/proyek. Ada evaluasi proses yang berfokus pada mutu penyampaian pelayanan, ada evaluasi biaya-manfaat dan ada evaluasi dampak. Evaluasi formatif dilakukan pada waktu program/kegiatan berjalan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada saat program/kegiatan sudah berakhir, dengan tujuan untuk mengukur dampak serta menghimpun pelajaran/pengalaman yang berguna. Terdapat dua jenis evaluasi yang perlu kita pertimbangkan :

1. Evaluasi atas Proses.

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

Evaluasi atas proses, jenis evaluasi ini berfokus pada apa yang telah dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang menjadi penerima manfaat, serta apa respons mereka terhadap kegiatan program. Jenis evaluasi ini didasarkan pada laporan-laporan monitoring dan penelaahan atas dokumen-dokumen program, wawancara serta kunjungan lapangan. Jenis evaluasi ini relatif lebih mudah dilakukan dan sangat berguna bila laporan atau umpan balik dari lapangan menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan, pengeluaran biaya yang melampaui anggaran dan ada keluhan dari penerima manfaat atau persoalan dalam pengelolaan program.

Oleh karena itu Evaluasi Internal pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu sangat diperlukan guna memonitor dan mengevaluasi kegiatan yang ada sehingga diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan maupun kebijakan di tahun-tahun yang akan datang.

2. Evaluasi Dampak

Evaluasi dampak, jenis evaluasi ini berusaha mengungkapkan siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya; dengan kata lain, sejauh mana hasil/manfaat (dan dampak) yang diharapkan telah tercapai. Jenis evaluasi ini bisa saja cukup mahal bila kelompok sasaran besar sekali atau bila kita harus membuat perbandingan dengan kelompok-kelompok masyarakat di luar program. Evaluasi harus dirancang sesuai dengan sumber daya yang kita miliki sehingga kita mengetahui sejauh mana program telah menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan status kesehatan atau pendidikan, atau manfaat lain bagi wilayah atau kelompok masyarakat sasaran. Kedua jenis evaluasi itu, perlu dibuat penilaian kembali berdasarkan asumsi dasar dan rancangan program (suatu hal yang relatif tidak sering dilakukan). Faktanya adalah bahwa banyak program/kegiatan (dan kebijakan) gagal mencapai hasil yang diinginkan karena asumsi-asumsi dasar dan rancangan program itu sendiri tidak benar.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

2.1 Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Triwulan III Tahun 2022 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 kepada stakeholder guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 dan bagaimana proses pencapaiannya.

2.2. Ruang Lingkup

Secara geografis Kabupaten Luwu Timur yang sebahagian wilayahnya dikelilingi oleh gugusan pegunungan dan pesisir Laut Teluk Bone serta kondisi masyarakat yang heterogen sangat memungkinkan akan terjadinya potensi bencana alam maupun bencana sosial, sehingga Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mempunyai komitmen dalam memberikan perlindungan pada masyarakat terhadap ancaman bencana tersebut, sehingga dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan PERDA tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

Berdasarkan *PERDA* tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut

Tugas : Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah,

Fungsi :

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, dibidang pelayanan terpadu satu pintu, dibidang pengendalian, pengawasan dan Pengaduan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi.
- Pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dipimpin oleh Kepala Dinas (Eselon II) dan terdiri atas :

- Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Keuangan;
 2. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- Bidang Penanaman Modal
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

Tabel. 1

Jumlah Pegawai dan upahjasa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

	Sekretariat	3	7	-	8	-	18
	Bidang Penanaman Modal	-	1	-	2	2	5
	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	2	-	9	-	11
	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	-	3	1	2	-	6
		3	13	1	21	2	40

Tabel. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

	Sekretariat	-	1	3	2	6
	Bidang Penanaman Modal	-	-	3	1	4
	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1	3	1	5
	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	-	-	4	1	5
		0	2	13	5	20

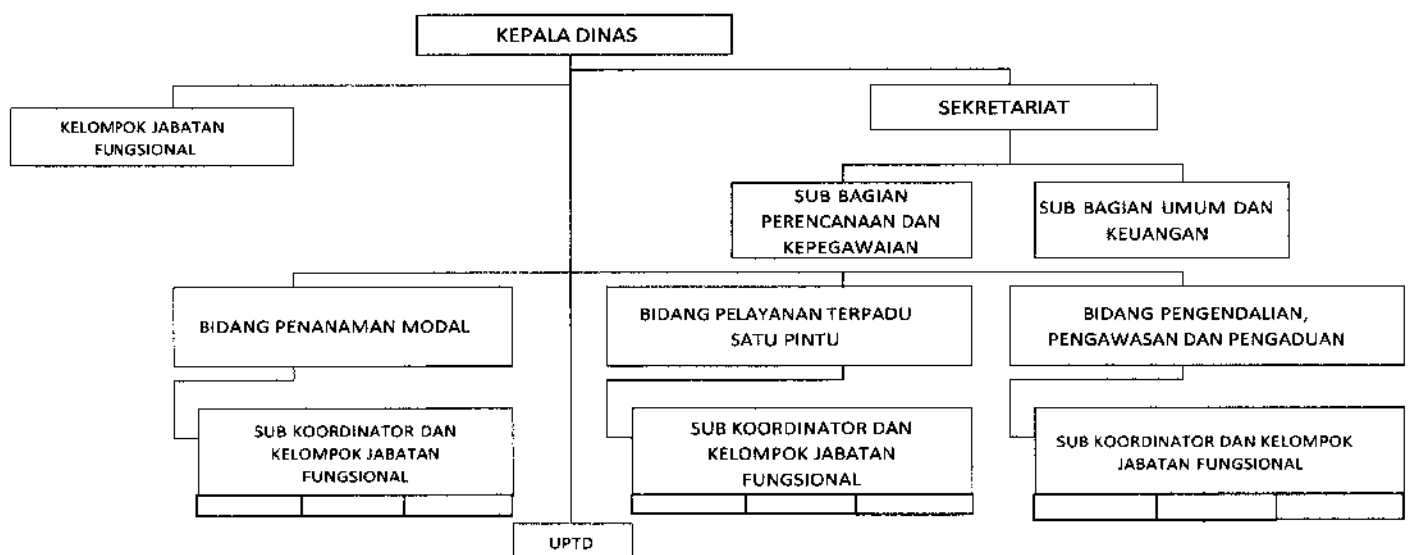
LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

Tabel 3
Klasifikasi Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselonisasi

	Eselon II	1
	Eselon III	4
	Eselon IV	2
	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	9
	Fungsional Pelaksana (Staf)	4
	Jumlah	20

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2022



LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

BAB III

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

3.1 Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Dokumen Renstra DPMPTSP 2021-2026 mengacu kepada RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

"Nilai Agama dan Budaya"

Misi Ke-2 RPJMD :

"Keterbukaan dan Transparansi"

Misi Ke-4 RPJMD :

"Konsolidasi kepemimpinan dan koordinasi lintas sektor"

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah;

urusan perangkat daerah.

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2022. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Peranagkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki target kinerja dan anggaran maka Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 6 Program dan 15 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang ditertuang pada perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV sebagai berikut :

Tabel.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	3.300.000.000.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata lama penyelesaian perizinan usaha	72,00
3.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
a. Bidang Penanaman Modal			
I.	Meningkatnya Investor PMA/PMDN yang berskala Nasional	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	33 Investor
II.	Meningkatnya Nilai realisasi Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMA Jumlah Investasi PMDN	2,5 Triliun 800 Milyar
b. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
1.	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu	100%
2.	Tersedianya data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan	Database Penanaman Modal yang Valid	1 Dokumen
c. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan			
1.	Terlaksananya kegiatan Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pelaku usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait Penanaman Modal	75 %

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

d. Sekretariat

- | | | | |
|----|--|--|--------|
| 1. | Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 92,01% |
|----|--|--|--------|

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
a. Bidang Penanaman Modal			
1.	Terwujudnya Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal	Persentase PMA/PMDn yang terfasilitasi	100%
2.	Terwujudnya Peta Potensi Investasi	Persentase jenis potensi yang disusun dalam peta potensi Kabupaten	100 %
3.	Terwujudnya Promosi Penanaman Modal	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan	5 MoU
b. Bidang Pelayanan Penanaman Modal			
1.	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu	100%
2.	Terwujudnya Pengolahan serta penyajian data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	- Persentase Data dan informasi Penanaman Modal yang dikelola	100%
c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
1.	Terwujudnya peningkatan nilai Realisasi Investasi	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	90%
d. Sekretariat			
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%
2.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
3.	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%
4.	Terlaksananya realisasi Pendapatan Asli Daerah Perangkat Daerah	Persentase Realisasi pendapatan perangkat daerah	100%
5.	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
6.	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
7.	Terpenuhinya kebutuhan	Persentase BMD-Perangkat	100%

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

	barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Daerah penunjang yang terpenuhi	
8.	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
9.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
a.	Bidang Penanaman Modal		
1.	Tersedianya Kebijakan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda PM yang terbit	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Evaluasi Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi PM yang tersedia	2 Dokumen
3.	Tersusunnya Peta Potensi	Jumlah Peta Potensi yang tersedia	1 Dokumen
4.	Tersusunnya Strategi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi yang dibuat	3 Dokumen
5.	Terlaksananya Pameran Promosi penanaman Modal	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	2 Event
b.	Bidang Pelayanan terpadu Satu Pintu		
		- Jumlah Izin yang diterbitkan tepat waktu	4.100 Izin
1.	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik	Jumlah Pemilik Usaha (Perempuan) yang diterbitkan izinnya	1.250 Izin
2.	Terlaksananya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	5 Pengaduan
3.	Tersedianya data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Data yang disediakan	2 Dokumen
c.	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan		
		-	
1.	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya	8 Kegiatan
2.	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti BIMTEK	217 Pelaku Usaha
3.	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi	14 Kegiatan
d.	Sekretariat		

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

1.	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen
3.	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
4.	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen
5.	Tersedianya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen
6.	Terlaksananya realisasi Pendapatan Asli Daerah Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen
7.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	12 Dokumen
8.	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	13 Orang
9.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	15 Jenis
10.	Tersedianya Peralatan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang diadakan	1 Paket
11.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga untuk kebutuhan kantor	Jumlah Peralatan rumah tangga Yang diadakan	1 Paket
12.	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 Jenis
13.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis
14.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60 Exempler
15.	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	120 Orang
16.	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	274 Kali
17.	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	1 Unit
18.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit
19.	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasi	900 Surat
20.	Terbayarnya rekening bulanan	Jumlah rekening telepon, listrik	60 Rekening

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

	telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	dan air yang terbayarkan	
21.	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	4 Orang
22.	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara	9 Unit
23.	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47 Unit
24.	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit
25.	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	21 Orang
26.	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 Dokumen

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

BAB IV

REALISASI KINERJA

Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan III Tahun 2022 dilaksanakan secara berjenjang yang dilakukan Kepala Dinas (Eselon II) ke Sekretaris dan Kepala bidang (Eselon III) kemudian Eselon III mengevaluasi setiap Kasubag dan Kasie dilingkup bidang masing-masing.

Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan III Tahun 2022 Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut :

4.1 EVALUASI YANG DILAKUKAN KEPALA DINAS (ESELON II) KE SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG (ESELON III)

A. SEKRETARIS

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan untuk sekretaris dinas ada 1 Program yang dilakukan pada triwulan ke III dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase rata- rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran (persen). Target yang ditetapkan pada triwulan III sebesar 25 % terealisasi 20,76 % dengan capaian kinerja secara keseluruhan dari TW I, TW II ,TW III dan TW IV sebesar 100 % dengan rincian capaian :

No	Kegiatan	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 %	Sangat Baik
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	23 %	Baik
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	25 %	Sangat Baik
4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	25 %	Sangat Baik

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 %	Sangat Baik
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	23 %	Baik
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 %	Buruk
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20,1%	Baik

Capaian kinerja program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,76 %, dari target 25 %. Hal tersebut disebabkan karena adanya kegiatan yang realisasinya rendah, yaitu Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

B. KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

Hasil evaluasi yang dilakukan untuk Kepala Bidang Penanaman Modal ada 2 Program yang dilakukan pada triwulan ke III dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator kinerja pada program ini adalah Jumlah Investor PMA dan PMDN. Target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu sebanyak 7 Investor dan terealisasi sebanyak 9 Investor dengan capaian kinerja 128,57 %.

2. Program Promosi Penanaman Modal.

Indikator kinerja pada program ini adalah Jumlah realisasi PMA dan PMDN . Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu Rp 825.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 874.274.038.189,- dengan capaian kinerja 105,97 %.

C. KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Hasil evaluasi yang dilakukan untuk Kepala Bidang Pelayanan terpadu Satu Pintu ada 2 Program yang dilakukan pada triwulan ke III dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Ketepatan Waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP. Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu sebanyak 72 % dan terealisasi sebanyak 75,91 % dengan capaian kinerja 105,43 %.

2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Indikator kinerja pada program ini adalah Jumlah Jumlah Database penanaman Modal yang valid . Target yang ditetapkan pada triwulan III tidak ada. Target kinerja dihitung pada akhir Tahun (Tw.4) karena berupa Dokumen.

D. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN

Hasil evaluasi yang dilakukan untuk Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan ada 1 Program yang dilakukan pada triwulan ke III dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Pelaku Usaha yang Taat terhadap Peraturan yang terkait Penanaman Modal. Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu sebanyak 20 % dan terealisasi sebanyak 20 % dengan capaian kinerja 100 %.

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

LAPORAN TRIWULAN III

SEKRETARIAT



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui kegiatan evaluasi ini maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui.

Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian social untuk secara sistematis menginvestigasi efektifitas program/menilai kontribusi program terhadap perubahan (goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi). Konsep Dasar Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu atau setelah suatu kegiatan telah berlalu. Mencakup antara lain:

- a. Penilaian atas dampak kolektif - baik positif maupun negatif – dari semua (atau sebagian besar) kegiatan yang telah dilakukan, pada lokasi dan/atau kelompok sasaran yang berbeda-beda.
- b. Deskripsi keluaran dan hasil/manfaat sebagaimana dilihat dari sudut pandang penerima manfaat.

Jenis Evaluasi Tergantung keperluan dilakukan pada titik-titik berbeda dalam siklus program/proyek. Ada evaluasi proses yang berfokus pada mutu penyampaian pelayanan, ada evaluasi biaya-manfaat dan ada evaluasi dampak. Evaluasi formatif dilakukan pada waktu program/kegiatan berjalan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada saat program/kegiatan sudah berakhir, dengan tujuan untuk mengukur dampak serta menghimpun pelajaran/pengalaman yang berguna. Terdapat dua jenis evaluasi yang perlu kita pertimbangkan :

- (1) Evaluasi atas Proses.

Evaluasi atas proses, jenis evaluasi ini berfokus pada apa yang telah dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang menjadi penerima manfaat, serta apa respons mereka

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

terhadap kegiatan program. Jenis evaluasi ini didasarkan pada laporan-laporan monitoring dan penelaahan. Atas dokumen-dokumen program, wawancara serta kunjungan lapangan. Jenis evaluasi ini relative lebih mudah dilakukan dan sangat berguna bila laporan atau umpan balik dari lapangan menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan, pengeluaranbiaya yang melampaui anggaran dan ada keluhan dari penerima manfaat atau persoalan dalam pengelolaan program.

Oleh karena itu Evaluasi Internal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat diperlukan guna memonitor dan mengevaluasi kegiatan yang ada sehingga diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan maupun kebijakan di tahun- tahun yang akan datang.

(2). Evaluasi Dampak.

Evaluasi dampak, jenis evaluasi ini berusaha mengungkapkkan siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya; dengan kata lain, sejauh mana hasil/manfaat (dan dampak) yang diharapkan telah tercapai. Jenis evaluasi ini bisa saja cukup mahal bila kelompok sasaran besar sekali atau bila kita harus membuat perbandingan dengan kelompok-kelompok masyarakat di luar program. Evaluasi harus dirancang sesuai dengan sumberdaya yang kita miliki sehingga kita mengetahui sejauh mana program telah menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan status kesehatan atau pendidikan, atau manfaat lain bagi wilayah atau kelompok masyarakat sasaran. Kedua jenis evaluasi itu, perlu dibuat penilaian kembali berdasarkan asumsi dasar dan rancangan program (suatu hal yang relative tidak sering dilakukan). Faktanya adalah bahwa banyak program/kegiatan (dan kebijakan) gagal mencapai hasil yang diinginkan karena asumsi-asumsi dasar dan rancangan program itu sendiri tidak benar.

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

II.1. Tujuan

- a. Tersajinya gambaran kegiatan yang telah dilakukan di Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBD. Dalam bentuk data dan informasi pada periode tertentu setiap triwulan.
- b. Diperolehnya gambaran situasi kegiatan yang telah dilakukan di Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan oleh masing- masing satuankerja
- c. Tersedianya data dan informasi untuk bahan menentukan kebijakan.

II.2. Ruang Lingkup

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan dalam bentuk rapat. Materi yang dibahas capaian realisasi keuangan dan kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam perjanjian kinerja.

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

BAB III

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Bagian Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami pergeseran/perubahan target kinerja dan anggaran maka Sekretariat melaksanakan 1 Program dan 9 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang ditertuang pada perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV sebagai berikut :

Tabel. 1. PERJANJIAN KINERJA ESELON III

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET ANGGARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG			
1 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran (persen)	2.952.150.464	25 %
1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu (dok)	51.193.060	2
2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (persen)	2.364.406.606	25 %
3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan (%)	14.231.981	25 %

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah (rupiah)	8.313.710	600 Juta
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (Persen)	68.185.966	25 %
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (persen)	256.480.200	25 %
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)	10.168.750	2 Paket
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (persen)	115.407.401	25 %
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (unit)	63.762.800	23

Tabel. 2. PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	TARGET KINERJA
1		2	3	4
Kasubag Umum dan Keuangan				
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan (orang)	2.294.206.606	21 Orang
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	70.200.000	3 Dokumen

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	14.231.981	1 Dokumen
4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	8.313.710	1 Dokumen
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	4000.000	3 Jenis
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang diadakan	2.784.600	1
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga Yang diadakan	3000.000	1
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan (jenis)	6.112.000	2 Jenis
9	Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10.200.000	4 Jenis
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1.530.000	15 Exemplar
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	6.000.000	30 Orang
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (unit)	3.168.750	1 Paket
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	7.000.000	1 Paket
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	17.900.000	100 Surat

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	43.507.401	15 Rekening
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	18.000.000	4 Orang
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	12.000.000	9 Unit
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	3.000.000	5 Unit
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi (unit)	13.112.800	1 Paket

Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen)	27.667.700	1 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2.374.860	1 Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2.700.000	0 Dokumen
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	18.450.500	1 Dokumen
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	56.000.000	3 Orang

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	1.400.000	4 Dokumen
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu)	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang)	6.000.000	30 orang

BAB IV

REALISASI KINERJA

Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan III Tahun 2022 dilaksanakan secara berjenjang yang dilakukan Kepala Dinas (Eselon II) ke Sekretaris (Eselon III) kemudian Eselon III mengevaluasi setiap Kasubag dibagian Sekretariat lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Evaluasi Atas Rencana Aksi pada Triwulan III Tahun 2022 bagian Sekretariat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

IV.1 EVALUASI YANG DILAKUKAN SEKRETARIS DINAS (ESELON III) KE KASUBAG (ESELON IV)

Hasil Evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan pada triwulan ke III dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan ada 19 Sub kegiatan sebagai berikut :

1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan (orang), Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 21 Orang realisasi 20 Orang dengan capaian kinerja 95 %, karena 1 Jabatan Pejabat Pemeriksa keuangan (PPK) masih kosong.

1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen dengan capaian kinerja 100 %.

1.3. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 1 dokumen realisasi 1 dokumen dengan capaian kinerja 100 %.

1.4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 1 Dokumen, terealisasi 1 Dokumen ,dengan capaian kinerja 100%.

1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis), Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 3 Jenis, terealisasi 3 Jenis, yaitu belanja penggantian Bahlam lampu 19 W, Kabel Colokan 35 M dengan capaian kinerja 100 %.

1.6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan (jenis), Target kegiatan pada Triwulan III sebanyak 2 paket tetapi pengadaannya belum direalisasikan karena dipersiapkan untuk dihilangkan pada perubahan.

1.7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan rumah tangga yang diadakan (jenis), Target kegiatan direncanakan pada Triwulan III tetapi pengadaannya belum direalisasikan karena dipersiapkan untuk dihilangkan pada perubahan.

1.8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan (jenis) Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 3 Jenis, terealisasi 3 Jenis, dengan capaian kinerja 100 %.

1.9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis), Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 4 Jenis, terealisasi 4 Jenis antara lain cetak spanduk, jilid, fotocopy dan cetak stempel, dengan capaian kinerja 100 %.

1.10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar) Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 15 exemplar, terealisasi 15 exemplar, Jenis bacaan yang diadakan yaitu Koran Palopo Pos, Tribun Timur, dan Upeks, Kompas, Radar dengan capaian kinerja 100 %.

1.11. Fasilitas Kunjungan Tamu.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang) Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 30 Orang, terealisasi 15 Orang, dengan capaian kinerja 50%.

1.12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (unit), Target kegiatan direncanakan pada Triwulan II.

1.13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (unit), Target kegiatan direncanakan pada Triwulan III.

1.14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat), Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 400 Surat , terealisasi 168 Surat dengan capaian kinerja 42 %.

1.15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening), Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 15 rekening, terealisasi 15 rekening, Rekening terdiri dari 3 rekening PDAM, 3 rekening Listrik untuk Kantor, 6 rekening pulsa prabayar, 3 rekening TV Kabel.

1.16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang), Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 4 Orang , terealisasi 4 Orang dengan capaian kinerja 100 %.

1.17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit), Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 9 Unit , terealisasi 6 Unit, Dengan capaian kinerja 66,67 %.

1.18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit), Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 10 Unit , terealisasi 10 Unit dengan capaian kinerja 100 %.

1.19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit), Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 1 Gedung kantor, terealisasi 1 gedung, dengan capaian kinerja 100 %.

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

Kegiatan yang dilakukan oleh Sub Bagian Perencanaan ada 7 Sub kegiatan sebagai berikut :

2.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan III sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau sebesar 100%.

2.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan III sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau sebesar 100%.

2.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan III tidak ada.

2.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen), Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 2 dokumen, terealisasi 2 dokumen dengan capaian kinerja 100%.

2.5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang) Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 3 Orang, terealisasi 3 Orang, dengan capaian kinerja 100 %.

2.6. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen) Target yang

2.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali) Target yang ditetapkan pada triwulan III yaitu 80 Kali, terealisasi 78 Kali, dengan capaian kinerja 97,50 %.

BAB V

REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan bagian Sekretariat lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Triwulan III Tahun 2022 di sajikan pada Tabel berikut:

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.952.150.464	2.333.641.854	618.508.610
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.193.060	41.969.000	9.224.060
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.364.406.606	1.846.366.562	518.040.044
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	14.231.981	7.000.000	7.231.981
4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	8.313.710	7.242.000	1.071.710
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.185.956	38.355.000	29.830.956
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.480.200	240.042.012	16.438.188
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.168.750	6.982.000	3.168.750
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.762.800	46.693.600	17.069.200
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.762.800	46.693.600	17.069.200
Jumlah		2.952.150.464	2.333.641.854	618.508.610
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN			79,05 %	

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Sub Kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Sekretariat Pada Triwulan III disajikan pada Tabel berikut :

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN 3 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 September 2022	SELISIH
1	2	3	4	5	6 (4-5)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.376.376.433,00	2.952.150.464,00	2.333.641.854,00	618.508.610,00
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.294.735,00	51.193.060,00	41.989.000,00	9.224.060,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.748.010,00	27.667.700,00	23.320.000,00	4.347.700,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.414.860,00	2.374.860,00	1.000.000,00	1.374.860,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4.162.965,00	2.700.000,00	1.800.000,00	900.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.968.900,00	18.450.500,00	15.849.000,00	2.601.500,00
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.646.150.513,00	2.364.406.606,00	1.846.366.562,00	518.040.044,00
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.549.118.503,00	2.294.206.606,00	1.781.618.562,00	512.588.044,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	97.032.010,00	70.200.000,00	64.748.000,00	5.452.000,00
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.781.981,00	14.231.981,00	7.000.000,00	7.231.981,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.781.981,00	14.231.981,00	7.000.000,00	7.231.981,00
04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.623.710,00	8.313.710,00	7.242.000,00	1.071.710,00
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.623.710,00	8.313.710,00	7.242.000,00	1.071.710,00
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.615.956,00	68.185.956,00	38.355.000,00	29.830.956,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.985.956,00	12.185.956,00	4.640.000,00	7.545.956,00

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.832.250,00	4.000.000,00	2.153.000,00	1.847.000,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.784.600,00	2.784.600,00	0,00	2.784.600,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.710.700,00	6.112.000,00	3.422.000,00	2.690.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.675.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.120.000,00	4.590.000,00	4.180.000,00	410.000,00
07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.816.000,00	219.793.600,00	213.587.012,00	6.206.588,00
08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.168.750,00	10.168.750,00	6.982.000,00	3.186.750,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.168.750,00	3.168.750,00	0,00	3.168.750,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	6.982.000,00	18.000,00
09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.889.438,00	115.407.401,00	98.991.680,00	16.415.721,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.879.570,00	17.900.000,00	13.400.000,00	4.500.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.009.868,00	43.507.401,00	37.591.680,00	5.915.721,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00	54.000.000,00	48.000.000,00	6.000.000,00
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.912.800,00	63.762.800,00	46.693.600,00	17.069.200,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.650.000,00	35.650.000,00	20.835.600,00	14.814.400,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.150.000,00	15.000.000,00	12.750.000,00	2.250.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.112.800,00	13.112.800,00	13.108.000,00	4.800,00
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	450.076.460,00	450.076.460,00	216.362.251,00	282.958.209,00
	Penetapan Pemberian	278.541.420,00	278.541.420,00	208.412.251,00	119.373.169,00

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

1.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	231.407.130,00	231.407.130,00	171.755.400,00	108.465.730,00
2.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	47.134.290,00	47.134.290,00	36.656.851,00	10.907.439,00
	Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/Kota	171.535.040,00	171.535.040,00	7.950.000,00	163.585.040,00
1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	171.535.040,00	171.535.040,00	7.950.000,00	163.585.040,00
C.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	188.444.480,00	184.916.980,00	119.217.228,00	72.089.980,00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	188.444.480,00	184.916.980,00	119.217.228,00	72.089.980,00
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	22.638.490,00	19.110.990,00	13.082.500,00	6.145.990,00
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	165.805.990,00	165.805.990,00	106.134.728,00	65.943.990,00
D.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	307.191.107,00	258.728.630,00	214.553.780,00	51.241.072,00
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	307.191.107,00	258.728.630,00	214.553.780,00	51.241.072,00
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	286.870.777,00	238.408.300,00	206.015.700,00	39.543.822,00
2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.320.330,00	20.320.330,00	8.538.080,00	11.697.250,00
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	417.091.801,00	378.248.141,00	218.403.400,00	98.333.988,00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	417.091.801,00	378.248.141,00	218.403.400,00	98.333.988,00
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	102.921.550,00	102.921.550,00	59.524.000,00	59.886.200,00

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	98.788.490,00	97.738.490,00	69.100.400,00	13.343.787,00
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	29.999.850,00	25.660.015,00	25.180.337,00	18.378.843,00
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.999.850,00	25.660.015,00	25.180.337,00	18.378.843,00
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	29.999.850,00	25.660.015,00	25.180.337,00	18.378.843,00
TOTAL BELANJA		4.769.180.131,00	3.490.921.676,00	4.249.780.690,00	3.127.358.850,00

PENUTUP

Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan III Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur triwulan III Tahun 2022.

Rata-rata persentase pencapaian pengukuran indikator kinerja sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur adalah 70,95 %. DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur mendapatkan alokasi anggaran pada triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 3.490.921.676,00,-, terealisasi sebesar Rp. 1.925.907.938,00,- atau 40,38%. Hasil evaluasi capaian kinerja ini penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan selanjutnya.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Triwulan III Tahun 2022 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

Malili, 10 Oktober 2022
KEPALA DINAS,



ANDI HABIL UNRU, SE
NIP. 19641231 198703 1 208
Pangkat : Pembina Tk.I

LAPORAN TRIWULAN III
BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu dan satu tempat. Dimana fungsi utamanya adalah melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal dengan sasaran terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional, berintegritas dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 penyelenggaraan PTSP bertujuan :

- Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
- Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima.
- Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah pelayanan perizinan, mempersingkat birokrasi dan mewujudkan komitmen DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur dengan memberikan pelayanan perizinan yang prima yaitu pemberian pelayanan yang sederhana, cepat, mudah, murah dan transparan melalui pelayanan online, pelayanan langsung ke masyarakat maupun pelayanan offline dalam kantor.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Keputusan kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Nomor 01/I/Tahun 2022 tanggal 01 Januari 2022 tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, maka diperjanjikan 2 Program, 2 Kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

- I) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 286.870.777,00.
2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 20.320.330,00.

- II) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebesar Rp. 29.999.850,00.

BAB III REALISASI KINERJA

Berdasarkan Evaluasi atas Rencana Aksi pada Triwulan I Tahun Anggaran Tahun 2022 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Target yang ditetapkan untuk triwulan III sebesar 72%, terealisasi dengan capaian kinerja 100,48%

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100,96	Sangat Baik
2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100	Sangat Baik
Jumlah		200,96	
Realisasi Program		= 200,96/2 =100,48 %	Sangat Baik

Realisasi Program ini dihitung dengan formulasi :

Jumlah total capaian Kegiatan x 100

Jumlah Sub kegiatan yang mendukung Kegiatan

Capaian realisasi Program Pelayanan Penanaman Modal
100,48% dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sebesar 88,05%

Jumlah Pendaftaran izin = 1658

Jumlah izin terbit = 1674

Jumlah penyelesaian izin tepat waktu = 1271

Rata-rata penyelesaian Izin tepat waktu dihitung dari :

Jumlah izin tepat waktu x 100

Jumlah pendaftaran izin

= 1271 x 100

1674

= 75,93 %

Rata-rata Capaian Kinerja =

Rata-rata penyelesaian izin tepat waktu x 100

Target kinerja triwulan II

= 75,93 x 100

72

= 105,46 %

Rata-rata jumlah penyelesaian izin tepat waktu = 75,93%, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa izin yang belum terbit rekomendasi dan masih ada beberapa izin yang terlambat dicetak dikarenakan aplikasi maintenance.

Untuk jumlah izin terbit lebih banyak daripada jumlah pendaftaran yang ada di triwulan ke III dikarenakan ada beberapa izin dari triwulan II yang baru terbit di triwulan III dikarenakan keterlambatan penerbitan rekomendasi dari Tim teknis

Untuk capaian kinerja Kegiatan dihitung dengan formulasi :

Jumlah izin yang terbit x 100

Jumlah permohonan izin.

Capaian kinerja program Pelayanan Penanaman Modal 100,96 % dari target 72%, melebihi dari target.

- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah kabupaten/Kota dan target yang ditetapkan 100%, terealisasi 100 % dengan capaian kinerja 100%

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	0	Target pada tw IV
Jumlah		0	
Realisasi Program		= 0	Sangat Baik

Realisasi Kegiatan ini dihitung dengan formulasi :

- Jumlah total capaian Kegiatan x 100

Jumlah Sub kegiatan yang mendukung Kegiatan

Capaian realisasi Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 100% dari target 100%

Untuk capaian kinerja program dihitung dari jumlah data base penanaman modal yang valid, untuk target kinerjanya berada di triwulan ke IV, sehingga untuk triwulan ke II realisasi kinerja masih nol.

Capaian kinerja Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 100 % dari target 100%.

BAB IV

REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal dengan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota disajikan pada tabel berikut :

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	286.870.777	206.015.700	80.855.077
2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.320.330	8.538.080	11.782.250
Jumlah		307.191.107	214.553.780	92.637.327
Capaian Realisasi Keuangan			69,84 %	

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan kegiatan Pengelolaan data dan

Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota disajikan pada tabel berikut :

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	29.999.850	25.180.337	4.819.513
Jumlah		29.999.850	25.180.337	4.819.513
Capaian Realisasi Keuangan			83,93 %	

BAB V PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut :

PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
Pelayanan Penanaman Modal	100,48%	69,84%
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0%	83,93%

Capaian realisasi kinerja pada Program Pelayanan Penanaman Modal melebihi target, hal ini disebabkan karena adanya izin di Triwulan II yang baru terbit di Triwulan III. sementara untuk Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, target kinerja berada di triwulan ke IV.

Malili, 05 Oktober 2022

Kepada Bidang PTSP



Andi Rajuni, SE

NIP. 19820630 201001 2

LAPORAN TRIWULAN III
PENANAMAN MODAL



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III

A. LATAR BELAKANG

1. Kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sebagai upaya untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan kondusif bagi para investor;
2. Pemerintah Daerah sebagai regulator pelaksanaan investasi sangat penting untuk menyusun regulasi yang dapat menarik investasi;
3. Peraturan daerah ini akan menjadi acuan dalam memberikan kepastian hukum kepada para investor dalam melaksanakan investasi di Kabupaten Luwu Timur.

B. TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal tujuannya antara lain :

1. Untuk menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
2. Untuk menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penanaman Modal sebagai implementasi dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.



C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal sampai dengan triwulan 3 tahun anggaran 2022, telah dilaksanakan pembahasan draf rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko dan juga telah dilakukan kunjungan kerja baik dalam maupun



**KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMEBRIAN
FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL T.A. 2022**

luar provinsi. Saat ini tahapan prosesnya adalah menunggu jadwal pembahasan dan harmonisasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

E. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan yaitu pada triwulan III (tiga) telah tersusun naskah akademik rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penanaman Modal dan pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, sehingga hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir triwulan III (tiga) adalah 100 % (seratus persen).
2. Adapun capaian prosentase realisasi keuangan sampai dengan triwulan III (tiga) yaitu :

$$= \frac{\text{Realisasi Keuangan}}{\text{Target Realisasi Keuangan}} \times 100 \%$$

Rp 171.755.400,-

$$= \frac{\text{Rp 231.407.130,-}}{\text{Rp 231.407.130,-}} \times 100 \%$$

$$= 74,22 \%$$



**KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMEBRIAN
FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL T.A. 2022**

F. KENDALA DAN HAMBATAN

Adapun kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran sesuai anggaran kas triwulan III (tiga) yaitu :

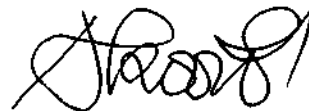
1. Adanya perubahan jadwal prolegda dari DPRD Kabupaten Luwu Timur, sehingga pembahasan prolegda tahap I yaitu Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko mengalami pergeseran. Hal ini berdampak pada daya serap anggaran perjalanan dinas yang telah dialokasikan pada triwulan II dan III.
2. Perubahan jadwal pembahasan prolegda tahap I, juga berdampak pada pembahasan prolegda tahap II yaitu rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penanaman Modal.

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan / pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2022.

Malili, 1 Oktober 2022

Kabid Penanaman Modal/PPTK



AYUB KOMBONG, S.T.,M.Si
NIP. 19750825 200502 1 006



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III

A. LATAR BELAKANG

1. Kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan investasi dilapangan;
2. Pemerintah Daerah sebagai regulator pelaksanaan investasi sangat penting untuk melakukan pemetaan terhadap hambatan – hambatan terhadap pelaksanaan investasi ;
3. Pemerintah Daerah harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi investor.

B. TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal tujuannya antara lain :

1. Untuk mengetahui implelementasi pelaksanaan kebijakan pemberian insentif investasi dilapangan;
2. Melakukan pemetaan terkait permasalahan/kendala yang dihadapim dan harapan dalam rangka pengembangan usahnya;
3. Sebagai bahan masukan dalam melakukan evaluasi dan perumusan kebijakan kemudahan dan insentif investasi di Kabupaten Luwu Timur;



C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan anggaran kas dan target kinerja yang telah ditetapkan, bahwa untuk pelaksanaan kunjungan / evaluasi akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2022.

E. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan triwulan III Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :



KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL T.A. 2022

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/incentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan sampai dengan triwulan III telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan;
2. Adapun capaian prosentase realisasi keuangan sampai dengan triwulan I (satu) yaitu :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Keuangan}}{\text{Target Realisasi Keuangan}} \times 100 \% \\ &\quad \text{Rp } 36.656.851,- \\ &= \frac{\text{Rp } 47.134.290,-}{\text{Rp } 47.134.290,-} \times 100 \% \\ &= 77,77 \% \end{aligned}$$

F. KENDALA DAN HAMBATAN

Adapun kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran sesuai anggaran kas triwulan III (tiga) yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan untuk triwulan III (tiga) telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran maka akan pelaksanaan kegiatan pada triwulan III (tiga) khususnya pelaksanaan kunjungan lapangan dan rapat evaluasi akan dimaksimalkan pelaksanaannya;
2. Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan akan melibatkan semua bidang lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.



**KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL T.A. 2022**

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan / pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2021.

Malili, 1 Oktober 2022

Kabid Penanaman Modal / PPTK



AYUB KOMBONG, S.T.,M.Si
NIP. 19750825 200502 1 006



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III

A. LATAR BELAKANG

1. Bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum menyusun dokumen produk unggulan daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. Dokumen produk unggulan daerah akan menjadi arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan potensi usaha yang layak untuk dilakukan kegiatan promosi dan temu bisnis;

B. TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota tujuannya antara lain :

1. Melakukan identifikasi, klasifikasi dan inventarisasi terhadap kondisi dan potensi ekonomi infrastruktur, demografi dan para pelaku usaha lingkup wilayah Kabupaten Luwu Timur;
2. Menjadi basis data dan informasi tentang kondisi dan potensi ekonomi, infrastruktur, demografi, dan para pelaku usaha berdasarkan sektor/kegiatan usaha masing-masing;



C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan anggaran kas dan target kinerja yang telah ditetapkan, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan seminar hasil akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2022. Saat ini penyusunan dokumen peta potensi daerah masih dalam tahap proses lelang di Bagian Pengadaan Barang / Jasa.



E. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan triwulan III Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota yang ditetapkan pada triwulan 3 telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan;
2. Adapun capaian prosentase realisasi keuangan sampai dengan triwulan III (tiga) yaitu :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Keuangan}}{\text{Target Realisasi Keuangan}} \times 100 \% \\ &= \frac{\text{Rp } 7.950.000,-}{\text{Rp } 10.500.000,-} \times 100 \% \\ &= 75,71 \% \end{aligned}$$

F. KENDALA DAN HAMBATAN

Adapun kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran sesuai anggaran kas triwulan III (tiga) yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan untuk triwulan III (tiga) telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran maka akan pelaksanaan kegiatan pada triwulan III (tiga) khususnya progres untuk pencairan kegiatan jasa konsultasi akan lebih dimaksimalkan;



2. Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan akan melibatkan semua bidang lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota, sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan / pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2023.

Malili, 1 Oktober 2022

Kabid Penanaman Modal / PPTK



AYUB KOMBONG, S.T., M.Si

NIP. 19750825 200502 1 006



LAPORAN TRIWULAN KETIGA KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memaksimalkan promosi dan meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Luwu Timur, maka dibutuhkan penyajian data yang akurat dan terbaru. Sehingga dibutuhkan untuk melakukan kegiatan promosi investasi ke calon investor agar potensi yang dimiliki suatu kabupaten dapat dilihat dan diketahui.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah untuk mempromosikan potensi yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur tahun 2022.

Tujuan yang diharapkan dalam Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah untuk memberikan gambaran kepada calon investor terkait potensi dan peluang investasi Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah terlaksananya keikutsertaan dalam kegiatan pameran investasi tahun anggaran 2022.

II. TARGET DAN TUJUAN

2.1 Target Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2022 **dengan Anggaran sebesar Rp.165.805.990,-**

Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pada kegiatan Promosi Penanaman Modal sebesar **Rp 106.134.728,-** atau sekitar **64.01 %** dan sisanya **Rp.59.671.262,-**

2.2 Target kinerja

Target kinerja dari Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah keikutsertaan pada satu event pameran.

2.3 Realisasi Kinerja

Pencapaian realisasi kinerja kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah pada Triwulan Ketiga (3) adalah terlaksana kegiatan pameran yang diselenggarakan di Jakarta.

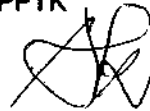
III. CAPAIAN

3.1 Capaian

Capaian Anggaran kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah 64.01 % dan capaian Kinerja pada triwulan tiga adalah 100%.

Malili, 01 Oktober 2022

PPTK



Ayub Kombong

Nip.19830528 200502 1 006

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memaksimalkan promosi dan meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Luwu Timur, maka dibutuhkan inovasi untuk memberikan informasi kepada calon investor terkait potensi yang dimiliki sebuah Kabupaten. Maka dalam hal ini kegiatan penyediaan dan penyebar luasan informasi merupakan solusi untuk memberikan gambaran potensi yang dimiliki oleh Kabupaten.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal adalah untuk mempromosikan potensi yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur tahun 2022

Tujuan yang diharapkan dalam kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal adalah untuk memberikan gambaran kepada calon investor terkait potensi dan peluang investasi Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal adalah terpublikasinya potensi dan peluang investasi yang dimiliki Kabupaten.

II. TARGET DAN TUJUAN

2.1 Target Anggaran

Pelaksanaan kegiatan kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPSTSP Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2022 dengan Anggaran sebesar Rp 22.638.490.

2.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pada kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal sebesar Rp 13.082.250,- atau sekitar 57,78 %.

2.3 Target kinerja

Target kinerja dari kegiatan penyediaan dan penyebar luasan informasi adalah Terpublikasinya potensi investasi daerah di tiga Media.

2.4 Realisasi Kinerja

Pencapaian realisasi kinerja kegiatan kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal pada Triwulan tiga (3) adalah terlaksananya satu publikasi potensi investasi pada media cetak.

III. CAPAIAN

3.1 Capaian

Capaian Anggaran kegiatan kegiatan penyediaan dan penyebar luasan informasi adalah 57,78 % dan capaian Kinerja triwulan pertama adalah 100 % .

Malili, 01 Oktober 2022

PPTK



Ayub Kombong

Nip.19830528 200502 1 006

LAPORAN TRIWULAN III
BIDANG PENGENDALIAN PENGAWASAN
DAN PENGADUAN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada saat ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, rencana tersebut biasanya dituangkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Program yang dilaksanakan dan telah dijabarkan dalam 3 (Tiga) kegiatan ini telah dilaksanakan namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut baik kendala teknis belum memadai. Untuk mendapatkan nilai yang maksimal perlu penekanan pelaksanaan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance, yang sejalan dengan Tugas pokok Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Pengaduan, pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, yaitu mengendalikan, mengawasi, membina, mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

Dengan tersusunnya laporan realisasi kegiatan pada Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dibidang Penanaman Modal.

Untuk Tahun 2022, Dinas PM dan PTSP Mendapatkan DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/ BKPM RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal T.A 2022 Sebesar 417.092.000

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan perjanjian kinerja Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, maka diperjanjikan kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten 3 Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal.

Dengan anggaran Rp. 102. 921. 550 dengan target 8 Kegiatan Usaha

2. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal dengan Anggaran Rp. 215. 381. 761 Dengan target 217 Pelaku Usaha
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal dengan Anggaran Rp. 98. 788. 490 Target 14 Kegiatan Usaha.

BAB III

REALISASI KINERJA

Berdasarkan Evaluasi atas rencana aksi pada Triwulan III Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sub kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman Modal , dengan anggaran Rp. 102. 921. 550 Dengan target 8 Kegiatan Usaha.

$$= \frac{\text{Realisasi Kegiatan Usaha telah dilakukan penyelesaian permasalahan}}{\text{Target pemantauan (kegiatan penyelesaian permasalahan)}} \times 100\%$$

$$= \frac{2 \text{ Kegiatan Usaha}}{2 \text{ Kegiatan Usaha}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal dengan anggaran Rp. 215. 381. 761 Dengan Target 217 Pelaku usaha.

$$= \frac{\text{Realisasi Pelaku Usaha Yang mengikuti Sosialisasi/ BIMTEK}}{\text{Target Pelaku Usaha untuk ikut sosialisasi/ BIMTEK}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ Pelaku Usaha}}{60 \text{ Pelaku Usaha}} \times 100\%$$

$$= 0$$

Realisasi untuk TW III, untuk Kegiatan Bimtek/Sosialisasi direncanakan pada Bulan Oktober Minggu ke IV Tahun 2022 dan ini disesuaikan dengan aliran kas pada Bidang Pengendalian, pengawasan dan pengaduan

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal dengan Anggaran Rp. 98. 788. 490 Target 14 Kegiatan Usaha

$$= \frac{\text{Realisasi kegiatan usaha PMDM dan UKM yang di Awasi}}{\text{Target yang di Awasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{4 \text{ Pelaku Usaha}}{4 \text{ Pelaku Usaha}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

REALISASI KEGIATAN TRIWULAN III

NO	SUB KEGIATAN	TARGET tw3	REALISASI	%
1.	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	2 KEGIATAN USAHA	2 KEGIATAN USAHA	100 %
2.	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan PM	4 PELAKU USAHA,-	4 PELAKU USAHA	100%
3	Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian PM	60 PELAKU USAHA	0 PELAKU USAHA	25 %
				75 %
	CAPAIAN REALISASI KEGIATAN			75 %

BAB IV

REALISASI KEUANGAN

Berdasarkan Evaluasi atas Rencana Aksi Pada Triwulan III Tahun
Anggaran 2022 :

NO	PROGRAM	ANGARAN	REALISASI	SELISIH
1.	Program Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kota	417.091.801	247.930.600	169.161.201
TOTAL		417.091.801	247.930.600	169.161.201
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN		59.44 %		

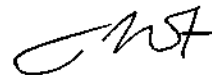
BAB V

PENUTUP

Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan pada Program Pengendalian Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
75 %	59,44 %

Malili, September 2022
Kepala Bidang



SAINAB SAMARING, S.KOM
Nip. 197501172006042016

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMANTAUAN
PENANAMAN MODAL (PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN
HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM
MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA)**

A. LATAR BELAKANG

1. DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2022
2. Pencapaian target realisasi penanaman modal melalui kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya.

B. TUJUAN

Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan penanaman modal (Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merelisasikan kegiatan usahanya tujuannya antara lain :

1. Identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usaha.
2. Penyelesaian permasalahan dan hambatan dilakukan melalui pertemuan secara tatap muka antara pelaku usaha, pemerintah, dan narasumber.
3. Evaluasi penyelesaian hambatan dan permasalahan.

C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Peraturan menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Nomor 8 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana alokasi khusus non fisik fasilitasi penanaman modal tahun anggaran 2022.

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan anggaran khas dan target kinerja yang telah ditetapkan, bahwa untuk pelaksanaan Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Penanaman Modal di TW III ini sebanyak 2 kegiatan usaha

E. REALISASI KINERJA

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan penanaman modal DAK Non Fisik yang ditetapkan pada Triwulan III adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi Kegiatan}}{\text{Target Kegiatan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{2 \text{ kegiatan usaha}}{2 \text{ kegiatan usaha}}$$

$$= 100 \%$$

F. KENDALA DAN HAMBATAN

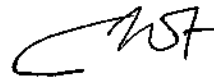
Terkait dengan kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran alhamdulillah dapat diminimalisir dengan menyesuaikan petunjuk yang ada.

G. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi kepada pelaku usaha sebagai Bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan/ pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2022.

Malili, September 2022

Kabid Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan



SAINAB SAMARING.S.KOM

NIP. 197501172006042016

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III KEGIATAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMBINAAN PENANAMAN MODAL (BIMBINGAN TEKHNIS/ SOSIALISASI)

A. LATAR BELAKANG

1. DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2022
2. Pencapaian target Realisasi Penanaman Modal melalui kegiatan bimbingan Teknis Kepada pelaku usaha PMDN dan UKM.

B. TUJUAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pembinaan tujuannya antara lain :

1. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha PMDN dan UKM.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis terkait dengan kegiatan pelaksanaan penanaman modal, meliputi
 - a. Bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko
 - b. Bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko. Yang meliputi : Laporan LKPM

C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang –undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal :
2. Peraturan menteri Investasi/ Kepala BKPM RI, Nomor 8 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun anggaran 2022;

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan anggaran khas dan target kinerja yang telah ditetapkan, bahwa untuk pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal pada Triwulan I s.d Triwulan IV tahun 2022, Sebanyak 8 kali kegiatan Bimbingan/Sosialisasi, dan target pelaku usaha di TW III ini sebanyak 60 pelaku usaha

E. REALISASI KINERJA

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. untuk pencapaian target kinerja kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan penanaman modal DAK Non Fisik yang ditetapkan pada Triwulan III belum dilaksanakan :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Kegiatan Bimtek/ Sosialisas}}{\text{Target Kegiatan Bimtek}} \times 100 \% \\ &= \frac{0}{60 \text{ pelaku usaha}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Penjelasan :

Realisasi untuk TW III masih 0, disebabkan

1. Aplikasi Pelaporan LKPM melalui OSS RBA utk Triwulan III, dibuka tertanggal 10 Oktober 2022 oleh Kementerian Investasi/BKPM
2. Sehingga Kegiatan Bimtek/Sosialisasi direncanakan pada Bulan Oktober Minggu ke III Tahun 2022 dan ini disesuaikan dengan aliran kas pada Bidang Pengendalian, pengawasan dan pengaduan

F. KENDALA DAN HAMBATAN

Terkait dengan kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran alhamdulillah dapat diminimalisir dengan menyesuaikan petunjuk yang ada.

G. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha sebagai Bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan/ pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2022.

Malili, September 2022

Kabid Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan



SAINAB SAMARING.S.KOM

NIP. 197501172006042016

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PENGAWASAN
PENANAMAN MODAL**

A. LATAR BELAKANG

1. DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2022
2. Pencapaian target realisasi penanaman modal melalui kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya.

B. TUJUAN

Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penanaman modal tujuannya antara lain :

1. Analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha.
2. Inspeksi lapangan.
3. Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha.

C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Peraturan menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Nomor 8 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana alokasi khusus non fisik fasilitas penanaman modal tahun anggaran 2022.

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, bahwa untuk pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal di TW III ini sebanyak 4 kegiatan usaha

E. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penanaman modal DAK Non Fisik yang ditetapkan pada Triwulan III adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi Kegiatan}}{\text{Target Kegiatan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{4 \text{ kegiatan usaha}}{4 \text{ kegiatan usaha}}$$

$$= 100 \%$$

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan kepada pelaku usaha sebagai Bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan/ pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2022.

Malili, September 2022

Kabid Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan



SAINAB SAMARING.S.KOM

NIP. 197501172006042016

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

BAB V

REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan lingkup Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Pada Triwulan III disajikan pada Tabel berikut :

REALISASI KEUANGAN SAMPAI TW.3

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2022

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN 2 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 Juni 2021	SELISIH
				(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.376.376.433,00	2.952.150.464,00	2.333.641.854,00	618.508.610,00
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.294.735,00	51.193.060,00	41.969.000,00	9.224.060,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.748.010,00	27.667.700,00	23.320.000,00	4.347.700,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.414.860,00	2.374.860,00	1.000.000,00	1.374.860,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.162.965,00	2.700.000,00	1.800.000,00	900.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.968.900,00	18.450.500,00	15.849.000,00	2.601.500,00
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.646.150.513,00	2.364.406.606,00	1.846.366.562,00	518.040.044,00
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.549.118.503,00	2.294.206.606,00	1.781.618.562,00	512.588.044,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	97.032.010,00	70.200.000,00	64.748.000,00	5.452.000,00
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.781.981,00	14.231.981,00	7.000.000,00	7.231.981,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.781.981,00	14.231.981,00	7.000.000,00	7.231.981,00

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.623.710,00	8.313.710,00	7.242.000,00	1.071.710,00
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.623.710,00	8.313.710,00	7.242.000,00	1.071.710,00
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.615.956,00	68.185.956,00	38.355.000,00	29.830.956,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.985.956,00	12.185.956,00	4.640.000,00	7.545.956,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	69.630.000,00	56.000.000,00	33.715.000,00	22.285.000,00
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	367.938.550,00	256.488.200,00	240.042.012,00	16.438.188,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.832.250,00	4.000.000,00	2.153.000,00	1.847.000,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.784.600,00	2.784.600,00	0,00	2.784.600,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.710.700,00	6.112.000,00	3.422.000,00	2.690.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.675.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.120.000,00	4.590.000,00	4.180.000,00	410.000,00
07	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.816.000,00	219.793.600,00	213.587.012,00	6.206.588,00
08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.168.750,00	10.168.750,00	6.982.000,00	3.186.750,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.168.750,00	3.168.750,00	0,00	3.168.750,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	6.982.000,00	18.000,00
09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.889.438,00	115.407.401,00	98.991.680,00	16.415.721,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.879.570,00	17.900.000,00	13.400.000,00	4.500.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.009.868,00	43.507.401,00	37.591.680,00	5.915.721,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00	54.000.000,00	48.000.000,00	6.000.000,00
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.912.000,00	63.762.000,00	46.693.600,00	17.069.200,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.650.000,00	35.650.000,00	20.835.600,00	14.814.400,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.150.000,00	15.000.000,00	12.750.000,00	2.250.000,00

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.112.800,00	13.112.800,00	13.108.000,00	4.800,00
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	450.076.460,00	450.076.460,00	216.362.251,00	233.714.209,00
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	278.541.420,00	278.541.420,00	208.412.251,00	70.129.169,00
1.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	231.407.130,00	231.407.130,00	171.755.400,00	59.651.730,00
2.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	47.134.290,00	47.134.290,00	36.656.851,00	10.477.439,00
	Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/Kota	171.535.040,00	171.535.040,00	7.950.000,00	163.585.040,00
1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	171.535.040,00	171.535.040,00	7.950.000,00	163.585.040,00
C.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	188.444.480,00	184.916.980,00	119.217.228,00	65.699.752,00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	188.444.480,00	184.916.980,00	119.217.228,00	65.699.752,00
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	22.638.490,00	19.110.990,00	13.082.500,00	6.028.490,00
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	165.805.990,00	165.805.990,00	106.134.728,00	59.671.262,00
D.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	307.191.107,00	258.728.630,00	214.553.780,00	44.174.850,00
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	307.191.107,00	258.728.630,00	214.553.780,00	44.174.850,00
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	286.870.777,00	238.408.300,00	206.015.700,00	32.392.600,00
2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.320.330,00	20.320.330,00	8.538.080,00	11.782.250,00
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	417.091.801,00	378.248.141,00	218.403.400,00	159.844.741,00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	417.091.801,00	378.248.141,00	218.403.400,00	159.844.741,00
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	102.921.550,00	102.921.550,00	59.524.000,00	43.397.550,00

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	215.381.761,00	177.588.101,00	89.779.000,00	87.809.101,00
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	98.788.490,00	97.738.490,00	69.100.400,00	28.638.090,00
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	29.999.850,00	25.660.015,00	25.180.337,00	479.678,00
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.999.850,00	25.660.015,00	25.180.337,00	479.678,00
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	29.999.850,00	25.660.015,00	25.180.337,00	479.678,00
TOTAL BELANJA		4.769.180.131,00	4.249.780.690,00	3.127.358.850,00	1.122.421.840,00

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

BAB VI

PENUTUP

Dalam rangka mensukseskan pembangunan di bidang Penanaman Modal Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2022, maka Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan berbagai upaya secara intensif untuk melakukan pengawasan melalui evaluasi terhadap kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan evaluasi ini mutlak diperlukan untuk mengawal pengelolaan anggaran yang profesional sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan capaian realisasi kinerja dan realisasi capaian keuangan maka diusulkan/direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat banyak Sub. kegiatan yang realisasi anggarannya diatas 20 % hal ini disebabkan oleh :
 - Sudah berjalannya pemantauan dan monitoring realisasi keuangan dan pencapaian target kinerja.
 - Sudah terbitnya SK TPP dan SK upah jasa sudah diberlakukan selama 1 tahun sehingga pembayaran tunjangan dan gaji upah jasa bias berjalan sesuai dengan waktu penetapan rencana kas.
 - Sudah berjalannya koordinasi pada masing-masing PPTK kegiatan.
2. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari 2 program yaitu pengembangan iklim penanaman modal dan Program Penyelenggaraan promosi penanaman modal. Pada Tw.III program pengembangan iklim penanaman modal terealisasi penambahan nilai investasi sebanyak Rp 874.274.038.189,- yang terdiri dari nilai investasi PMA sebesar Rp 733.330.986.031,- dan PMDN sebesar Rp 140.943.052.158,- atau tercapai realisasi kinerja sebesar 105,97%. Pada Tw.III program Penyelenggaraan Promosi Penanaman

LAPORAN KINERJA TW.III TAHUN 2022

Modal dilaksanakan 1 kali pameran pada tanggal 4 – 7 Juni 2022 di hotel Four point Shaeraton Makasar. Pencapaian Target kinerja program penanaman modal disebabkan oleh telah maksimalnya penerapan pelayanan secara elektronik (on line Single Submission) sehingga dapat memudahkan para calon investor untuk melakukan pengurusan perizinan secara online dan pelaku usaha telah aktif dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

3. Bidang pelayanan terpadu Satu Pintu, terdiri dari 2 program yaitu Pelayanan Penanaman Modal dan Program pengelolaan data dan system informasi penanaman Modal. Pada Tw.III program pelayanan penanaman modal persentase jumlah izin yang diselesaikan tepat waktu hanya sebesar 75,91% dari target 72%, atau sebesar 105,43%, hal ini disebabkan karena adanya rekomendasi yang belum diterbitkan oleh SKPD teknis sehingga izin tidak dapat diterbitkan oleh DPMPSTP. Pada program Pengelolaan data dan system informasi penanaman modal, capaian kinerjanya belum bisa dihitung karena berupa Dokumen pada akhir tahun.
4. Bidang Pengendalian pengawasan dan Pengaduan Penanaman Modal, terdiri dari 1 program yaitu program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Target kinerja pada TW.III Persentase Pelaku Usaha yang Taat terhadap Peraturan yang terkait Penanaman Modal dengan target sebesar 20% tercapai 20% atau sebesar 100%. Adapun sumber anggaran dari Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik yang terdiri dari kegiatan pembinaan kepada pelaku Usaha berupa Bimtek, Pengawasan kepada pelaku usaha dan Pemantauan kepada izin-izin UKM dan Pelaku Usaha.

Diharapkan dengan disusunnya Evaluasi internal triwulan II ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur ini berpengaruh terhadap ketepatan keputusan yang akan diambil serta perencanaan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Luwu Timur akan semakin lebih baik di tahun – tahun yang akan datang.

Malili, 10 Oktober 2022

KEPALA DINAS,



ANDI HABIL UNRU, SE

NIP. 9641231 198703 1 208

Pangkat : Pembina Utama Muda



LAPORAN KINERJA TW.IV TAHUN 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan ridho- Nya Laporan Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan IV Tahun 2022 ini dapat selesai. Laporan Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan IV Tahun 2022 merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan dan terkompilasi dari lingkup Sekretariat, Bidang, Kasubag/ Seksi.

Laporan Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan IV Tahun 2022 ini berisi informasi kinerja pelayanan dan non pelayanan yang telah dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Diharapkan Laporan Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan IV Tahun 2022 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat.

Kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga Laporan Triwulan IV Tahun 2022 dapat memberikan manfaat yang sebagaimana mestinya.

Malili, 10 Oktober 2022

KEPALA DPM-PTSP,



ANDI HABIL UNRU, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 198703 1 208

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu menyusun Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 4 bulan (Triwulan IV Tahun 2022).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2022 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 kepada para stakeholders guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3 Peran dan Struktur Organisasi

Secara geografis Kabupaten Luwu Timur yang sebahagian wilayahnya dikelilingi oleh gugusan pegunungan dan pesisir Laut Teluk Bone serta kondisi masyarakat yang heterogen sangat memungkinkan akan terjadinya potensi bencana alam maupun bencana sosial, sehingga Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mempunyai komitmen dalam memberikan perlindungan pada masyarakat terhadap ancaman bencana tersebut, sehingga dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur dan

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV 2022

Tabel. 1
Jumlah Pegawai dan upahjasa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Unit Organisasi	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SLTA	PT	ST	SN	
1	Sekretariat	2	6	-	8	-	16
2	Bidang Penanaman Modal	-	1	-	2	3	6
3	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	4	-	8	-	12
4	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	-	3	1	2	1	8
Jumlah		2	13	1	21	2	42

Tabel. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

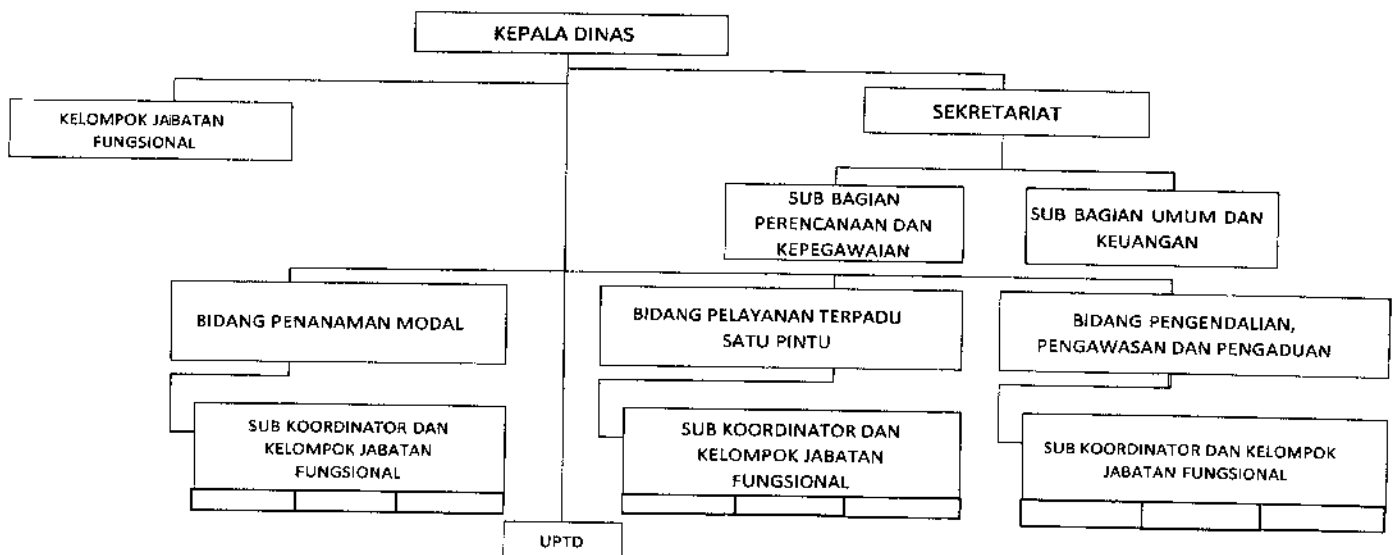
No	Unit Organisasi	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	1	4	2	7
2	Bidang Penanaman Modal	-	-	3	1	4
3	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1	3	-	4
4	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	-	-	4	1	5
Jumlah		0	2	14	4	20

Tabel 3

Klasifikasi Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselonisasi

No	Eselonisasi	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	2
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	9
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	4
	Jumlah	20

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2022



1.4 Isu-isu Strategis/Permasalahan

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan, teridentifikasi beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain :

1. Lambatnya proses pengadaan barang dan jasa .
2. Terdapat kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi atau kejadian bencana.
3. Realisasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN masih rendah karena penetapan rencana anggaran kas pada Tw.1 dan Tw.2 sebesar 70% dari pagu Gaji.
4. Terdapat kegiatan yang penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan (Riil Cost).
5. Data pendukung dari bidang yang belum maksimal
6. Pengisian formulir evaluasi oleh bidang masih belum maksimal.
7. Penyesuaian penggunaan aplikasi penatausahaan dari SIMDA ke SIMDANG, yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
8. Terdapat beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan berdasarkan anggaran kas

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

2.1 Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Dokumen Renstra DPMPTSP 2021-2026 mengacu kepada RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Nilai Utama ke-1 Sukses

Misi Ke-2 RPJMD :

Kepuasan Masyarakat

Misi Ke-4 RPJMD :

Keberhasilan Investasi

Sasaran Strategis

1. Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan perizinan dan Manajemen perangkat daerah.

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2022

2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2022. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja.

Tabel.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	3.300.000.000.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata lama penyelesaian perizinan usaha	72,00
3.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
a.	Bidang Penanaman Modal		
I.	Meningkatnya Investor PMA/PMDN yang berskala Nasional	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	33 Investor
II.	Meningkatnya Nilai realisasi Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMA Jumlah Investasi PMDN	2,5 Triliun 800 Milyar
b.	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1.	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu	100%
2	Tersedianya data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan	Database Penanaman Modal yang Valid	1 Dokumen
c.	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan		
1.	Terlaksananya kegiatan Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pelaku usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait Penanaman Modal	75 %
d.	Sekretariat		
1.	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	92,01%
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
a.	Bidang Penanaman Modal		
1.	Terwujudnya Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang	Persentase PMA/PMDn yang terfasilitasi	100%

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2022

Penanaman Modal			
2.	Terwujudnya Peta Potensi Investasi	Persentase jenis potensi yang disusun dalam peta potensi Kabupaten	100 %
3.	Terwujudnya Promosi Penanaman Modal	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan	5 MoU
b. Bidang Pelayanan Penanaman Modal			
1.	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu	100%
2.	Terwujudnya Pengolahan serta penyajian data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	- Persentase Data dan informasi Penanaman Modal yang dikelola	100%
c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
1.	Terwujudnya peningkatan nilai Realisasi Investasi	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	90%
d. Sekretariat			
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%
2.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
3.	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%
4.	Terlaksananya realisasi Pendapatan Asli Daerah Perangkat Daerah	Persentase Realisasi pendapatan perangkat daerah	100%
5.	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
6.	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
7.	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%
8.	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
9.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2022

pemerintahan daerah yang
siap pakai

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
a.	Bidang Penanaman Modal		
1.	Tersedianya Kebijakan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda PM yang terbit	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Evaluasi Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi PM yang tersedia	2 Dokumen
3.	Tersusunnya Peta Potensi	Jumlah Peta Potensi yang tersedia	1 Dokumen
4.	Tersusunnya Strategi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi yang dibuat	3 Dokumen
5.	Terlaksananya Pameran Promosi penanaman Modal	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	2 Event
b.	Bidang Pelayanan terpadu Satu Pintu		
1.	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik	- Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu Jumlah Pemilik Usaha (Perempuan) yang diterbitkan izinnnya	4.100 Izin 1.250 Izin
2.	Terlaksananya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	5 Pengaduan
3.	Tersedianya data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Data yang disediakan	2 Dokumen
c.	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan		
1.	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya	8 Kegiatan
2.	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti BIMTEK	217 Pelaku Usaha
3.	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi	14 Kegiatan
d.	Sekretariat		
1.	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen

3.	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
4.	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen
5.	Tersedianya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen
6.	Terlaksananya realisasi Pendapatan Asli Daerah Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen
7.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	12 Dokumen
8.	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	13 Orang
9.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	15 Jenis
10.	Tersedianya Peralatan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang diadakan	1 Paket
11.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga untuk kebutuhan kantor	Jumlah Peralatan rumah tangga Yang diadakan	1 Paket
12.	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 Jenis
13.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis
14.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60 Exempler
15.	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	120 Orang
16.	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	274 Kali
17.	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	1 Unit
18.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit
19.	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasi	900 Surat
20.	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	60 Rekening
21.	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	4 Orang
22.	Terpeliharanya kendaraan	Jumlah kendaraan operasional	9 Unit

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2022

	dinas/operasional dengan baik	atau lapangan yang dipelihara	
23.	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47 Unit
24.	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit
25.	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	21 Orang
26.	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

3.1 Capaian Kinerja

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2022 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala OPD dengan Bupati Luwu Timur. Pengukuran tersebut menggunakan formulir pengukuran kinerja yang disajikan dalam tabel berikut :

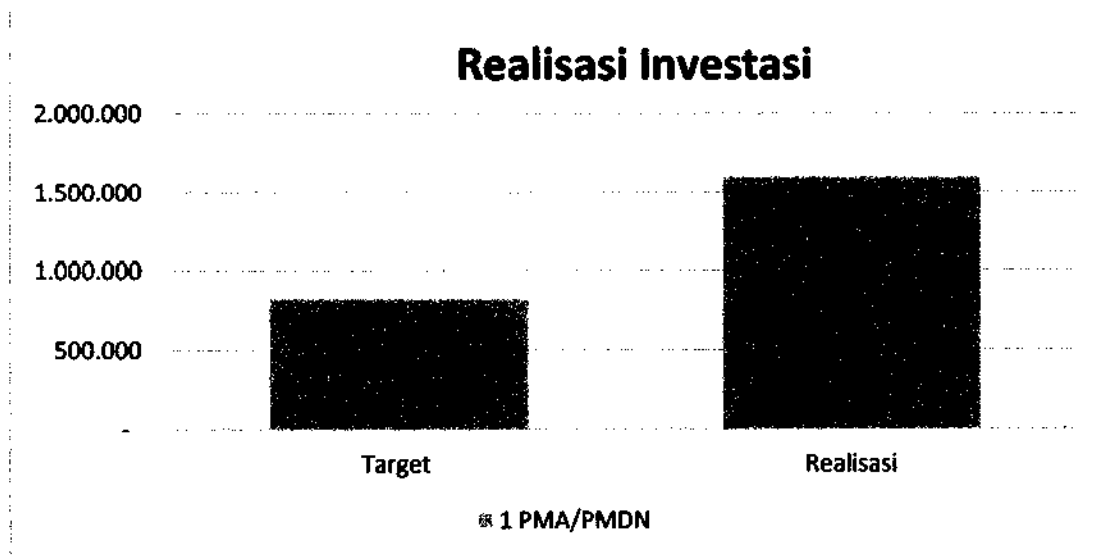
Tabel 2.
Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tw.4	REALISASI Tw.4	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	825 M	1.599 M	193,81%	○
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata lama penyelesaian perizinan usaha	72,00	82,24	114,22%	●

Keterangan : ○ Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

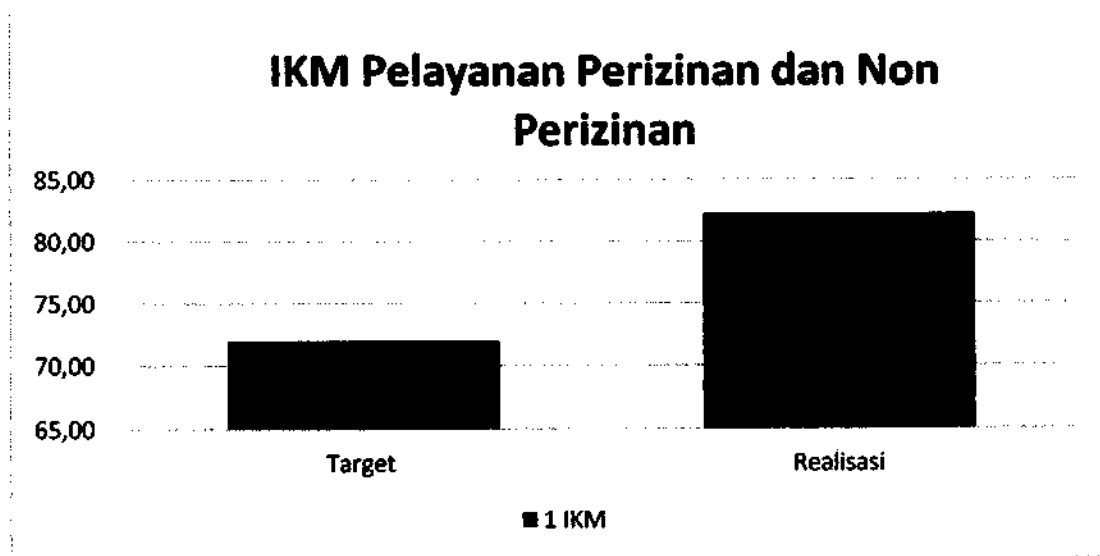


Grafik. 1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Triwulan IV Tahun 2022

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan



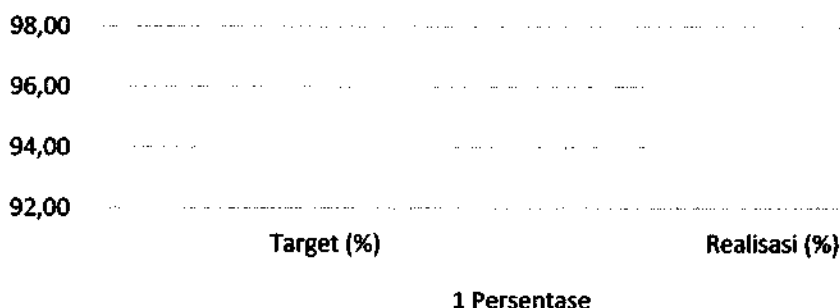
Grafik. 2

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Triwulan IV Tahun 2022

Sasaran Pendukung

Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota"



Grafik. 4

Capaian Kinerja Sasaran Penunjang Triwulan IV Tahun 2022

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

✚ **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022**

Tabel 3.
Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Target Triwulan IV Tahun 2022	Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2022	Persentase Capaian
1	2	3	4	5
Nilai realisasi Investasi daerah	3,3 triliun	825 milyar	1.599 milyar	193,81%
Persentase Capaian Rata-Rata				193,81%

❖ **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : ***“Nilai Realisasi Investasi Daerah”***

Perkembangan realisasi Investasi berdasarkan LKPM dan izin usaha ini sangat bergantung kepada kepatuhan dan perhatian para pengusaha (PMA) dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tahunnya. Jika kepatuhan para pengusaha dalam menyampaikan LKPM tersebut semakin baik, maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pada tahun – tahun berikutnya akan semakin meningkat dan pemerintah daerah dapat memantau perkembangan investasi dengan baik. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pengusaha maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pun akan cenderung menurun bahkan semakin berkurang.

Oleh karena itu, sinergitas antara pengusaha dengan pemerintah daerah harus terus di tingkatkan agar setiap kegiatan investasi di daerah dapat dikendalikan dan terpantau dengan baik sehingga diharapkan iklim investasi di Kabupaten Luwu Timur cenderung lebih kondusif pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah, dengan upaya secara terus menerus meningkatkan pelayanan perizinan.

❖ Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Nilai Realisasi Investasi Daerah yaitu :

A. Program Pengembangan iklim Penanaman Modal didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota:

- a. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Subkegiatan ini adalah kegiatan pendampingan dan fasilitasi bagi UKM dengan Bank dan pihak-pihak pemberi pinjaman dan kemudahan pemberian modal.
- b. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal, subkegiatan ini adalah kegiatan penyediaan PERDA penanaman modal yang akan digunakan sebagai regulasi dalam kegiatan peningkatan investasi.

2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota

B. Program Promosi Penanaman Modal didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terbagi menjadi 2

subkegiatan yaitu :

- a. Subkegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal yang indikatornya yaitu jumlah media promosi Penanaman Modal. Jumlah media yang digunakan adalah media surat kabar yang digunakan untuk meliput pemberitaan Penanaman Modal. Pada tahun 2022 terealisasi 2 media.
- b. Subkegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota, indikator subkegiatan adalah jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti/dilaksanakan, kegiatan pameran terealisasi dan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 berupa Pameran APKASI.

C. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, didukung 1 (satu) kegiatan dan 3 Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, sumber Pendanaan Dana Transfer Khusus DAK non Fisik , yang terbagi menjadi 3 subkegiatan yaitu:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman modal, dengan indicator kinerja adalah pemantauan kepada Pelaku Usaha PMDN dan UKM. Realisasi pada Tw.4 Tahun 2022 sebanyak 2 kali kegiatan dengan target kegiatan sebanyak 3 kali.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman modal, dengan indicator kinerja adalah Kegiatan pelaksanaan Bimtek kepada pelaku usaha PMDN dan UKM. Realisasi pada Tw.4 Tahun 2022 sebanyak 120 orang.
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal, dengan indicator kinerja adalah kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha PMDN dan UKM. Pada Tahun 2022 target kinerja sebanyak 3 kali kegiatan dan terealisasi sebanyak 6 kali kegiatan. Realisasi melebihi target karena kegiatan pada tw.3 dialihkan dan menunggu DPA perubahan karena adanya perubahan nomor rekening kegiatan.

➤ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Nilai Realisasi investasi, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan anggaran untuk Pembuatan peta potensi dan Perda penanaman modal yang melekat pada OPD strategis dan bukan hanya di DPMPTSP
- Ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
- Pelaksanaan pengerjaan peta potensi dan PERDA Penanaman Modal sangat tergantung dari berbagai instansi, pihak legislative (DPRD) belum terlaksana karena keterlambatan PPTK dalam merespon kegiatan sesuai anggaran kas.

➤ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Mengusulkan kepada pihak team TAPD dan Bappelitbangda untuk mengalokasikan dana yang lebih besar
- melakukan penjemputan data dan informasi ke OPD terkait

➤ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran strategis DPMPTSP, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Penyesuaian dan perubahan anggaran pada sub kegiatan Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal . Perubahan terjadi pada Belanja ATK, belanja cetak, makan minum rapat dan perjalanan dinas.

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi Investasi dan peluang usaha di Daerah maka dapat terfasilitasi dengan adanya Media Koran, website, aplikasi LKPM, dokumen Peta potensi.
- Sumber daya yang ada pada DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DPMPTSP tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam penyebaran informasi. Sumber daya manusia yang ada di DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur sebanyak 42 orang yang terdiri dari 20 orang PNS, 22 orang Upah Jasa.

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2022

➤ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target s.d TW IV	Realisas s.d TW IV	Capaian (%)	Alokasi s.d TW IV	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai realisasi Investasi	3,3 Triliun	4,092 Triliun	124%	188.444.480,-	185.519.500,-	98,45%
	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	35	35	100%	406.846.885,-	396.916.951,-	97,56%
	Persentase Pelaku Usaha yang Taat terhadap Peraturan yang terkait Penanaman Modal	72%	82,24%	114,24%	417.091.801,-	391.110.006,-	93,77%

2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan IV TA. 2022 dengan Triwulan IV sebelumnya

Tabel. 6
Perbandingan Target dan Realisasi dengan triwulan Sebelumnya

Sasaran I :	Meningkatnya Nilai realisa investasi Daerah						Target Tahun 2021
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan IV Tahun 2022			Triwulan IV Tahun 2021			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai Realisasi Investasi	3,3 Triliun	4,092 T	124 %	3 Triliun	4,171 T	139 %	3 Triliun

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa capaian Triwulan IV tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan capaian Triwulan IV tahun sebelumnya (2021). Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran pelaku usaha (PMA/PMDN) dalam melaporkan realisasi kegiatannya dalam aplikasi LKPM, selain

itu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan jumlah investor dalam berusaha. Target yang meningkat setiap tahunnya disesuaikan dengan target dalam Renstra DPMPSTSP 2021-2026.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan dapat dicapai. Dan upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran Nilai realisasi investasi setiap tahunnya.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2022 dengan target jangka menengah pada Renstra DPMPSTSP Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 7
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)

	Realisasi		Target	Persentase
	Triwulan IV Tahun 2022	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2022		
	4,092 Triliun	4,092 Triliun	4 Triliun	100%

SASARAN 3 (SASARAN PENDUKUNG)

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pendukung **“Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah”** tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 17
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah			Notifikasi
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian (%)	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	97,63%	102,76%	🟢

Keterangan : ○ Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

1. Perbandingan Target Triwulan IV dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

➤ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Indikator kinerja sasaran penunjang adalah Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan **formulasi indikator** yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah **“Jumlah capaian kinerja program dibagi target sasaran dikali seratus”**.

Target Indikator sasaran penunjang pada Triwulan IV TA. 2022 adalah 95% dan realisasi 97,63% dengan persentase capaian kinerja 102,76%. Persentase capaian kinerja melebihi dari target karena beberapa kegiatan yang mendukung capaian program, realisasinya > 100% sehingga bila diakumulasi maka akan menutupi kegiatan yang realisasinya <100%.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

➤ Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Adanya penyesuaian penggunaan aplikasi SIMDA NG untuk penatausahaan keuangan yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
- Keterlambatan penetapan pejabat pengadaan barang dan jasa
- Adanya sistem belanja barang makan minum dan Alat tulis kantor menggunakan belanja e-katalog di ULP.
- Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Untuk segera melakukan penatausahaan keuangan bilamana aplikasi telah siap digunakan
- Untuk segera menetapkan pejabat pengadaan barang dan jasa
- Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa
- Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan

❖ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran pendukung DPMPTSP, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- Efisiensi belanja listrik, telepon dan air kantor yaitu, untuk biaya WIFI Kantor, difasilitasi oleh Dinas KOMINFO

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

- Tidak adanya tenaga ASN pada jabatan pelaksana yang dapat membantu pejabat struktural sehingga untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- Memaksimalkan peralatan yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

➤ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2022

Tabel. 8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target TW IV	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)	Alokasi s.d TW IV	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	97,63%	102,76%	3.389.606.008,-	3.335.993.550,-	98,42%
	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	97,63%	102,76%	3.389.606.008,-	3.335.993.550,-	98,42%

Tabel. 9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	102,76%	98,42%	1,58%

Pencapaian sasaran pendukung Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah sebesar 102,76% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,42%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 1,58%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan IV TA. 2022 dengan Triwulan IV Tahun sebelumnya

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 10
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah						Target Tahun 2022
	Triwulan IV TA. 2022			Triwulan IV TA. 2021			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indikator Kinerja Sasaran							
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95 %	97,63 %	102,76 %	95 %	89,19 %	93,88 %	100%

❖ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Triwulan IV tahun 2022 dengan Triwulan IV TA. 2021 yang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Capaian kinerja beberapa sub kegiatan melebihi dari target yang direncanakan
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara periodik.
3. Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 11
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah
(2021 - 2026)

	Realisasi		Target	Tingkat Pencapaian
	Triwulan IV Tahun 2022	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2022		
	97,63%	97,63%	95%	102,76%

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 12
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	95%	97,63%	102,76%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dok	0 Dok	0 Dok	0%

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2022

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	0 Dok	0 Dok	0%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	4 Dok	4 Dok	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	21 Org	21 Org	20 Org	95%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD n	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dok	6 Dok	6 Dok	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dok	1 Dok	1 Dok	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	13 Org	3 Org	5 Org	166,66%

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2022

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Expl	15 Expl	15 Expl	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	120 Org	30 Org	70 Org	233%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	500 Kali	44 Kali	76 Kali	172,7%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	0%	0%	0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	94,72%	94,72%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	900 Surat	200 Surat	198 Surat	99%

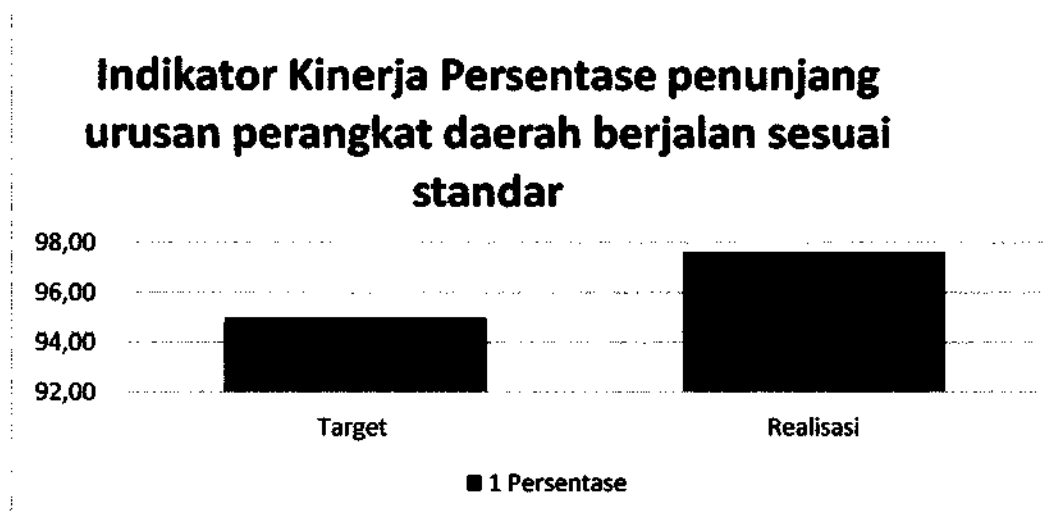
LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2022

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan	60 Rek	15 Rek	15 Rek	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Org	4 Org	4 Org	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	90%	90%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	9 Unit	8 Unit	90%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47 Unit	12 Unit	12 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0%

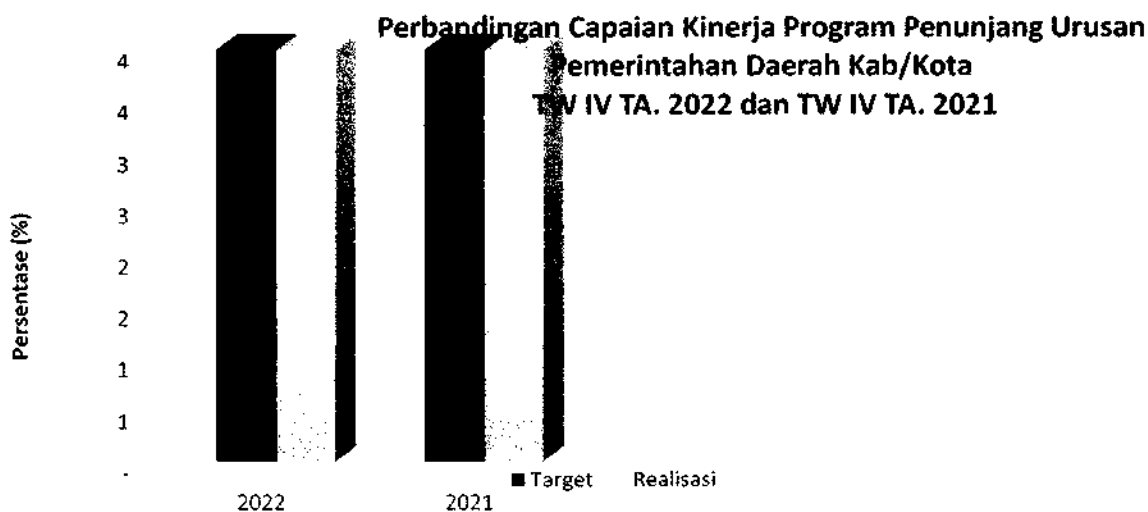
❖ Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (outcome)

Grafik. 13
Perbandingan Target dan realisasi Trhwulan IV TA. 2022



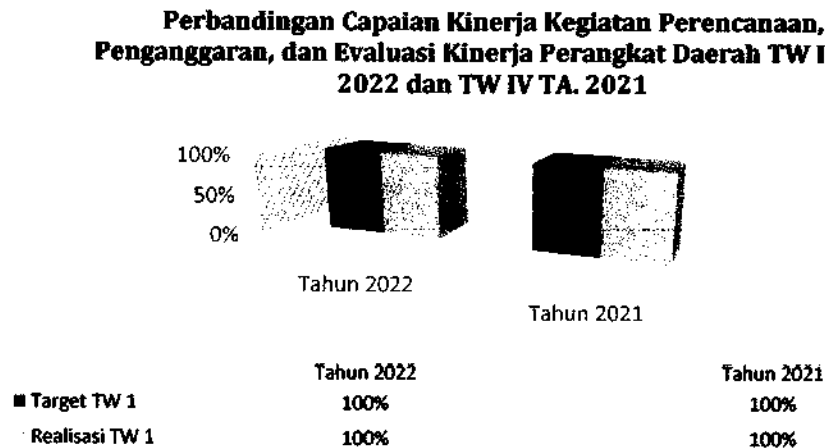
Grafik. 14
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV TA. 2022 dengan Trhwulan IV TA. 2021



Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan *formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus*. Target 95% dan realisasi 97,63% dengan capaian kinerja 102,76%, dan menyerap anggaran sebesar 97,96%. Capain kinerja program yang melebihi target karena beberapa kegiatan capaiannya > 100% sehingga bila diakumulasi maka akan menutupi kegiatan yang realisasinya <100%. Pencapaian Kinerja Program didukung oleh 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan yaitu :

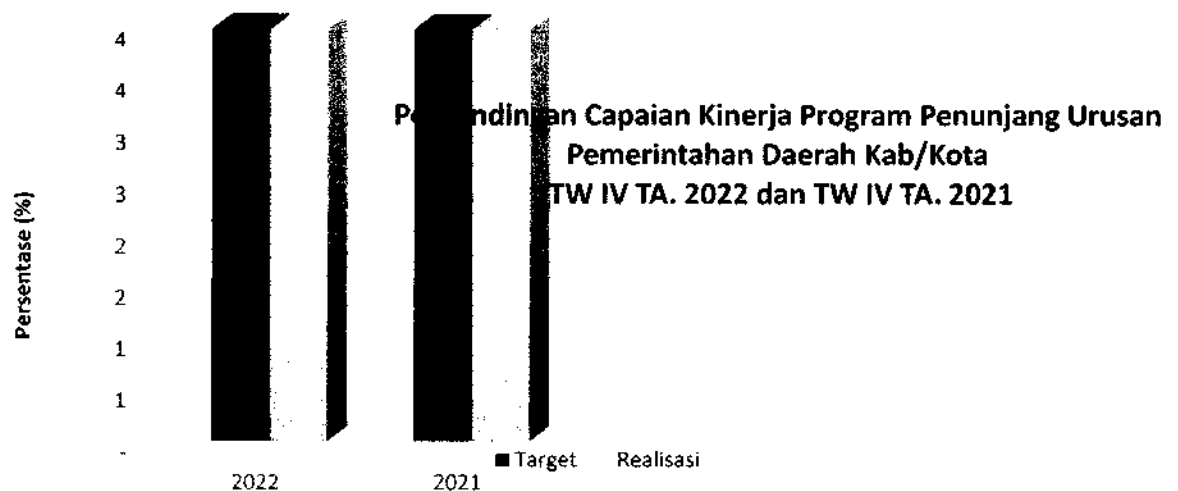
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Grafik. 15
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV TA. 2022 dengan Triwulan IV TA. 2021



Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan **Formulasi** : **Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

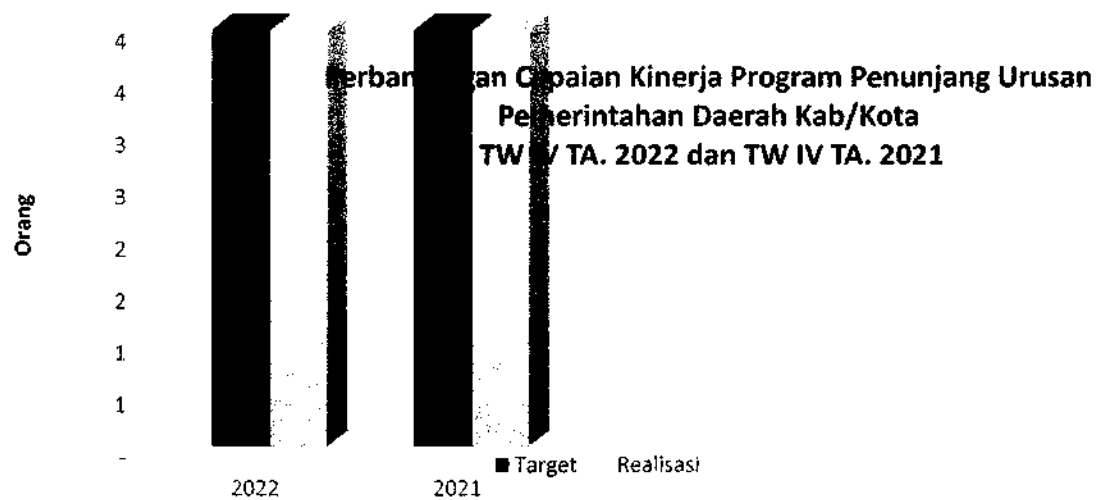


Grafik. 15
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV TA. 2022 dengan Triwulan IV TA. 2021

Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan **Formulasi** : **Jumlah capaian kinerja**

seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 96,4% dengan persentase capaian kinerja 95%. Capaian kinerja yang tidak sesuai target karena dari 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan realisasinya hanya 90%, yang diakibatkan adanya jabatan Pelaksana (Pejabat Pemeriksa Keuangan) yang belum terisi. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

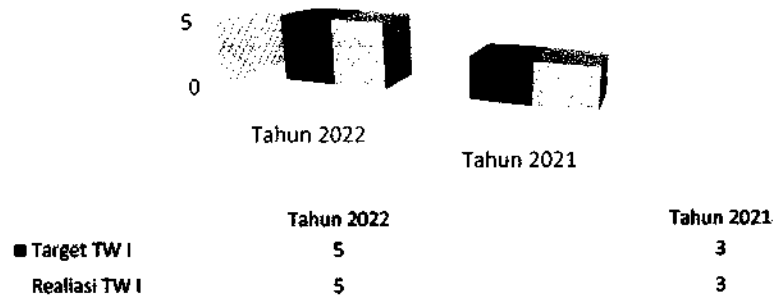


Grafik. 16
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV TA. 2022 dengan Triwulan IV TA. 2021

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan, target 21 org dan realisasi 20 org dengan persentase capaian kinerja 95 %. Hal ini disebabkan karena adanya jabatan staf pelaksana (Pejabat Pemeriksa keuangan) yang belum terisi. Disediakan anggaran kas pada triwulan IV sebesar Rp 2.434.895.003 dan realisasi Rp 2.406.374.091 atau sebesar 98,82%. Terdapat sisa anggaran pada triwulan IV karena bersifat persediaan.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

Perbandingan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD TW 4 TA. 2022 dan TW 4 TA. 2021

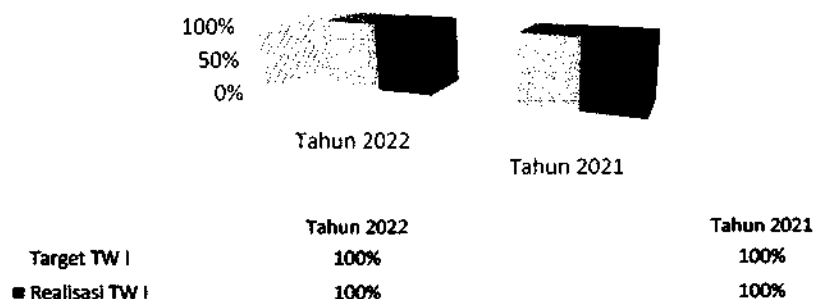


Grafik. 17
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 4 TA. 2022 dengan Triwulan 4 TA. 2021

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu, target pada triwulan IV TA. 2022 sebanyak 5 dokumen dan realisasi 5 dokumen (100%) yaitu Laporan Keuangan Tahun 2022 1 dok, Laporan Triwulanan 1 dok, Laporan Bulanan Bendahara 3 dok. Disediakan anggaran kas pada triwulan 4 sebesar Rp 103.154.435 terealisasi sebesar Rp 101.647.500 atau sebesar 98,54%.

➤ Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah TW 4 TA. 2022 dan TW 4 TA. 2021



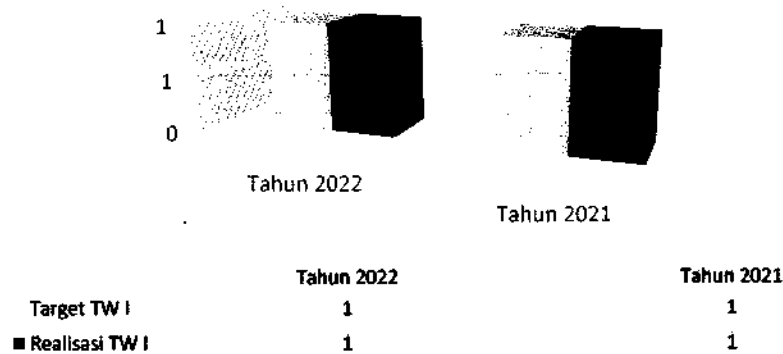
Grafik. 18
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 4 TA. 2022 dengan Triwulan 4 TA. 2021

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub**

kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Perbandingan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD TW 4 TA. 2022 dan TW 4 TA. 2021

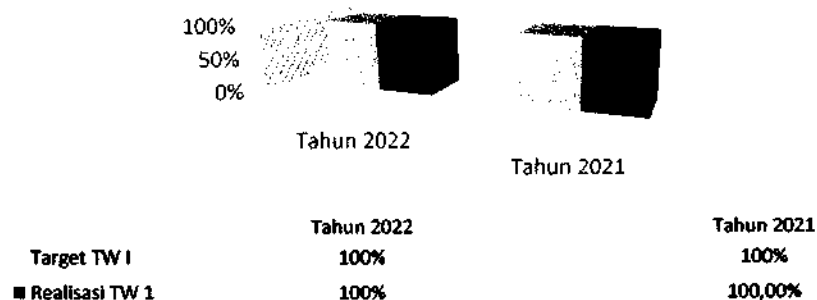


Grafik. 19
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 4 TA. 2022 dengan Triwulan 4 TA. 2021

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun, dengan target pada triwulan I TA. 2022 sebanyak 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Dokumen yang disusun adalah Laporan penatausahaan BMD. Disediakan anggaran kas pada triwulan 4 sebesar Rp 10.623.710, terealisasi sebesar Rp. 10.612.000 atau sebesar 99,89%.

➤ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah TW 4 TA. 2022 dan TW 4 TA. 2021

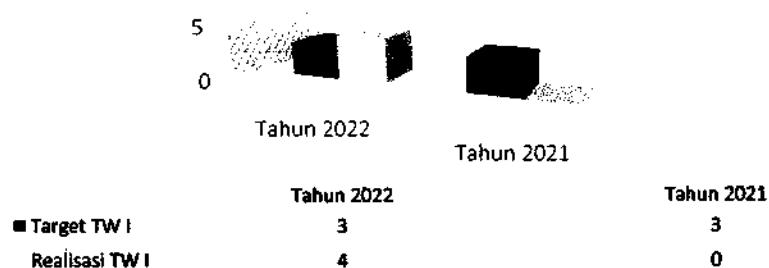


Grafik. 20
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 4 TA. 2022 dengan Triwulan 4 TA. 2021

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Perbandingan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan TW 4 TA. 2022 dan TW 4 TA. 2021

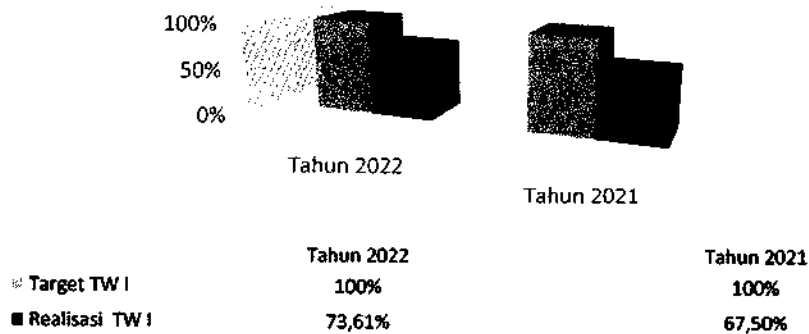


Grafik. 21
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 4 TA. 2022 dengan Triwulan 4 TA. 2021

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, dengan target pada triwulan 2 TA. 2022 sebanyak 3 org dan realisasi 5 orang (133,33%) yaitu Bimtek anggaran 1 orang, Bimtek LKPJ/LPPD 1 orang, Bimtek Arsip 3 orang. Penggunaan anggaran BIMTEK disesuaikan undangan pemanggilan peserta. Disediakan anggaran sebesar Rp 56.100.000, Realisasi keuangan sebesar Rp 54.905.000,- atau sebesar 97,87%.

➤ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah TW 4 TA. 2022 dan TW 4 TA. 2021

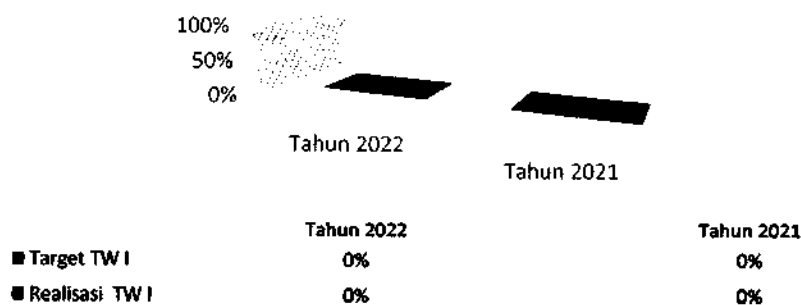


Grafik. 22
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 4 TA. 2022 dengan Triwulan 4 TA. 2021

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 94,00% dengan persentase capaian kinerja 98,00%. Capaian kinerja kurang dari target karena terdapat 1 sub kegiatan yang tidak terealisasi. Dan disediakan anggaran sebesar Rp Rp 438.017.950,- terealisasi sebesar Rp 437.690.305,- atau sebesar 99,93%.

➤ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TW 4 TA. 2022 dan TW 4 TA. 2021

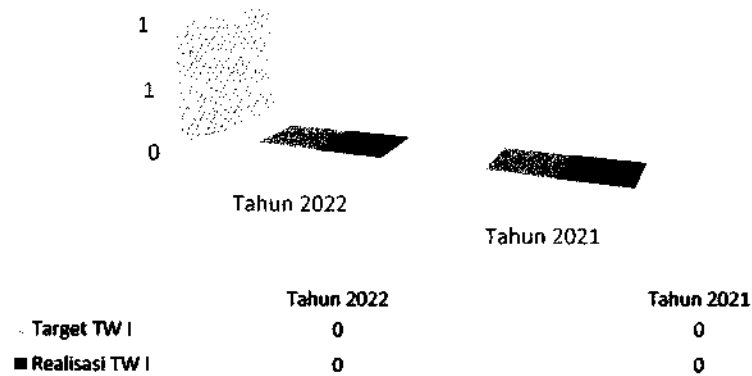


Grafik. 23
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 4 TA. 2022 dengan Triwulan 4 TA. 2021

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.** Dan berdasarkan anggaran kas, pelaksanaan sub kegiatan pada Triwulan II dan III TA. 2022. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

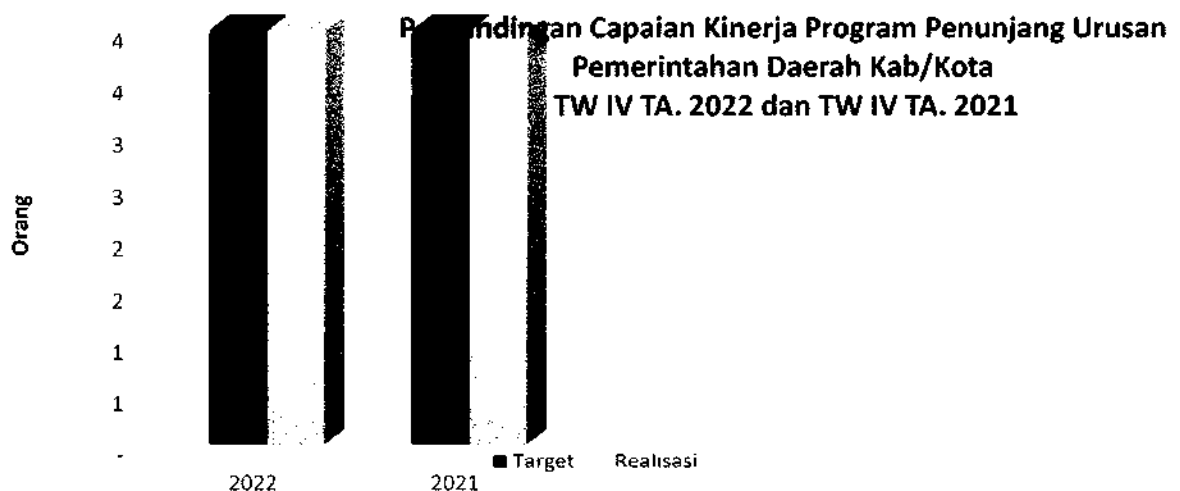
- **Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**
Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, dan berdasarkan anggaran kas, pelaksanaan sub kegiatan pada Triwulan III TA. 2022.

Perbandingan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya TW I TA. 2022 dan TW I TA. 2021



Grafik. 24
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 4 TA. 2022 dengan Triwulan 4 TA. 2021

➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

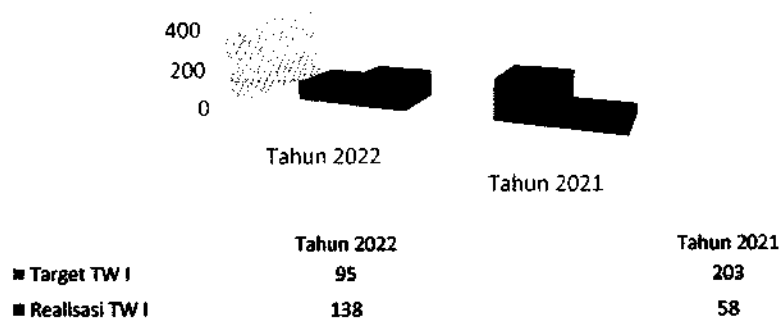


Grafik. 25
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 4 TA. 2022 dengan Triwulan 4 TA. 2021

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Perbandingan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat TW I TA. 2022 dan TW I TA. 2021

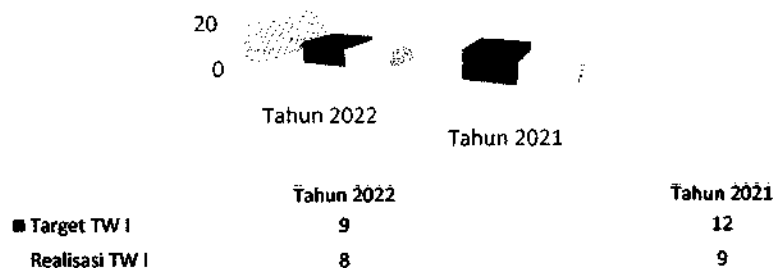


Grafik. 26
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 4 TA. 2022 dengan Triwulan 4 TA. 2021

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, target Triwulan 4 TA. 2022 sebanyak 200 surat dan terealisasi 198 surat dengan persentase capaian kinerja 99%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

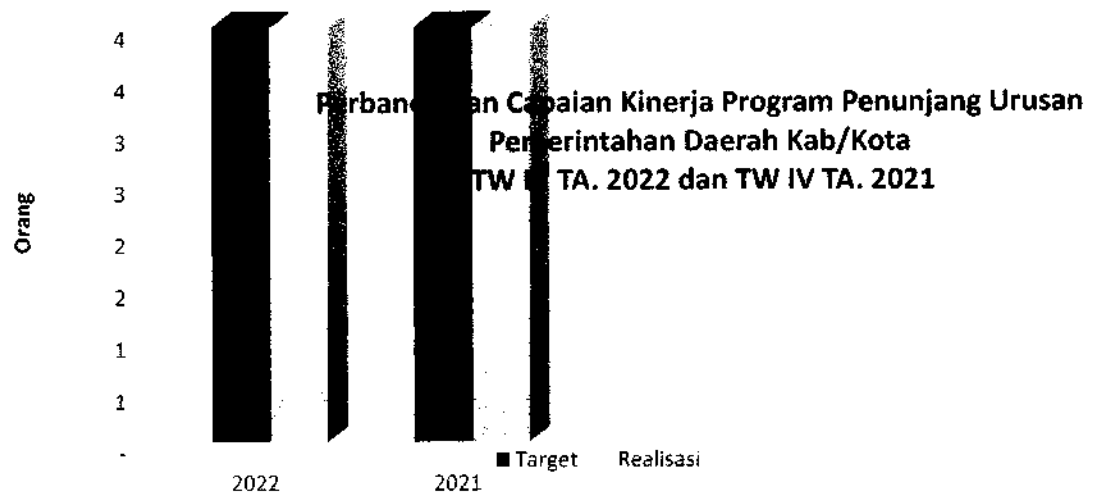
Perbandingan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TW 4 TA. 2022 dan TW 4 TA. 2021



Grafik. 27
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 4 TA. 2022 dengan Triwulan 4 TA. 2021

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, target pada triwulan 4 TA. 2022 sebanyak 15 rekening dan realisasi 15 rekening, terdiri dari Listrik DPMPTSP 3 rek, rek Air kantor 3 rek, kartu halo 3 rek, TV Kabel 3 bulan dengan persentase capaian kinerja 100%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

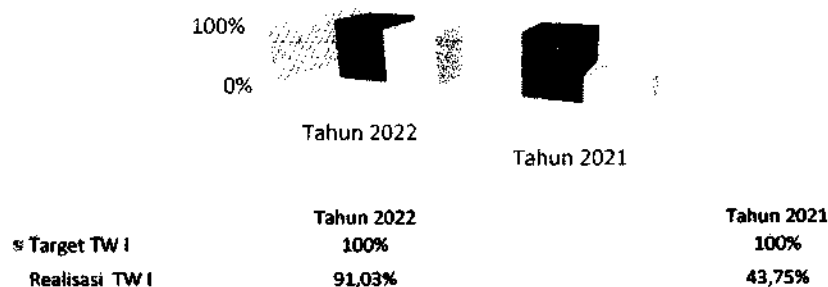


Grafik. 28
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 4 TA. 2022 dengan Triwulan 4 TA. 2021

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan, target 4 orang setiap triwulan dan realisasi 4 orang (100%) yaitu terbayarnya honor upah jasa cleaning service dan tenaga security.

➤ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TW I TA. 2022 TW I TA. 2021



Grafik. 29
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 4 TA. 2022 dengan Triwulan 4 TA. 2021

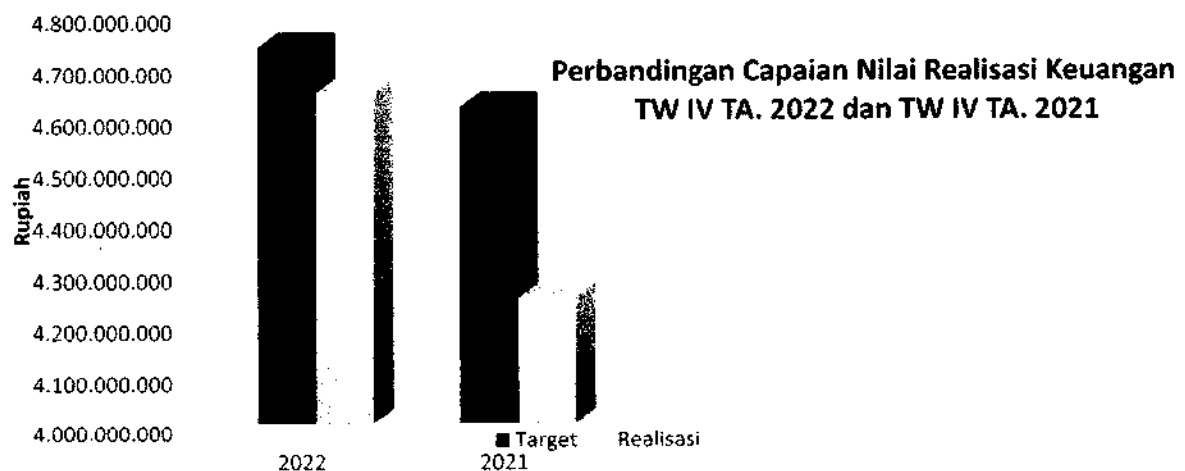
Indikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 91,03% dengan persentase capaian kinerja 91,03%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena terdapat beberapa peralatan kantor dan peralatan bencana yang disediakan anggaran pemeliharaannya, masih dalam kondisi baik. Sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi peralatan.

Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 adalah sebesar sebesar **Rp. 4.739.180.131,-** (*Empat Milyar Tujuh ratus tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp 2.474.135.003,-** belanja barang dan jasa **Rp. 2.255.045.128,-** dan belanja modal **Rp 10.000.000,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 program, 9 kegiatan serta 34 sub kegiatan. Adapun target anggaran pada Triwulan 4 Tahun Anggaran 2022 dan realisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 30. Perbandingan Realisasi Anggaran TW 4 TA. 2022 dan TW 4 TA. 2021



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2022

Tabel. 23
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

REALISASI KEUANGAN SAMPAI TW.4

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2022

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN 2 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 30 Juni 2021	SELISIH
				(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	3.389.606.008,00	3.389.606.008,00	3.335.993.550,00	98,42
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.244.735,00	77.244.735,00	76.678.304,00	99,27
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.698.010,00	41.698.010,00	41.600.000,00	99,76
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.414.860,00	3.414.860,00	3.284.750,00	96,19
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.162.965,00	4.162.965,00	3.944.554,00	94,75
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.968.900,00	27.968.900,00	27.849.000,00	99,57
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.538.049.438,00	2.538.049.438,00	2.508.021.591,00	98,82
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.434.895.003,00	2.434.895.003,00	2.406.374.091,00	98,83
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	103.154.435,00	103.154.435,00	101.647.500,00	98,54
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.781.981,00	16.781.981,00	14.720.000,00	87,71
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.781.981,00	16.781.981,00	14.720.000,00	87,71
04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.623.710,00	10.623.710,00	10.612.000,00	99,89
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.623.710,00	10.623.710,00	10.612.000,00	99,89
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.085.956,00	69.085.956,00	67.794.700,00	98,13

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2022

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.985.956,00	12.985.956,00	12.889.700,00	99,26
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	56.100.000,00	56.100.000,00	54.905.000,00	97,87
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	438.017.950,00	438.017.950,00	437.690.305,00	99,93
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.832.250,00	5.832.250,00	5.831.000,00	99,98
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.710.700,00	7.710.700,00	7.686.000,00	99,68
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.675.000,00	13.675.000,00	13.674.000,00	99,99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.720.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	100,00
07	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395.080.000,00	395.080.000,00	394.779.305,00	99,92
08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	6.982.000,00	99,74
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	6.982.000,00	99,74
09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.889.438,00	152.889.438,00	137.530.780,00	89,85
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.879.570,00	22.879.570,00	22.421.730,00	98,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.009.868,00	58.009.868,00	43.109.050,00	74,31
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.912.800,00	79.912.800,00	75.983.870,00	95,06
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.650.000,00	45.650.000,00	43.235.870,00	94,71
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.150.000,00	21.150.000,00	19.620.000,00	92,77
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.112.800,00	13.112.800,00	13.108.000,00	99,96
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	406.846.885,00	406.846.885,00	396.916.951,00	97,56

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2022

	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	235.311.845,00	235.311.845,00	235.128.551,00	99,92
1.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	189.303.030,00	189.303.030,00	189.247.800,00	99,97
2.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	46.008.815,00	46.008.815,00	45.880.751,00	99,72
	Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/Kota	171.535.040,00	171.535.040,00	161.788.400,00	94,32
1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	171.535.040,00	171.535.040,00	161.788.400,00	94,32
C.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	188.444.480,00	188.444.480,00	185.519.500,00	98,45
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	188.444.480,00	188.444.480,00	185.519.500,00	98,45
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	22.638.490,00	22.638.490,00	21.507.500,00	95,00
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	165.805.990,00	165.805.990,00	164.012.000,00	98,92
D.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	307.191.107,00	307.191.107,00	303.816.180,00	98,90
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	307.191.107,00	307.191.107,00	303.816.180,00	98,90
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	286.870.777,00	286.870.777,00	284.608.100,00	99,21
2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.320.330,00	20.320.330,00	19.208.080,00	94,53
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	417.091.801,00	417.091.801,00	391.110.006,00	93,77
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	417.091.801,00	417.091.801,00	391.110.006,00	93,77
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	102.921.550,00	102.921.550,00	92.754.000,00	90,12
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	215.381.761,00	215.381.761,00	199.665.606,00	92,70
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	98.788.490,00	98.788.490,00	98.690.400,00	99,90

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2022

F.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	29.999.850,00	29.999.850,00	29.266.337,00	97,55
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.999.850,00	29.999.850,00	29.266.337,00	97,55
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	29.999.850,00	29.999.850,00	29.266.337,00	97,55
TOTAL BELANJA		4.739.180.131,00	4.739.180.131,00	4.642.622.524,00	97,96

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2022

❖ Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran

No		PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
1		3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % target triwulan II, 25 % realisasi triwulan III 25 %, realisasi triwulan IV 25 %	Anggaran yang diminta pada triwulan 1 - IV sebesar Rp.77.244.735, realisasi Rp. 76.678.304 sisa anggaran Rp.566.431.	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tercapai 3 dokumen	dari target keuangan Rp 41.698.010 terrealisasi Rp 41. 600.000,- atau sebesar 99,76%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapai 2 dokumen	dari target keuangan Rp 3.414.860 terrealisasi Rp 3.284.860,- atau sebesar 96,19%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tercapai 2 dokumen	Dari target keuangan Rp 4.162.965 terrealisasi Rp 3.944.554,- atau sebesar 94,76%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapai 10 dokumen	Dari target keuangan Rp 27.968.900 terrealisasi Rp 27.849.000,- atau sebesar 99,57%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dengan target keseluruhan 100% tercapai	Anggaran yang diminta pada triwulan 1 - IV sebesar Rp.2.538.049.438 realisasi Rp. 2.508.021.591 (98,82%) sisa anggaran Rp. 30.027.847 .	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Jumlah ASN yang gaji dan Tunjangan terbayarkan target kinerja 21 orang target triwulan IV 21 orang realisasi 20 Orang	sisa anggaran bersifat persediaan.	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tercapai 18 dokumen		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indikator Persentase administrasi milik Daerah yang terselenggara dengan baik dengan target keseluruhan 100% tercapai target	Anggaran yang diminta pada triwulan 1 - IV sebesar Rp.16.781.981 realisasi Rp. 14.720.000 (87,712%) sisa anggaran Rp. 2.061.981 .	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Capai target		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capai target		

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2022

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	indikator Persentase administrasi milik Daerah yang terselenggara dengan baik dengan target keseluruhan 100% tercapai target	Anggaran yang diminta pada triwulan I - III sebesar Rp.68.185.956,- realisasi 38.355.000 sisa anggaran kas 29.830.956 dari sisa anggaran sub kegiatan Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp.4.640.000,- dan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis sebesar Rp. 33.715.000,-	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Capai Target dan berdasarkan Kebutuhan pegawai	terrealisasi 99,26%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis bagi ASN TW1: tercapai 5 orang (Milda, Iksan, Ayub Kombong, Idris, Joni), TW2: tercapai 3 orang (Idris, Hariyadi, Fahmi), TW3: tercapai 3 orang (Fahmi, Andi Rajuni, Aminuddin); TW4: tercapai 5 orang (Andi Habil, Joni, Nerty, Ichsan, Ondo ira)	terrealisasi 97,87%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capai Target	terrealisasi 99,98%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Pengadaan dihapuskan karena adanya pengurangan anggaran pada perubahan 2022	-	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Direalisasikan pada Tw.3	Anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.000.000 dan terealisasi Rp 3.000.000,- (100%)	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Capai Target	terrealisasi 99,68%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capai Target	terrealisasi 99,99%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capai Target	terrealisasi 100%	
Facilitasi Kunjungan Tamu	Capai Target	terrealisasi 100%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capai Target	terrealisasi 99,92%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan dihapuskan karena adanya pengurangan anggaran pada perubahan 2022	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilaksanakan pada Triwulan II sesuai target anggaran kas dan rencana aksi	Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 7.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.982.000 atau sebesar 99,74%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	capai target	terrealisasi 74,31%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	capai target	terrealisasi 100%	

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2022

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capai Target		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capai Target		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capai Target , sudah direalisasikan pada TW.2		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indikator kinerja Meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional target 33 perusahaan tercapai 30 perusahaan atau sebesar 90%. Hal ini disebabkan karena beluam adanya regulasi baik Perda/Perbup terkait pemberian insentif investasi, sehingga berdampak pada kurangnya minat investasi Perusahaan-perusahaan.	terealisasi 97,56 %	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator kegiatan pada Tw.4 tercapai sebesar 25% dengan target 25% atau terealisasi sebesar 100%		
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Tercapai 2 Perda	terealisasi 99,97%	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tercapai 2 kegiatan	terealisasi 99,72%	
	Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/Kota	tercapai	terealisasi 94,32 %	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	tercapai 1 peta potensi	terealisasi 94,32 % (karena ada sisa penawaran dari pihak ke3)	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Realisasi Investasi belum terkumpul secara total karena adanya kendala pada aplikasi LKPM dari Pusat	terealisasi 98,45%	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Target MoU pada Tw.3 sebesar 2, tetapi sudah tercapai pada Tw.2 sebanyak 5 MoU atau sebesar 100%	terealisasi 98,45%	
01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	capai target	Terealisasi 95%	
02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	capai target	Terealisasi 98,92%	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Target Kinerja berupa persentase ketepatan waktu penyelesaian izin sesuai SOP sebesar 72% dan terealisasi sebesar 75,91%. Karena izin yang terbit sesuai SOP sebanyak 1.270 izin dan total izin yang terbit sebanyak 1.673 izin		

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2022

	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	99,84% dari target 100%.		
01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Total izin terbit sampai Tw.4 tercapai 5.474 izin dari total target izin sebanyak 4.100 izin atau tercapai sebesar 133,51% , dan izin terbit sesuai kepemilikan izin perempuan sebanyak 2.635 izin	realisasi 98,90%	
02	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Target Pegaduan sebanyak 5 pengaduan dan tercapai 6 pengaduan atau sebesar 120%	realisasi 94,53%	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Anggaran yang diminta untuk triwulan I - III Rp. 378.248.141,- realisasi Rp.218.403.400 capaian 59,70% sisa anggaran kas Rp 159.844.741,-	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang taat melaporkan LKPM sebanyak 20%		
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Capai Target	Realisasi 90,12%. Belanja Sewa bangunan sifatnya di siapkan karena ada kegiatan yang pelaksanaannya di gabung. Sewa bangunan sifatnya disiapkan karena ada kegiatan.	
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Capai Target	realisasi anggaran sebesar 92,70%. Belanja Sewa bangunan sifatnya di siapkan karena ada kegiatan yang pelaksanaannya di gabung.	
03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Capai Target	realisasi 99,90%	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	capai Target		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	capai target	realisasi 97,55%	

BAB IV

PENUTUP

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) DPMPSTSP Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada tahun 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut :

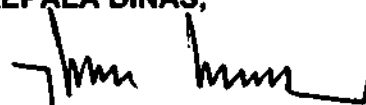
- a. Realisasi Anggaran belanja APBD sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.642.622.524,- (97,96%)
- b. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Triwulan 4 Tahun 2022 sebesar **97,63%**.
- c. Persentase Capaian Kinerja sasaran pendukung yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Triwulan 4 Tahun 2022 sebesar **102,67%**.
- d. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yaitu :
 - Perjanjian Kinerja telah dimonitor pencapaiannya melalui Evaluasi Rencana Aksi Triwulanan
 - Capaian kinerja outcome dan output telah disajikan dalam Laporan Kinerja Triwulan 4 TA. 2022 (Perbandingan capaian kinerja Triwulan 4 Tahun sebelumnya).
- e. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Tahun 2022 terhadap beberapa target sasaran Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur yaitu :
 - Penyesuaian penggunaan Aplikasi SIMDA NG pada Penatausahaan Keuangan yang mempengaruhi penyerapan anggaran
 - Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
 - Terdapat jabatan pelaksana yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
 - Terdapat beberapa sub kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan

- Pelaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan KAK dan anggaran kas yang telah disusun
 - Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang yang belum maksimal
- f. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat SKPD
 - Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam KAK dan mengacu kepada anggaran kas yang telah ditetapkan.
 - Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
 - Mencermati program/kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengatisipasi SILPA diakhir tahun

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan 4 Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi DPMPTSP dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya.

Malili, 10 Oktober 2022

KEPALA DINAS,



ANDI HABIL UNRU, SE

NIP. 19641231 198703 1 208

Pangkat : Pembina Utama Muda

LAPORAN TRIWULAN IV
BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu dan satu tempat. Dimana fungsi utamanya adalah melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal dengan sasaran terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional, berintegritas dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 penyelenggaraan PTSP bertujuan :

- Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
- Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima.
- Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah pelayanan perizinan, mempersingkat birokrasi dan mewujudkan komitmen DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur dengan memberikan pelayanan perizinan yang prima yaitu pemberian pelayanan yang sederhana, cepat, mudah, murah dan transparan melalui pelayanan online, pelayanan langsung ke masyarakat maupun pelayanan offline dalam kantor.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Keputusan kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Nomor 01/1/Tahun 2022 tanggal 01 Januari 2022 tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, maka diperjanjikan 2 Program, 2 Kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

- I) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 286.870.777,00.
2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 20.320.330,00.

- II) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebesar Rp. 29.999.850,00.

BAB III REALISASI KINERJA

Berdasarkan Evaluasi atas Rencana Aksi pada Triwulan I Tahun Anggaran Tahun 2022 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Target yang ditetapkan untuk triwulan IV sebesar 72%, terealisasi 133,5% dengan capaian kinerja 98,86%

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	98,86	Sangat Baik
2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100	Sangat Baik
Jumlah		198,86	
Realisasi Program		= 198,86/2 =99,43 %	Sangat Baik

Realisasi Program ini dihitung dengan formulasi :

Jumlah total capaian Kegiatan x 100

Jumlah Sub kegiatan yang mendukung Kegiatan

Capaian realisasi Program Pelayanan Penanaman Modal 99,43%
,dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sebesar 87,19%

Jumlah Pendaftaran izin = 1574

Jumlah izin terbit = 1556

Jumlah penyelesaian izin tepat waktu = 1513

Rata-rata penyelesaian Izin tepat waktu dihitung dari :

$$\frac{\text{Jumlah izin tepat waktu} \times 100}{\text{Jumlah pendaftaran izin}}$$

$$= \frac{1513 \times 100}{1574}$$

$$= 96,12 \%$$

Rata-rata Capaian Kinerja =

$$\frac{\text{Rata-rata penyelesaian izin tepat waktu} \times 100}{\text{Target kinerja triwulan II}}$$

$$= \frac{96,12 \times 100}{72}$$

$$= 133,5 \%$$

Rata-rata jumlah penyelesaian izin tepat waktu = 96,12%, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa izin yang terlambat dicetak dikarenakan aplikasi maintenance.

Untuk capaian kinerja Kegiatan dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah izin yang terbit} \times 100}{\text{Jumlah permohonan izin}}$$

Capaian kinerja program Pelayanan Penanaman Modal 98,86 % dari target 72%, melebihi dari target.

- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah kabupaten/Kota dan target yang ditetapkan 100%, terealisasi 100 % dengan capaian kinerja 100%

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	100	Target pada tw IV
Jumlah		100	
Realisasi Program		100	Sangat Baik

Realisasi Kegiatan ini dihitung dengan formulasi :

- Jumlah total capaian Kegiatan x 100

Jumlah Sub kegiatan yang mendukung Kegiatan

Capaian realisasi Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 100% dari target 100%

Capaian kinerja Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 100 % dari target 100%.

BAB IV

REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal dengan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota disajikan pada tabel berikut :

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	286.870.777	284.608.100	2.262.677
2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.320.330	19.208.080	1.112.250
Jumlah		307.191.107	303.816.180	3.374.927
Capaian Realisasi Keuangan			98,90 %	

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan kegiatan Pengelolaan data dan

Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota disajikan pada tabel berikut :

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	29.999.850	29.266.337	733.513
Jumlah		29.999.850	29.266.337	733.513
Capaian Realisasi Keuangan			97,55 %	

BAB V

PENUTUP

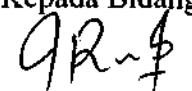
Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut :

PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
Pelayanan Penanaman Modal	99,43%	98,90%
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	97,55%

Capaian realisasi kinerja tidak mencapai target pada Program Pelayanan Penanaman Modal, hal ini disebabkan adanya maintenance Aplikasi Si Cantik dari pusat.

Malili, 10 Januari 2023

Kepada Bidang PTSP


Andi Rajuni, SE

NIP. 19820630 201001 2

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV

A. LATAR BELAKANG

1. Kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sebagai upaya untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan kondusif bagi para investor;
2. Pemerintah Daerah sebagai regulator pelaksanaan investasi sangat penting untuk menyusun regulasi yang dapat menarik investasi;
3. Peraturan daerah ini akan menjadi acuan dalam memberikan kepastian hukum kepada para investor dalam melaksanakan investasi di Kabupaten Luwu Timur.

B. TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal tujuannya antara lain :

1. Untuk menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
2. Untuk menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penanaman Modal sebagai implementasi dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.



**KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMEBRIAN
FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL T.A. 2022**

C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal sampai dengan triwulan 4 tahun anggaran 2022, telah dilaksanakan pembahasan draf rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko dan juga telah dilakukan kunjungan kerja baik dalam maupun luar provinsi. Sampai dengan akhir triwulan 4 telah dilakukan pembahasan dan



**KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMEBRIAN
FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL T.A. 2022**

harmonisasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga telah dilakukan rapat paripurna pengesahan di DPRD Kabupaten Luwu Timur.

E. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan yaitu pada triwulan IV (empat) telah tersusun naskah akademik rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penanaman Modal dan pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, sehingga hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan akhir triwulan IV (empat) adalah 100 % (seratus persen).
2. Adapun capaian prosentase realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV (empat) yaitu :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Keuangan}}{\text{Target Realisasi Keuangan}} \times 100 \% \\ &\quad \text{Rp 189.247.300,-} \\ &= \frac{\text{Rp 189.303.030,-}}{\text{Rp 189.303.030,-}} \times 100 \% \\ &= \mathbf{99,97 \%} \end{aligned}$$



**KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMEBRIAN
FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL T.A. 2022**

F. KENDALA DAN HAMBATAN

Adapun kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran sesuai anggaran kas triwulan IV (empat) yaitu :

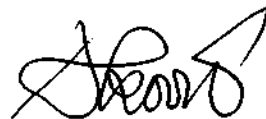
1. Adanya perubahan jadwal prolegda dari DPRD Kabupaten Luwu Timur, sehingga pembahasan prolegda tahap I yaitu Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko mengalami pergeseran. Hal ini berdampak pada daya serap anggaran perjalanan dinas yang telah dialokasikan pada triwulan II dan III.
2. Perubahan jadwal pembahasan prolegda tahap I, juga berdampak pada pembahasan prolegda tahap II yaitu rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penanaman Modal.

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan / pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2022.

Malili, 2 Januari 2023

Kabid Penanaman Modal/PPTK



AYUB KOMBONG, S.T.,M.Si
NIP. 19750825 200502 1 006



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV

A. LATAR BELAKANG

1. Kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan investasi dilapangan;
2. Pemerintah Daerah sebagai regulator pelaksanaan investasi sangat penting untuk melakukan pemetaan terhadap hambatan – hambatan terhadap pelaksanaan investasi ;
3. Pemerintah Daerah harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi investor.

B. TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal tujuannya antara lain :

1. Untuk mengetahui implelementasi pelaksanaan kebijakan pemberian insentif investasi dilapangan;
2. Melakukan pemetaan terkait permasalahan/kendala yang dihadapim dan harapan dalam rangka pengembangan usahnya;
3. Sebagai bahan masukan dalam melakukan evaluasi dan perumusan kebijakan kemudahan dan insentif investasi di Kabupaten Luwu Timur;



KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL T.A. 2022

C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan anggaran kas dan target kinerja yang telah ditetapkan, bahwa untuk pelaksanaan kunjungan / evaluasi akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2022.

E. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :



KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL T.A. 2022

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan sampai dengan triwulan IV telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan;
2. Adapun capaian prosentase realisasi keuangan sampai dengan triwulan I (satu) yaitu :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Keuangan}}{\text{Target Realisasi Keuangan}} \times 100 \% \\ &= \frac{\text{Rp 45.880.751,-}}{\text{Rp 46.008.815,-}} \times 100 \% \\ &= 99,72 \% \end{aligned}$$

F. KENDALA DAN HAMBATAN

Adapun kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran sesuai anggaran kas triwulan IV (empat) yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan untuk triwulan IV (empat) telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran maka akan pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV (empat) khususnya pelaksanaan kunjungan lapangan dan rapat evaluasi akan dimaksimalkan pelaksanaannya;
2. Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan akan melibatkan semua bidang lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.



**KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL T.A. 2022**

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/inentif dan kemudahan penanaman modal, sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan / pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2021.

Malili, 2 Januari 2023

Kabid Penanaman Modal / PPTK



AYUB KOMBONG, S.T.,M.Si
NIP. 19750825 200502 1 006



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV

A. LATAR BELAKANG

1. Bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum menyusun dokumen produk unggulan daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. Dokumen produk unggulan daerah akan menjadi arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan potensi usaha yang layak untuk dilakukan kegiatan promosi dan temu bisnis;

B. TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota tujuannya antara lain :

1. Melakukan identifikasi, klasifikasi dan inventarisasi terhadap kondisi dan potensi ekonomi infrastruktur, demografi dan para pelaku usaha lingkup wilayah Kabupaten Luwu Timur;
2. Menjadi basis data dan informasi tentang kondisi dan potensi ekonomi, infrastruktur, demografi, dan para pelaku usaha berdasarkan sektor/kegiatan usaha masing-masing;



C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan anggaran kas dan target kinerja yang telah ditetapkan, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan seminar hasil akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2022. Saat ini penyusunan dokumen peta potensi daerah masih dalam tahap proses lelang di Bagian Pengadaan Barang / Jasa.



E. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota yang ditetapkan pada triwulan 4 telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan;
2. Adapun capaian prosentase realisasi keuangan sampai dengan triwulan III (tiga) yaitu :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Keuangan}}{\text{Target Realisasi Keuangan}} \times 100 \% \\ &= \frac{\text{Rp 161.788.400,-}}{\text{Rp 171.535.040,-}} \times 100 \% \\ &= 94,32 \% \end{aligned}$$

F. KENDALA DAN HAMBATAN

Adapun kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran sesuai anggaran kas triwulan IV (empat) yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan untuk triwulan IV (empat) telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dimana pencairan belanja jasa konsultasi telah dilaksanakan sesuai perencanaan anggaran kas yang telah direncanakan.



2. Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan akan melibatkan semua bidang lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota, sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan / pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2023.

Malili, 2 Januari 2023

Kabid Penanaman Modal / PPTK



AYUB KOMBONG, S.T.,M.Si

NIP. 19750825 200502 1 006



LAPORAN TRIWULAN KE EMPAT KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memaksimalkan promosi dan meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Luwu Timur, maka dibutuhkan penyajian data yang akurat dan terbaru. Sehingga dibutuhkan untuk melakukan kegiatan promosi investasi ke calon investor agar potensi yang dimiliki suatu kabupaten dapat dilihat dan diketahui.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah untuk mempromosikan potensi yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur tahun 2022.

Tujuan yang diharapkan dalam Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah untuk memberikan gambaran kepada calon investor terkait potensi dan peluang investasi Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah terlaksananya keikutsertaan dalam kegiatan pameran investasi tahun anggaran 2022.

II. TARGET DAN TUJUAN

2.1 Target Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2022 dengan Anggaran sebesar **Rp.165.805.990,-**

Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pada kegiatan Promosi Penanaman Modal sebesar **Rp 164.012.000,-** atau sekitar **98,91 %** dan sisanya **Rp.1.793.990,-**

2.2 Target kinerja

Target kinerja dari Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah keikutsertaan pada satu event pameran.

2.3 Realisasi Kinerja

Pencapaian realisasi kinerja kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah pada Triwulan Empat (4) adalah terlaksana kegiatan pameran yang diselenggarakan di Makassar.

III. CAPAIAN

3.1 Capaian

Capaian Anggaran kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah adalah 98,91 % dan capaian Kinerja pada triwulan tiga adalah 100%.

Malili, 01 Januari 2023

PPTK



Ayub Kombong

Nip.19830528 200502 1 006

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memaksimalkan promosi dan meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Luwu Timur, maka dibutuhkan inovasi untuk memberikan informasi kepada calon investor terkait potensi yang dimiliki sebuah Kabupaten. Maka dalam hal ini kegiatan penyediaan dan penyebar luasan informasi merupakan solusi untuk memberikan gambaran potensi yang dimiliki oleh Kabupaten.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal adalah untuk mempromosikan potensi yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur tahun 2022

Tujuan yang diharapkan dalam kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal adalah untuk memberikan gambaran kepada calon investor terkait potensi dan peluang investasi Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal adalah terpublikasinya potensi dan peluang investasi yang dimiliki Kabupaten.

II. TARGET DAN TUJUAN

2.1 Target Anggaran

Pelaksanaan kegiatan kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPSTSP Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2022 dengan Anggaran sebesar Rp 22.638.490.

2.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pada kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal sebesar Rp 21.507.500,- atau sekitar 95 %.

2.3 Target kinerja

Target kinerja dari kegiatan penyediaan dan penyebar luasan informasi adalah Terpublikasinya potensi investasi daerah di tiga Media.

2.4 Realisasi Kinerja

Pencapaian realisasi kinerja kegiatan kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal pada Triwulan Empat (4) adalah terlaksananya dua publikasi potensi investasi pada media cetak.

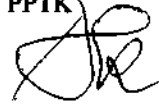
III. CAPAIAN

3.1 Capaian

Capaian Anggaran kegiatan kegiatan penyediaan dan penyebar luasan informasi adalah 95 % dan capaian Kinerja triwulan pertama adalah 100 % .

Malili, 01 Januari 2023

PPTK



Ayub Kombong

Nip.19830528 200502 1 006

LAPORAN TRIWULAN IV
BIDANG PENGENDALIAN PENGAWASAN
DAN PENGADUAN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada saat ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, rencana tersebut biasanya dituangkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Program yang dilaksanakan dan telah dijabarkan dalam 3 (Tiga) kegiatan ini telah dilaksanakan namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut baik kendala teknis belum memadai. Untuk mendapatkan nilai yang maksimal perlu penekanan pelaksanaan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance, yang sejalan dengan Tugas pokok Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Pengaduan, pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, yaitu mengendalikan, mengawasi, membina, mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

Dengan tersusunnya laporan realisasi kegiatan pada Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dibidang Penanaman Modal.

Untuk Tahun 2022, Dinas PM dan PTSP Mendapatkan DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/ BKPM RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal T.A 2022 Sebesar 417.092.000

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan perjanjian kinerja Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, maka diperjanjikan kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten 3 Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal.

Dengan anggaran Rp. 102. 921. 550 dengan target 8 Kegiatan Usaha

2. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal dengan Anggaran Rp. 215. 381. 761 Dengan target 217 Pelaku Usaha
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal dengan Anggaran Rp. 98. 788. 490 Target 14 Kegiatan Usaha.

BAB III

REALISASI KINERJA

Berdasarkan Evaluasi atas rencana aksi pada Triwulan III Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sub kegiatan koordinasi dan Singkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman Modal , dengan anggaran Rp. 102. 921. 550 Dengan target 8 Kegiatan Usaha.

$$= \frac{\text{Realisasi Kegiatan Usaha telah dilakukan penyelesaian permasalahan}}{\text{Target pemantauan (kegiatan penyelesaian permasalahan)}} \times 100\%$$

$$= \frac{3 \text{ Kegiatan Usaha}}{3 \text{ Kegiatan Usaha}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal dengan anggaran Rp. 215. 381. 761 Dengan Target 217 Pelaku usaha.

$$= \frac{\text{Realisasi Pelaku Usaha Yang mengikuti Sosialisasi/ BIMTEK}}{\text{Target Pelaku Usaha untuk ikut sosialisasi/ BIMTEK}} \times 100\%$$

$$= \frac{120 \text{ Pelaku Usaha}}{120 \text{ Pelaku Usaha}} \times 100\%$$

$$= 0$$

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal dengan Anggaran Rp. 98. 788. 490 Target 14 Pelaku Usaha

$$= \frac{\text{Realisasi kegiatan usaha PMDM dan UKM yang di Awasi}}{\text{Target yang di Awasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{3 \text{ Pelaku Usaha}}{3 \text{ Pelaku Usaha}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

REALISASI KEGIATAN TRIWULAN IV

NO	SUB KEGIATAN	TARGET tw4	REALISASI	%
1.	Koordinasi dan Singkronisasai Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	3 KEGIATAN USAHA	3 KEGIATAN USAHA	100 %
2.	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan PM	3 PELAKU USAHA,-	3 PELAKU USAHA	100%
3	Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian PM	120 PELAKU USAHA	120 PELAKU USAHA	100 %
				100 %
CAPAIAN REALISASI KEGIATAN				100 %

BAB IV

REALISASI KEUANGAN

Berdasarkan Evaluasi atas Rencana Aksi Pada Triwulan IV Tahun
Anggaran 2022 :

NO	PROGRAM	ANGARAN	REALISASI	SELISIH
1.	Program Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kota	417.091.801	391.110.006	25.981.795
TOTAL		417.091.801	391.110.006	25.981.795
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN		98,77 %		

BAB V

PENUTUP

Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan pada Program Pengendalian Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
100 %	98.77 %

Malili, Januari 2023
Kepala Bidang



SAINAB SAMARING, S.KOM
Nip. 197501172006042016

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV KEGIATAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMBINAAN PENANAMAN MODAL (BIMBINGAN TEKHNIS/ SOSIALISASI)

A. LATAR BELAKANG

1. DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2022
2. Pencapaian target Realisasi Penanaman Modal melalui kegiatan bimbingan Teknis Kepada pelaku usaha PMDN dan UKM.

B. TUJUAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pembinaan tujuannya antara lain :

1. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha PMDN dan UKM.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis terkait dengan kegiatan pelaksanaan penanaman modal, meliputi
 - a. Bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko
 - b. Bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko. Yang meliputi : Laporan LKPM

C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang –undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal :
2. Peraturan menteri Investasi/ Kepala BKPM RI, Nomor 8 tahun 2021 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun anggaran 2022;

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan anggaran khas dan target kinerja yang telah ditetapkan, bahwa untuk pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal pada Triwulan I s.d Triwulan IV tahun 2022, Sebanyak 8 kali kegiatan Bimbingan/Sosialisasi, dan target pelaku usaha di TW IV ini sebanyak 120 pelaku usaha

E. REALISASI KINERJA

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. untuk pencapaian target kinerja kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan penanaman modal DAK Non Fisik yang ditetapkan pada Triwulan IV dilaksanakan :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Kegiatan Bimtek/ Sosialisas}}{\text{Target Kegiatan Bimtek}} \times 100 \% \\ &= \frac{120 \text{ Pelaku Usaha}}{120 \text{ pelaku usaha}} \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

F. KENDALA DAN HAMBATAN

Terkait dengan kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran alhamdulillah dapat diminimalisir dengan menyesuaikan petunjuk yang ada.

G. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha sebagai Bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan/pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2022.

Malili, Januari 2023

Kabid Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan



SAINAB SAMARING.S.KOM

NIP. 197501172006042016

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMANTAUAN
PENANAMAN MODAL (PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN
HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM
MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA)**

A. LATAR BELAKANG

1. DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2022
2. Pencapaian target realisasi penanaman modal melalui kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya.

B. TUJUAN

Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan penanaman modal (Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merelisasikan kegiatan usahanya tujuannya antara lain :

1. Identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usaha.
2. Penyelesaian permasalahan dan hambatan dilakukan melalui pertemuan secara tatap muka antara pelaku usaha, pemerintah, dan narasumber.
3. Evaluasi penyelesaian hambatan dan permasalahan.

C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Peraturan menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Nomor 8 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana alokasi khusus non fisik fasilitas penanaman modal tahun anggaran 2022.

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan anggaran khas dan target kinerja yang telah ditetapkan, bahwa untuk pelaksanaan Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Penanaman Modal di TW IV ini sebanyak 3 kegiatan usaha

E. REALISASI KINERJA

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan penanaman modal DAK Non Fisik yang ditetapkan pada Triwulan IV adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi Kegiatan}}{\text{Target Kegiatan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{3 \text{ kegiatan usaha}}{3 \text{ kegiatan usaha}}$$

$$= 100 \%$$

F. KENDALA DAN HAMBATAN

Terkait dengan kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran alhamdulillah dapat diminimalisir dengan menyesuaikan petunjuk yang ada.

G. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi kepada pelaku usaha sebagai Bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan/ pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2022.

Malili, Januari 2023

Kabid Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan



SAINAB SAMARING.S.KOM

NIP. 197501172006042016

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PENGAWASAN
PENANAMAN MODAL**

A. LATAR BELAKANG

1. DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2022
2. Pencapaian target realisasi penanaman modal melalui kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya.

B. TUJUAN

Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penanaman modal tujuannya antara lain :

1. Analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha.
2. Inspeksi lapangan.
3. Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha.

C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Peraturan menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Nomor 8 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana alokasi khusus non fisik fasilitas penanaman modal tahun anggaran 2022.

D. KEGIATAN, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, bahwa untuk pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal di TW IV ini sebanyak 3 kegiatan usaha

E. REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi atas target kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum pencapaian target kinerja kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penanaman modal DAK Non Fisik yang ditetapkan pada Triwulan IV adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi Kegiatan}}{\text{Target Kegiatan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{3 \text{ kegiatan usaha}}{3 \text{ kegiatan usaha}}$$

$$= 100 \%$$

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan kepada pelaku usaha sebagai Bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus masukan kepada pihak penentu kebijakan/ pengambil keputusan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan untuk Tahun Anggaran 2022.

Malili, Januari 2023

Kabid Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan



SAINAB SAMARING.S.KOM

NIP. 197501172006042016